

Melanjutkan
Pemikiran dan Perjuangan
GUS DUR

Melanjutkan
Pemikiran dan Perjuangan
GUS DUR

A Muhaimin Iskandar

**Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan
Gus Dur**

A Muhaimin Iskandar

© LKiS, 2010

Editor: *Umaruddin Masdar*

Layout: *Rizal Mahmudi*

Cover: *Imambang Ali*

Penerbit:

LKiS Yogyakarta

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp./Faks: 0274-417762

e-mail: lkis@lkis.co.id

Cetakan I, Juli 2010

Daftar Isi

Daftar Isi ~ v

Pengantar Penulis ~ vii

Catatan Editor ~ vii

1. Gus Dur, *Muballig* Kemanusiaan ~ 1
2. Gus Dur: Perawat Tradisi dan Penjaga Demokrasi ~ 7
3. Gus Dur dan Toleransi Plus ~ 15
4. Melanjutkan Perjuangan Gus Dur di Bidang HAM ~ 23
5. Gus Dur dan Internasionalisasi Peran Ulama ~ 31
6. Gus Dur, Guru Sumber Inspirasi dan Yang Membesarkan ~ 47
7. “Cattenacio” Gus Dur, Islam dan NKRI ~ 53

8. Gus Dur, PKB, dan Kebangkitan Indonesia ~ 59
9. Gus Dur dan “*Siyasah*” Bersendi “*Syariah*” ~ 67
10. Belajar Politik Kepada Gus Dur ~ 75
11. Gus Dur dan Visi Kebangkitan Bangsa ~ 83
12. Gus Dur dan Transformasi Kebangkitan Islam ~ 91
13. Gus Dur dan Kebangkitan Kembali Indonesia ~ 99
14. Menjaga Visi Nasional: Soal Khilafah, Pancasila dan NKRI ~ 107
15. Berguru pada Pendiri NU ~ 121
16. NU, Transformasi Bangsa dan Demokratisasi ~ 127
17. PKB, Kiai dan Tradisi NU ~ 141
18. Wawancara Khusus ~ 147

Daftar Pustaka ~ 161

Index ~ 161

Sumber Tulisan ~ 179

Tentang Penulis ~ 181

Pengantar Penulis

Buku ini merupakan kumpulan tulisan saya tentang Gus Dur atau refleksi atas pemikiran-pemikiran besar dan perjuangannya, yang tersebar di berbagai media massa, dan sebagian merupakan pengantar sebuah buku.

Pemikiran dan perjuangan Gus Dur disebut besar karena sifatnya yang melampaui batas-batas agama, etnis, budaya dan bangsa. Pemikiran dan perjuangannya merangkum gagasan-gagasan besar dari berbagai agama, tradisi, budaya dan peradaban manusia, sehingga ia bersifat memayungi semua aspirasi dan kepentingan kelompok masyarakat dari berbagai keyakinan.

Dari pemikiran dan perjuangannya itu, Gus Dur telah melakukan investasi abadi yang akan

membuatnya terus dikenang, yaitu (1) *amal jariyah* berupa terobosan-terobosan besar dalam kehidupan bangsa dan masyarakat, sehingga Indonesia bisa jauh lebih demokratis dan toleran; (2) *ilmu yang bermanfaat*, yaitu pemikiran-pemikiran dan pengetahuannya tentang kehidupan yang terus menjadi rujukan dan payung bagi generasi penerusnya; dan (3) *generasi saleh* yang terus berikhtiar untuk menyebarkan gagasan-gagasannya, di samping mendoakannya. Dengan tiga hal tersebut, maka amal Gus Dur selama di dunia tidak akan pernah putus pahala dan manfaatnya.

Semoga kita semua bisa meneruskan pemikiran dan perjuangannya, bukan semata-mata karena pemikiran dan perjuangan Gus Dur memang sangat agung dan mulia, tetapi karena kita semua mencitai bangsa ini beserta seluruh komponen yang ada di dalamnya.

Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penerbitan buku ini, khususnya kepada penerbit LKiS Yogyakarta dan kepada editor yang telah mengumpulkan dan mengoreksi naskah buku ini.

Jakarta, Mei 2010

Mengenal Kedekatan Cak Imin dan Gus Dur

- *Catatan Editor*

Sejak berkiprah sebagai aktivis dan politisi pada pertengahan tahun 1990-an, A Muhaimin Iskandar adalah sosok muda yang selalu dekat dengan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Bagi Cak Imin – sapaan akrabnya – Gus Dur adalah penyelamat Nahdlatul Ulama ketika menghadapi rezim Orde Baru yang represif. Gus Dur juga telah menjadi jendela rumah NU, sekaligus rumah Indonesia. Pemikiran dan sikap politiknya telah menjadi sumber inspirasi, jembatan, dan sekaligus solusi bagi NU dan Republik ini.

Kedekatan itu menjadi lebih rekat karena Cak Imin masih termasuk salah satu keponakan Gus Dur.

Cak Imin adalah cicit KH Bisri Syansuri, sedangkan Gus Dur adalah cucu salah satu tokoh pendiri NU itu. Bagi Cak Imin, Gus Dur sudah seperti orang tuanya sendiri, di samping guru politiknya yang utama. Tidak heran jika dalam banyak hal Cak Imin selalu meminta nasihat kepada Gus Dur. Dan Cak Imin sendiri sering mendapat tugas khusus dari Gus Dur dalam menjalankan strategi politiknya di masa lalu.

Kedekatan Gus Dur dengan Cak Imin bisa dilihat dalam beberapa fakta berikut. **Pertama**, ketika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan pada tahun 1998, Cak Imin adalah satu-satunya anak muda yang mendapat kepercayaan Gus Dur dan para kiai untuk menjabat sebagai Sekjen DPP PKB yang pertama. Waktu itu banyak kader muda NU yang potensial, tetapi Cak Imin lah yang dipilih Gus Dur dan para kiai.

Kedua, pada pemilihan pimpinan DPR RI tahun 1999, Cak Imin juga yang ditunjuk Gus Dur dan DPP PKB untuk mewakili PKB menjadi Wakil Ketua DPR RI. Banyak anggota Fraksi PKB yang potensial, tetapi Gus Dur lebih memilih Cak Imin. Sepertinya ada sinyal dari Gus Dur bahwa Cak Imin akan menjadi pemimpin PKB masa depan.

Ketiga, setelah Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB di Yogyakarta, Sekjen DPP PKB dipegang oleh Saifullah Yusuf, keponakan Gus Dur yang lain. Sementara Cak Imin menjadi salah satu Ketua DPP PKB. Dalam perkembangannya, Gus Dur tidak cocok dengan Saifullah, dan Rapat Dewan Syura PKB pada 1 September 2003 memutuskan untuk mereposisi Saifullah dari jabatan Sekjen PKB. Dan Cak Imin dipilih kembali oleh Gus Dur dan para kiai untuk menjadi Sekjen DPP PKB sampai Muktamar II PKB di Semarang tahun 2005.

Keempat, pada pemilihan pimpinan DPR RI hasil Pemilu 2004, Gus Dur kembali memilih Cak Imin untuk maju dalam pemilihan tersebut. Waktu itu Cak Imin maju dalam paket Koalisi Kebangsaan bersama wakil dari Golkar (Agung Laksono), PDIP (Soetardjo Soerjoguritno), dan PBR (Zainal Maarif). Sementara di pihak lain, Gus Dur memasang Ali Masykur Moesa dalam paket Koalisi Kerakyatan bersama Partai Demokrat, PPP dan PKS. Jelas menurut hitungan di atas kertas, Koalisi Kebangsaan akan menang, karena di dalamnya ada tiga besar pemenang Pemilu 2004, yaitu Golkar, PDIP dan PKB, bergabung menjadi satu. Ini menunjukkan bahwa Cak Imin dipilih secara sungguh-sungguh

oleh Gus Dur untuk menjadi pimpinan DPR, sementara Ali Masykur Moesa dipasang untuk *untung-untungan* saja, untukantisipasi kemungkinan terburuk jika Koalisi Kerakyatan menang, biar PKB tetap mempunyai wakil di Pimpinan DPR RI. Dan akhirnya Koalisi Kebangsaan yang menang, dan Cak Imin pun menjadi Wakil Ketua DPR RI untuk periode keduanya.

Kelima, menjelang Muktamar II PKB di Semarang awal 2005, banyak kader PKB yang berniat maju sebagai kandidat Ketua Umum DPP PKB. Ada Ali Masykur Moesa, Saifullah Yusuf Mahfud MD, dan Muhaimin Iskandar sendiri. Terhadap beberapa kandidat itu, Gus Dur lebih memilih Cak Imin. “Muhaimin lebih tahu saya,” kata Gus Dur di berbaga media massa. Dan akhirnya Cak Imin terpilih sebagai Ketua Umum DPP PKB dengan meraih dukungan 304 suara. Sementara Ali Masykur mendapat 27 suara, Saifullah Yusuf 26 suara dan Mahfud MD hanya 2 (dua) suara.

Keenam, setelah Muktamar Semarang digelar, segelintir orang yang kalah dan tidak puas kemudian mendirikan PKB tandingan dengan menamakan diri sebagai PKB hasil Muktamar Surabaya. Kelompok ini dipimpin oleh Choirul Anam. Untuk menyela-

matkan PKB, Cak Imin bersama timnya dipercaya penuh oleh Gus Dur untuk mengurus proses hukum di pengadilan. Dan akhirnya, Cak Imin bisa menyelamatkan PKB dengan memenangkan proses hukum tersebut.

Ketujuh, sepanjang tahun 2007, ketika ketegangan Gus Dur dan Cak Imin mulai muncul, setidaknya tiga kali utusan alm. KH Sonhaji Chasbullah (Mbah Son) Jimbun Kebumen *sowan* ke Gus Dur mengantarkan surat pribadi Mbah Son untuk Gus Dur. Mbah Son adalah salah satu ulama *khos* yang sangat dihormati Gus Dur. Di mata Gus Dur, Mbah Son adalah seorang *waliyullah*. Ketika dibacakan surat dari Mbah Son tersebut, Gus Dur selalu menjawab “saya tidak pernah ada masalah dengan Muhaemin”. Surat-surat dari Mbah Son tersebut sekaligus menunjukkan dukungan spiritual dari kiai-kiai terhadap Cak Imin, termasuk dari kiai-kiai gurunya Gus Dur sendiri.

Cak Imin, Sang “Gus Durian” dan Loyalis NU

Dengan fakta-fakta di atas, bisa dikatakan tidak ada yang membantah bahwa sejak lama Gus Dur sangat dekat dan percaya dengan Cak Imin.

Mengapa bisa demikian? Ada banyak jawaban yang bisa dikemukakan. Tapi setidaknya ada tiga yang paling utama. **Pertama**, Cak Imin adalah kader muda yang sangat loyal kepada Gus Dur dan juga cita-cita perjuangan NU. Semangatnya untuk memperjuangkan kepentingan NU dan umat sangat tinggi.

Tapi, apakah sebenarnya ukuran loyalitas terhadap Gus Dur? Ketua Umum PBNU, Prof Dr KH Said Aqil Sirajd pernah menyatakan bahwa ukuran pertama dan utama apakah seseorang itu orang loyal kepada Gus Dur atau tidak adalah sikapnya terhadap Gus Dur pada Mukttamar ke-29 NU di Cipasung Jawa Barat tahun 1994. Jadi ukurannya bukan kedekatan dengan Gus Dur pada saat menjadi Presiden atau sesudahnya. Mengapa harus Mukttamar Cipasung tahun 1994 yang menjadi ukuran? Menurut Kiai Said, karena pada waktu itu, orang yang membela Gus Dur harus benar-benar siap-siap untuk miskin dan tersingkir secara politik, bahkan secara fisik. Membela Gus Dur di Cipasung benar-benar beresiko tinggi.

Seperti kita tahu, waktu itu Gus Dur maju kembali sebagai calon Ketua Umum PBNU. Namun, Presiden

Soeharto dan pemerintah Orde Baru secara umum tidak menghendaki Gus Dur, dan mendorong agar Muktamar memilih Abu Hasan, calon yang didukung pemerintah. Segala upaya ditempuh pemerintah untuk memenangkan Abu Hasan. Cabang-cabang diintimidasi, kiai-kiai didekati. Uang dalam jumlah besar sudah disiapkan untuk menyingkirkan Gus Dur. Namun, waktu itu Gus Dur didukung oleh kader-kader NU dan kiai-kiai yang ikhlas. Mereka siap “miskin” dan “disingkirkan” oleh Orde Baru, demi menjaga harga diri dan kemandirian NU.

Dan Muktamar NU di Cipasung itu, Cak Imin termasuk salah satu kader muda NU yang loyal kepada Gus Dur dan siap mengorbankan segalanya untuk membela kemandirian NU.

Itulah ukuran loyalitas sebenarnya kepada Gus Dur. Bukan semata-mata ketika Gus Dur menjadi presiden, juga bukan masa-masa sesudahnya. Dan sampai saat ini Cak Imin tetap menghormati Gus Dur, serta tetap konsisten meneruskan pemikiran dan perjuangan politik Gus Dur.

Meskipun dalam beberapa bulan terakhir masa hidupnya, Gus Dur – karena pengaruh beberapa or-

ang yang ingin merebut kekuasaan di PKB – sering “menyerang” Cak Imin, tetapi Cak Imin sendiri tetap hormat kepada Gus Dur dan sabar menerima itu semua. Menurutnya, begitulah cara dan gaya Gus Dur membesarkan kader-kader muda NU sehingga tangguh dan matang secara politik.

Kedua, dalam banyak hal, Cak Imin adalah pemimpin muda yang banyak mengikuti langkah Gus Dur dalam berpolitik. Ia tipe pemimpin yang sabar menempuh jalan politik dari bawah, melalui perjuangan dan tempaan pengalaman. Gus Dur sebelum menjadi presiden, sudah malang-melintang sebagai pengurus dan Ketua Umum PBNU selama lebih dari 15 tahun. Cak Imin menempuh jenjang politik benar-benar dari bawah mulai dari Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa UGM, Ketua PMII Cabang Yogyakarta, Ketua Umum PB PMII, Sekjen DPP PKB, Ketua PKB, dan akhirnya Ketua Umum DPP PKB.

Ketiga, Cak Imin adalah pemimpin muda NU yang bisa dikatakan sangat fasih menerjemahkan pemikiran-pemikiran Gus Dur. Cak Imin selalu mensosialisasikan pemikiran-pemikiran besar Gus Dur dan tokoh-tokoh besar NU tentang agama, demokrasi dan masalah kemanusiaan secara umum.

Setidaknya sudah dua buku yang ditulis Cak Imin dalam rangka menerjemahkan pemikiran dan langkah-langkah politik Gus Dur. Yang pertama adalah buku *Gus Dur Yang Saya Kenal* (2004), dan kedua *Gus Dur, Islam dan Kebangkitan Indonesia* (2007). Selain itu, sudah puluhan artikel dan makalah yang ditulis Cak Imin mengenai pemikiran Gus Dur. Tulisan-tulisan itu tersebar di berbagai media seperti *Kompas*, *Jawa Pos*, *Seputar Indonesia* dan koran-koran daerah lainnya.[]

Gus Dur, *Muballig* Kemanusiaan

Dalam ajaran Islam, salah satu sifat dan tugas utusan Tuhan (rasul) adalah *tablig*, yaitu selalu menyampaikan dan menyebarkan ajaran-ajaran Tuhan. Di masa kemudian, para juru *tablig* atau dakwah sering disebut dengan istilah *muballig*.

Dengan demikian, *muballig* adalah orang-orang yang mendedikasikan diri di jalan Allah untuk menyebarkan ajaran agama. Hanya saja, kebanyakan *muballig* di masa kini cenderung mendegradasi ajaran agama menjadi soal-soal simbol, hukum atau norma-norma, sehingga *muballig* dengan sendirinya cenderung berpikiran hitam putih dan legal formalistik.

Alm. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga seorang *muballig*. Seluruh hidupnya bisa dikatakan didedikasikan untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama. Melalui tulisan-tulisannya, ceramahnya dan aktivitas kehidupan serta pembelaannya terhadap sesama, Gus Dur menyebarkan ajaran-ajaran agama. Namun berbeda dengan para *muballig* konvensional yang cenderung menyebarkan ajaran-ajaran agama sebatas pada dimensi normatif dan simboliknya, Gus Dur selalu menyebarkan inti ajaran agama, yaitu ajaran yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta kemanusiaan.

Karena yang disebarkan adalah inti ajaran agama, dakwah Gus Dur bersifat terbuka, menyeluruh dan mampu merangkum ajaran-ajaran yang baik dari semua agama dan peradaban. Dakwahnya juga tidak hanya ditujukan kepada dan diterima oleh kelompoknya saja, tetapi juga pemeluk agama lain dan bahkan lintas bangsa.

Lima Aras

Kalau dicermati secara seksama, setidaknya ada lima aras dakwah Gus Dur sebagai *muballig* kemanusiaan. *Pertama*, Gus Dur senantiasa

mengembangkan pemikiran dan kesadaran bahwa agama diturunkan ke bumi ini adalah untuk kebaikan dan memudahkan kehidupan manusia beserta alam seisinya. Agama hadir bukan untuk memberi beban, menakut-nakuti atau menjadi ancaman bagi agama lain. Agama hadir untuk memudahkan tugas manusia sebagai khalifah di bumi dan mewujudkan kemaslahatan di antara mereka.

Kedua, Gus Dur seringkali menyatakan Islam dan agama-agama yang ada hanya merupakan salah satu bagian saja dari kehidupan masyarakat bangsa, bukan faktor tunggal. Karena itu, posisi dan ajaran agama harus ditempatkan dalam fungsi komplementer bersama nilai-nilai, ideologi atau kelompok yang lain. Menempatkan dan memahami agama sebagai faktor tunggal dan yang paling menentukan hanya akan mendorong lahirnya pemikiran dan tindakan *absurd* yang bertentangan dengan inti ajaran agama itu sendiri.

Ketiga, Gus Dur juga sering berbicara soal hukum atau dimensi normatif agama. Namun bagi Gus Dur norma-norma agama akan berfungsi efektif jika ia bisa menjadi etika sosial yang menyatu dengan

kesadaran masyarakat. Tanpa bisa menjadi etika sosial, norma-norma agama akan kehilangan dimensi moral dan etisnya, sehingga manifestasi keberagaman menjadi sangat kaku dan hitam-putih.

Keempat, dalam berdakwah, Gus Dur senantiasa menyebarkan toleransi di internal dan di antara agama-agama itu sendiri. Tidak pernah merasa paling benar (*truth claim*). Bagi Gus Dur, toleransi yang sesungguhnya tidak sekadar hidup berdampingan secara damai dalam suasana saling menghormati dan menghargai, tetapi juga adanya kesadaran dan kesediaan untuk menerima ajaran-ajaran luhur dari agama atau keyakinan berbeda. Dengan toleransi itulah, suasana damai dan dimanis bisa dijaga dan kemuliaan ajaran agama menampakkan wujudnya.

Kelima, dalam kehidupan politik, Gus Dur juga mendedikasikan hidupnya untuk mewujudkan demokrasi dan tegaknya hak asasi manusia secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat bangsa. Bagi Gus Dur, demokrasi merupakan manifestasi terbaik dari nilai-nilai luhur agama. Dan dalam sistem demokrasi dimungkinkan umat dari berbagai

agama, kepercayaan dan suku bisa bersatu untuk mewujudkan tujuan nasionalnya, serta terlindunginya hak-hak asasi manusia.

Melampaui Kekuasaan

Lima aras dakwah Gus Dur itu menjadi pengabdian utama sepanjang hidupnya. Ia sangat total dalam berdakwah, sehingga bisa melampaui hal-hal yang sulit dilakukan oleh orang lain. Pertama, Gus Dur bisa melampaui godaan kekuasaan. Ia memang pernah berkuasa dengan menjadi seorang presiden, tetapi kekuasaan bagi Gus Dur bukan untuk kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan juga bukan soal status sosial. Kekuasaan diraih justeru untuk mewujudkan kelima aras dakwah di atas. Sehingga, ketika kehilangan kekuasaannya, Gus Dur tidak mengalami guncangan dan dengan mudah bisa kembali fokus pada lima aras perjuangannya itu.

Kedua, Gus Dur juga bisa melampaui godaan materi dan hal-hal yang bersifat duniawi lainnya. Kebanyakan pemimpin mengambil kesempatan saat berkuasa untuk menumpuk kekayaan, baik dengan jalur yang legal maupun illegal, terbuka atau sembunyi-sembunyi. Tapi tidak demikian dengan

Gus Dur. Pada saat menjadi presiden atau setelahnya, Gus Dur tidak lebih kaya dari masa sebelumnya.

Dalam sejarah politik dan gerakan sosial di Indonesia, Gus Dur bukan hanya teladan bagaimana menjadi pemimpin politik, tetapi juga bagaimana menjadi pemimpin sosial dengan fokus perjuangan yang memiliki dimensi keabadian. Yaitu perjuangan atau dakwah mewujudkan nilai-nilai luhur agama dan kemanusiaan. Tidak heran jika Gus Dur diakui sebagai Bapak Demokrasi, Bapak Pluralisme, Pahlawan HAM, Bapak Toleransi dan berbagai sebutan yang lain.

Menjadi *muballig* kemanusiaan di tengah masyarakat yang tengah mengalami degradasi tentu tidak mudah. Gus Dur bukan hanya berhadapan dengan pemimpin-pemimpin pro *status quo* dan kelas onggang-onggang, tetapi juga berhadapan kaum fundamentalis agama dan pasar. Namun Gus Dur adalah *muballig* sejati, ia terus berjuang mewujudkan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan sampai akhir hayatnya, karena menjadi *muballig* adalah jalan dan panggilan hidupnya. []

Gus Dur: Perawat Tradisi dan Penjaga Demokrasi

Akhir Desember 2004, lebih dari lima tahun yang lalu, bangsa Indonesia berduka karena meninggalnya ratusan ribu manusia di bumi Aceh dan Sumatera Utara akibat peristiwa gempa bumi dan tsunami. Akhir Desember 2009 yang lalu bangsa Indonesia berduka karena meninggalnya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh besar bangsa yang diakui dunia, karena pemikiran dan kepeduliannya kepada tradisi, toleransi, hak asasi manusia dan demokrasi.

Yang khas dari Gus Dur adalah bahwa pemikiran-pemikirannya dibangun di atas nalar tradisi pesantren di mana ia lahir, tumbuh dan berkembang. Pemikiran dan pembelaan Gus Dur

terhadap demokrasi, hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang lain, sepenuhnya bersumber dari khazanah keilmuan pesantren. Demikian juga pembelaannya terhadap kelompok keagamaan yang dianggap sesat, mereka yang teraniaya dan kelompok minoritas yang lain.

Karena itu tidak heran jika Gus Dur begitu dekat dan dicintai oleh berbagai kelompok agama, termasuk minoritas di kalangan umat Islam sendiri. Berbagai terobosan pemikiran dan kebijakannya - - termasuk ketika menjabat sebagai Presiden -- telah menjadi inspirasi, referensi dan solusi bagi bangsa ini.

Setidaknya ada lima gugus besar pemikiran yang diperjuangkan Gus Dur sepanjang hidupnya melalui berbagai aktivitas sosial, politik dan keagamaannya. *Pertama*, dalam keyakinan Gus Dur sesuai dengan khazanah keilmuan NU, syariat Islam diturunkan kepada manusia tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk melindungi kepentingan dasar manusia itu sendiri, mewujudkan kedamaian, kemaslahatan dan kemajuan di antara mereka. Untuk tujuan itu, para ulama di masa lampau merumuskan sebuah konsep

yang dikenal dengan *maqashid as-syariah* atau tujuan-tujuan syariat

Dalam salah satu karya monumentalnya, *al-Mustasyfa* (Jilid I, hlm. 278), Al-Ghazali menyebutkan tujuan syariat diturunkan kepada manusia adalah untuk melindungi lima hal, yaitu: (1) agama dan keyakinan, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan dan (5) harta atau hak milik pribadi. Dengan demikian, Islam dalam pandangan Gus Dur sangat melindungi kebebasan beragama, berkeyakinan, berprofesi dan berpikir. Islam sangat melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia (HAM).

Sesuai dengan tujuan syariat, Gus Dur sangat mengedepankan toleransi beragama dan menjunjung tinggi komunikasi dengan kelompok agama berbeda. Bagi Gus Dur, kebesaran Islam di masa lampau bisa dimungkinkan karena peradaban Islam mampu menyerap nilai-nilai dari peradaban dan agama lain.

Pada seminar “Agama dan Masyarakat” di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga Jawa Tengah, tahun 1992 misalnya, Gus Dur mengatakan bahwa toleransi keberagamaan tidak

cukup sebatas hidup berdampaiingan secara damai (*peaceful coexistence*). Lebih dari itu, toleransi harus diwujudkan dalam kesediaan untuk saling belajar, memberi dan menerima (*take and give*) di antara umat beragama.

Kedua, Gus Dur adalah tokoh agama yang sangat anti-kekerasan. Bagi Gus Dur, kekerasan bukan hanya bertentangan secara diametral dengan ajaran Islam, tetapi juga merugikan Islam itu sendiri. Dalam konteks inilah, Gus Dur selalu mengedepankan dialog, baik antar-umat seagama maupun antar-agama.

Menurut Gus Dur, pertentangan pendapat tidak semuanya harus diselesaikan dengan melarang atau menyesatkan kelompok lain. Toleransi justru bisa lebih membawa hasil. Bagi Gus Dur, hak hidup dan menjalankan ajaran agama yang diyakini merupakan hak dasar yang dijamin sepenuhnya oleh syariat.

Ketiga, demokrasi adalah bagian dari manifestasi tujuan syariat dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam pandangan Gus Dur, dalam dunia modern demokrasilah yang dapat mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan-

kekuatan bangsa. Demokrasi dapat mengubah ketercerai-beraian arah masing-masing kelompok menjadi berputar bersama-sama menuju kedewasaan, kemajuan dan integritas bangsa. Demokrasi menjadi sedemikian penting dalam sebuah negara yang pluralistik karena ternyata perikehidupan kebangsaan yang utuh hanya bisa tercapai dan tumbuh dalam suasana demokratis.

Keempat, Gus Dur adalah penjaga tradisi, di mana menurut pandangannya, agama dan budaya bersifat saling melengkapi. Menurutnya, agama (Islam) dan budaya mempunyai independensi masing-masing, tetapi keduanya mempunyai wilayah tumpang tindih. Manusia tidak bisa beragama tanpa budaya, karena kebudayaan merupakan kreativitas manusia yang bisa menjadi salah satu bentuk ekspresi keberagaman. Tetapi tidak dapat disimpulkan bahwa agama adalah kebudayaan. Di antara keduanya terjadi tumpang tindih dan saling mengisi namun tetap memiliki beberapa perbedaan.

Agama bersumber pada wahyu dan memiliki norma-norma sendiri. Norma-norma agama bersifat normatif, karenanya ia cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya adalah kreativitas

manusia, karenanya ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya. Dengan kata lain, perspektif demikian menempatkan agama dalam fungsinya sebagai wahana pengayoman tradisi bangsa dan pada saat yang sama agama menjadikan kehidupan berbangsa sebagai wahana pematangan dirinya.

Kelima, menurut Gus Dur, Islam akan lebih efektif dan membumi jika berfungsi sebagai etika sosial. Hukum agama, kata Gus Dur, tidak akan kehilangan kebesarannya dengan berfungsi sebagai etika masyarakat. Bahkan kebesarannya akan memancar, karena ia mampu mengembangkan diri tanpa dukungan massif dari institusi negara.

Bagi Gus Dur, beragama Islam yang artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah, adalah tujuan hidup yang luhur. Karenanya haruslah dihindarkan agar Islam tidak diletakkan di bawah wewenang negara, melainkan menjadi kesadaran kuat dari warga masyarakat. Bukankah lalu menjadi sangat dalam maknanya sabda Nabi Muhammad, 'bahwasanya aku diutus hanyalah untuk menyem-

purnakan kemuliaan akhlak.” Kemuliaan akhlak hanya terasa logis untuk disempurnakan, jika upaya itu diartikan sebagai pengembangan kesadaran mendalam akan etika sosial dari suatu masyarakat bangsa.

Kelima gugus besar pemikiran Gus Dur itu menunjukkan bahwa Gus Dur sangat maju dan modern dalam pemikiran dan sikap sosial politiknya. Kebanyakan pemikir Islam bisa menjadi modern dan liberal dalam pemikirannya, tetapi tetap saja konservatif dalam sikap sosialnya. Hal demikian tidak terjadi pada diri Gus Dur. Sikap sosial dan politiknya sejalan dengan pemikirannya yang liberal dan mencerahkan.

Yang juga khas dari Gus Dur adalah pemikirannya bersumber dari nilai-nilai tradisional dalam pandangan hidup pesantren yang diperkaya dengan nilai-nilai dari agama, budaya dan peradaban lain. Keterbukaan sikap dan pemikiran Gus Dur dengan sendirinya merupakan bawaan dari keterbukaan pandangan hidup pesantren dan masyarakat darimana ia berasal.

Itulah kontribusi dan warisan besar Gus Dur untuk bangsa dan dunia ini. Ia telah merintis suatu tata kehidupan masyarakat bangsa yang demokratis

berbasis pandangan keagamaan yang terbuka dan tradisi yang mengikatnya. Suatu sumbangan dan warisan yang sangat berharga bagi bangsa yang majemuk ini dan bagi perdamaian dunia. []

Gus Dur dan Toleransi Plus

Alm. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah tokoh agama dan bangsa yang sangat toleran. Sepanjang hidupnya bisa dikatakan selalu mengajarkan dan menyebarkan nilai-nilai, ajaran dan praktek toleransi. Tidak mengherankan jika Gus Dur diakui sebagai Bapak Toleransi dan Bapak Pluralisme.

Toleransi adalah nilai dan tradisi yang niscaya dalam sebuah masyarakat yang majemuk dan multikultur. Tanpa toleransi, masyarakat akan selalu berada dalam suasana konfliktual yang destruktif, saling bermusuhan, penuh arogansi dan tidak stabil. Toleransilah yang bisa membuat perbedaan menjadi kekuatan, mentransformasikan keragaman menjadi keharmonisan. Toleransi

memungkinkan masyarakat plural bergerak maju secara dinamis dalam situasi sosial yang damai dan stabil.

Toleransi Plus

Toleransi merupakan ajaran semua agama dan budaya, apalagi dalam masyarakat majemuk dan multikultur seperti Indonesia. Namun, toleransi yang diajarkan dan dipraktikkan Gus Dur berbeda dari yang diajarkan dan dipraktikkan tokoh-tokoh agama yang lain. Gus Dur mengajarkan toleransi plus. Kalau kebanyakan orang membudayakan toleransi sebatas pada “hidup berdampingan secara damai” (*peaceful coexistence*), yaitu hidup bersama dalam suasana saling menghormati dan menghargai. Tidak demikian dengan Gus Dur. Cucu Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari ini berpikiran dan bergerak jauh lebih maju. Menurut Gus Dur, tegaknya pluralisme masyarakat bukan hanya terletak pada pola hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*), karena hal demikian masih sangat rentan terhadap munculnya kesalahpahaman antar-kelompok masyarakat yang pada saat tertentu bisa menimbulkan disintegrasi.

Lebih dari itu penghargaan terhadap pluralisme berarti adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang lain bisa saling memberi dan menerima (*take and give*).

Toleransi plus yang diajarkan dan dipraktekkan Gus Dur tidak sekadar menghormati dan menghargai keyakinan atau pendirian orang lain dari agama yang berbeda, tetapi juga disertai kesediaan untuk menerima ajaran-ajaran yang baik dari agama dan peradaban lain itu sendiri. Gus Dur menyatakan bahwa ia akan menerima dan menyampaikan kebenaran yang datang dari manapun, apakah itu datang dari Injil, Bhagawad Gita, atau yang lain (Abdurrahman Wahid, "Intelektual di Tengah Eksklusivisme," *Prisma*, No. 3, Maret 1991).

Kesediaan seperti itu tentu bukan hal yang mudah, apalagi bagi mereka yang beragama secara skriptural dan legal-formalistik. Karena kesediaan untuk menerima kebenaran dari agama lain dengan sendirinya merupakan keyakinan bahwa ada kebenaran di luar agama yang dianut. Level seperti ini tentu sesuatu yang tidak mudah dilampaui,

kecuali bagi mereka yang benar-benar menghayati dan mengamalkan agama secara tulus, rendah hati dan benar-benar pasrah (*hanif*).

Toleransi plus berasal dari pemikiran yang sangat mendalam tentang nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Toleransi plus memungkinkan manusia bisa melihat kebaikan dan kebenaran dari agama atau kelompok berbeda, bukan untuk menihilkan kebenaran agama yang dianutnya sendiri, tetapi justru untuk mematangkan, mendewasakan, memperkaya dan mendinamisasi pemikiran dan perilaku keagamaan sendiri dan masyarakatnya.

Masa Depan Indonesia

Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, terutama dari segi agama dan budaya. Di dalam satu agama sendiri, ada begitu banyak pandangan dan aliran, sehingga sikap-sikap tidak toleran merupakan ancaman bagi agama-agama dan bangsa ini, di masa kini dan masa depan.

Mungkin suatu koinsidensi belaka jika menguatnya demokratisasi, globalisasi dan transformasi masyarakat bangsa saat ini justru

berjalan seiring dengan munculnya kelompok-kelompok keagamaan yang cenderung memahami agama secara kaku, radikal dan menyebarkan sikap-sikap intoleran, merasa benar sendiri. Tetapi itulah kenyataannya. Kekerasan atas nama agama juga cenderung meningkat.

Itulah tantangan besar dalam kehidupan beragama dan berbangsa saat ini. Suatu persoalan yang jika tidak ditangani dengan baik dan sistematis akan membawa bangsa ini mundur dan terpuruk. Berbagai upaya pembangunan di bidang sosial, politik dan ekonomi pun akan terhambat dan kurang maksimal.

Setidaknya ada tiga hal mendasar yang bisa dilakukan sebagai ikhtiar mengurangi berbagai ancaman terhadap kemajemukan bangsa. *Pertama*, penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak kekerasan dan pemaksaan kehendak yang mengatasnamakan agama. Negara tidak boleh lagi membiarkan tindakan-tindakan kekerasan dan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu. Negara harus melindungi hak setiap warganya atau kelompok masyarakat untuk berekspresi,

menyatakan pendapat, berkeyakinan dan menjalankan profesinya.

Kedua, ormas-ormas keagamaan harus didorong untuk mengedepankan dialog dan kerjasama dalam berbagai bidang sosial dan kebudayaan sehingga toleransi bisa ditumbuhkan secara menyeluruh. Semakin tinggi intensitas komunikasi dan kerjasama antarkelompok agama, maka semakin bisa dihindari kesalahpahaman dan dakwah-dakwah keagamaan yang menyebarkan sikap tidak toleran.

Ketiga, nilai-nilai toleransi perlu ditanamkan dan diajarkan sejak dini dan berkelanjutan kepada anak-anak mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Toleransi perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan atau setiap mata pelajaran agama dan budaya, sehingga sikap toleran tertanam kokoh dan menyatu dalam jiwa setiap siswa. Cara penafsiran dan pemahaman tunggal terhadap ajaran agama misalnya, perlu dihindarkan sehingga siswa terbiasa berpikir terbuka dan menghargai perbedaan.

Mata pelajaran agama di sekolah misalnya, tidak cukup hanya berisi tentang tata cara peribadatan

atau pengenalan tentang norma-norma agama. Karena jika aspek tersebut yang ditonjolkan, maka disadari atau tidak siswa telah dididik untuk memahami agama secara kaku dan hitam putih. Sejarah agama dan aspek-aspek ajaran spiritualnya juga perlu dikenalkan secara mendalam. Karena kedua aspek ini bisa mendorong tumbuhnya jiwa sosial dan visi humanistik dari seorang pemeluk agama. Visi demikian dengan sendirinya akan membuat seseorang menjadi lebih terbuka, toleran dan selalu berikhtiar untuk melakukan yang terbaik dan bermanfaat bagi kehidupan.

Gus Dur telah merintis dan mewariskan kepada bangsa ini bagaimana bersikap toleran dan mengintegrasikannya dalam berbagai bidang kehidupan yang nyata. Gus Dur telah menjadi jembatan berbagai kelompok keagamaan dan kebudayaan, sehingga komunikasi dan kerjasama antar-agama dan kelompok budaya selama ini bisa lebih baik dari masa sebelumnya.

Saat ini, ketika banyak paham dan gerakan radikal bermunculan di Indonesia, tantangan untuk melanjutkan perjuangan Gus Dur itu tentu semakin berat. Namun kalau kita semua benar-benar

mencintai agama dan bangsa ini, tentu tantangan itu menjadi bagian dari kehidupan yang memang harus dilewati dan dijalankan sebagai panggilan hidup seorang warga bangsa dan dihayati sebagai kewajiban agama. []

Melanjutkan Perjuangan Gus Dur di Bidang HAM

Alm. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah salah satu tokoh besar bangsa, bahkan dunia, yang pernah dimiliki Indonesia. Salah satu manifestasi kebesarannya terpancar pada pemikiran dan pembelaannya yang total sepanjang hidupnya terhadap hak asasi manusia (HAM). Ia pun diakui sebagai pejuang dan pahlawan HAM.

Perjuangan Gus Dur di bidang HAM bukanlah hal yang ringan. Dalam beberapa hal pemikiran dan pembelaannya terhadap HAM seringkali disalahpahami dan bahkan bertentangan dengan arus utama pemikiran keagamaan legal formalistik. Ia sering dihujat oleh kelompok Islam sendiri yang berpikiran kurang terbuka. Padahal keberhasilan Gus

Dur merumuskan pemikiran agama berperspektif HAM merupakan sumbangan yang sangat besar bagi peradaban manusia modern, khususnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang multikultur.

Agama Berperspektif HAM

Pemikiran Gus Dur harus dilihat sebagai *continuum* dari pemikiran Islam klasik yang sudah dibangun oleh para ulama mazhab terdahulu. Jadi sebenarnya ia bukan sesuatu yang baru sama sekali, hanya ada beberapa modernisasi dan kontekstualisasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman yang terus berubah.

Sebagaimana para pemikir Islam (ulama mazhab) terdahulu, Gus Dur membangun pemikiran keislamannya dengan satu aksioma bahwa agama (Islam) diturunkan ke dunia dimaksudkan untuk memuliakan manusia, mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan di antara mereka, serta memberi kemudahan dalam kehidupannya. Agama hadir bukan untuk memberikan kesulitan, intimidasi, teror, dan berbagai kemadlaratan di muka bumi.

Untuk bisa mewujudkan cita-cita luhur itu, agama memberikan jaminan dasar yang meliputi lima hal. Pertama, jaminan atas keselamatan atau kebebasan bergama dan berkeyakinan (*hifz ad-din*). Kedua, jaminan atas jiwa dan keselamatan fisik (*hifz an-nafs*). Ketiga, jaminan atas keselamatan keluarga dan keturunan (*hifz an-nasl*). Keempat, jaminan atas profesi dan hak milik pribadi (*hifz al-mal*). Dan kelima, jaminan atas keselamatan akal atau kebebasan berpikir dan berekspresi (*hifz al-'aql*).

Ulama terdahulu merumuskan kelima jaminan dasar itu sebagai tujuan syariat (*maqashid as-syari'ah*), di mana segala tindakan yang melindungi kelima hal itu adalah bagian dari ajaran agama yang hakiki, sementara segala tindakan yang mengingkari kelima hal tersebut adalah kemadlaratan yang bertentangan dengan agama. Itulah fondasi agama dalam menata kehidupan masyarakat bangsa yang berperspektif HAM.

Pemikiran Gus Dur di bidang agama dan sosial kemasyarakatan pada umumnya dibangun di atas teori *maqashid as-syari'ah* tersebut. Bagi Gus Dur, agama (Islam) sangat sensitif dan peduli terhadap masalah HAM. Islam sangat menentang tindakan

yang melawan HAM, termasuk tindak kekerasan dan memaksakan kehendak terhadap orang atau kelompok lain.

Dalam rumusan ulama terdahulu, jaminan terhadap keselamatan agama dan keyakinan (*hifz ad-din*) selalu ditempatkan di nomor pertama. Yang menarik, dalam rumusan Gus Dur, jaminan atas jiwa dan keselamatan fisik (*hifz an-nafs*) menempati posisi pertama, sementara jaminan keselamatan agama di posisi kedua.

Dengan rumusan tersebut, menurut hemat saya Gus Dur tidak bermaksud menyatakan bahwa perlindungan terhadap keselamatan fisik lebih penting dari keselamatan yang lain. Seperti halnya ulama terdahulu, Gus Dur tetap menempatkan kelima jaminan dasar itu dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Namun karena pada saat merumuskan pemikirannya, yaitu pada masa Orde Baru, Gus Dur memandang bahwa ancaman terhadap keselamatan fisik sangat terasa, maka ia pun menempatkan perlindungan terhadap keselamatan fisik sebagai tujuan syariat yang pertama. Jadi pemikiran kreatif Gus Dur tersebut sebenarnya merupakan kontekstualisasi semata.

Kontekstualisasi

Di masa kini, ancaman terhadap kelima hak dasar manusia itu tentu telah mengalami beberapa perubahan bentuk daripada yang terjadi pada masa awal Gus Dur merumuskan pemikirannya dan masa-masa ulama terdahulu. Karena itu, dibutuhkan pemikiran-pemikiran keagamaan kreatif yang mampu melakukan berbagai terobosan sehingga kontekstualisasi pemikiran keagamaan di masa kini tetap berjalan dan menghasilkan rumusan pemikiran keagamaan berperspektif HAM yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kehidupan masa kini dan masa depan.

Sebagai contoh, kalau di masa lalu ancaman terhadap keselamatan fisik warga negara lebih banyak datang dari negara yang represif, maka saat ini ancaman negara hampir tidak terlihat lagi. Ancaman terhadap keselamatan fisik justru datang dari kelompok-kelompok tertentu yang suka menggunakan cara-cara kekerasan di luar hukum, intimidasi, teror dan pemaksaan kehendak. Demikian juga ancaman terhadap berbagai keselamatan dasar warga negara yang lain.

Kontekstualisasi pemikiran keagamaan, dengan demikian, merupakan suatu kebutuhan mendasar saat ini, agar agama tetap memberi kontribusi nyata dalam kehidupan masyarakat bangsa. Sebab tanpa kontribusi agama, kehidupan bangsa akan terus mengalami degradasi dalam berbagai bidang yang akan membawanya – cepat atau lambat – menuju kegagalan dan proses penghancuran dari dalam.

Kontekstualisasi itu sendiri hanya akan menghasilkan sesuatu yang produktif dan positif jika para ulama dan para pemikir Islam mampu melakukannya secara komprehensif dengan memahami secara mendalam relasi-relasi struktural yang ada, sehingga setiap persoalan tidak hanya dilihat kasus per kasus atau sebatas fakta yang terlihat di permukaan, tetapi juga struktur yang bergerak di balik fakta itu sendiri.

Kalau hal itu bisa dilakukan secara kolektif sudah barang tentu pemikiran agama dan kehidupan beragama di Indonesia akan semakin maju dan kreatif, ada proses dinamisasi dan kontekstualisasi yang tiada henti. Pada saat yang sama kehidupan bangsa yang multikultur ini akan semakin matang dan dewasa karena kontekstualisasi juga merupakan

pengkayaan dan pematangan pemikiran dan sikap keberagamaan masyarakat.

Kontekstualisasi pemikiran agama dari perspektif HAM sebenarnya merupakan kerja sosial yang sangat kompleks, karena HAM sangat luas cakupannya. Di dalamnya termasuk kontekstualisasi agama dari perspektif gender atau perspektif umat/masyarakat misalnya. Perspektif umat/masyarakat perlu dikembangkan karena selama ini pemikiran agama terlalu didominasi dan dimonopoli oleh pemikiran dari perspektif elit agama itu sendiri. Sehingga pemikiran agama seringkali tidak *nyambung* atau irrelevan dengan aspirasi dan kebutuhan umat. Mengenalkan perspektif umat dalam pemikiran agama dengan sendirinya merupakan upaya membangun pemikiran yang lebih realistik dan membumi. Realistik tidak berarti oportunistik, tetapi justru menjadikan pemikiran agama sebagai refleksi kehidupan sehari-hari, sehingga agama bisa mewarnai kehidupan masyarakat dan pada saat yang sama masyarakat tetap menjadikan agama sebagai payung dan pegangan kehidupannya.

Gus Dur dengan tantangan yang tidak ringan telah merintis pemikiran keagamaan berperspektif HAM. Dan tugas kita semua untuk meneruskan dan mengembangkannya, bukan karena kita fanatik buta terhadap Gus Dur, tetapi justru karena kita mencintai agama dan bangsa ini. []

Gus Dur dan Internasionalisasi Peran Ulama

Garansi Demokrasi dan Pluralisme

Terpilihnya KH Abdurrahman Wahid sebagai presiden ke-4 Republik Indonesia pada 20 Oktober 1999 sangat mengejutkan banyak kalangan baik di dalam maupun luar negeri. Seperti dilaporkan *BBC News*, Rabu 20 Oktober 1999, *the election of the influential Muslim cleric came as a shock to many after Megawati Sukarnoputri's PDI-P party had emerged as the winner of Indonesia's elections in June*. Majalah *The Economist* di cover depannya juga menulis: Astaga, Gus Dur yang Terpilih: Presiden Baru Indonesia yang Mengejutkan!

Dunia sungguh tidak menyangka dan sangat terkejut, sebagaimana mereka terkejut atas

kemenangan Revolusi Islam di Iran pada tahun 1979. Namun, kalau keterkejutan atas Revolusi Islam di Iran disertai kecemasan yang sangat kuat terhadap radikalisme Islam, keterkejutan dunia internasional atas terpilihnya Gus Dur sama sekali tidak disertai ketakutan akan menguatnya Islam radikal di Indonesia – karena Gus Dur sangat menentang fundamentalisme Islam – tetapi justru keterkejutan yang disertai keheranan. Mereka heran, *kok* bisa seorang kiai – yang dalam banyak literatur Barat dianggap *kolot* dan kaku – terpilih menjadi seorang presiden?

Diakui oleh majalah *Time* (21 Oktober 1999), Gus Dur memang sering membuat manuver dan keputusan yang sulit ditebak (*unpredictable moves and decisions*). Langkah-langkah dan keputusan politiknya sulit diprediksi, bahkan bagi warga Nahdlatul Ulama dan orang-orang dekatnya sendiri. Meski demikian, orang dekat, masyarakat luas dan dunia internasional sedikit pun tidak pernah merasa cemas dengan Gus Dur karena ia dikenal dan diakui secara luas sebagai orang yang tidak diragukan komitmennya kepada demokrasi, HAM dan pluralisme. Artinya, bagi banyak orang, terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden menjadi jaminan bahwa

proses demokratisasi dan penegakkan HAM akan lebih baik. Gus Dur juga menjadi garansi atas tegaknya nilai-nilai pluralisme dan toleransi karena pembelaannya pada pandangan nasional (*national view*) dan keyakinan keagamaannya yang kuat atas universalisme dan inklusivisme Islam.

Pengaruh besar Gus Dur dalam proses demokratisasi di Indonesia telah diakui secara luas. Pada 31 Agustus 1993, ia menerima penghargaan *Ramon Magsaysay*, “Nobel Asia” dari pemerintah Filipina. Penghargaan diberikan karena Gus Dur dinilai mempunyai komitmen dan peran yang sangat penting terhadap demokrasi, penegakan HAM dan toleransi beragama di Indonesia.

Kecintaan Gus Dur yang mendalam atas nilai-nilai universal Islam dan pandangan tradisi pesantren membuatnya tidak pernah kehabisan energi untuk memperjuangkan kehadiran Islam di Indonesia sebagai etika sosial (*social ethics*) yang akan mengukuhkan proses demokratisasi dan wajah negara bangsa yang multikultural. Ia tidak ingin pujian, juga tidak takut dengan cacian. Yang dijalankan hanyalah panggilan hidup untuk sebuah perjuangan panjang sebagaimana dicontohkan oleh

para pejuang Republik dan juga kiai-kiai pendiri Nahdlatul Ulama di masa awal.

Gus Dur sepanjang perjalanan hidupnya selama ini adalah sosok pemikir dan aktivis sosial-keagamaan yang gigih membela nilai-nilai keislaman universal, pandangan hidup kiai dan fakta kemajemukan Indonesia sebagai negara nasional (*national state*). Ketika muncul kecenderungan untuk menjadikan agama dalam posisi suplementer atau agama sekadar menjadi alat legitimasi terhadap pembangunan atau menjadikannya sebagai ideologi alternatif, Gus Dur mengemukakan gagasannya tentang agama sebagai faktor komplementer dalam kehidupan. Baik sebagai faktor suplementer maupun ideologi alternatif, menurut Gus Dur, agama hanya akan dimanipulasi untuk kepentingan golongan yang bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri.

Begitu juga ketika muncul gejala yang meremehkan dan meminggirkan kiai-kiai pesantren, lewat tulisan-tulisannya Gus Dur memaparkan rasionalitas, dinamisme dan potensi untuk beradaptasi yang dimiliki kaum kiai, sehingga faktor kiai tidak bisa diabaikan dalam seluruh proses perubahan sosial di tengah masyarakat.

Sebagai manifestasi dari komitmen atas itu semua, ketika menjadi presiden Gus Dur memelopori penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dengan mengeluarkan Inpres No 6/2000 tanggal 17 Januari 2000, mencabut Inpres 14/1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Gus Dur juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 38/2000 yang mencabut Keppres NO. 29/1998 tentang Bakorstanas dan Keppres No. 16/1990 tentang Litsus. Kedua lembaga ini dinilainya lebih banyak menimbulkan keruwetan daripada kemanfaatan dan secara jelas merugikan nilai-nilai hak asasi manusia (Lihat A Muhaimin Iskandar, *Gus Dur yang Saya Kenal: Catatan Transisi Demokrasi Kita*, 2004: 42-43).

Gus Dur bukan saja bisa disebut sebagai pembela negara bangsa dan kepentingan minoritas karena kecintaannya yang dalam terhadap nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan universal, tetapi juga diakui sebagai “penyelamat” tradisi pesantren dan wibawa kiai karena kecintaannya yang juga sangat dalam terhadap Islam tradisional. Kecintaannya kepada agama melahirkan kecintaan yang sama kepada sesama.

Pandangan Hidup Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang sampai sekarang masih menjadi pusat belajar agama dan pendidikan para calon pemimpin agama Islam. Sebagai lembaga pendidikan tertua yang masih eksis sampai saat ini, pesantren secara nyata telah menunjukkan daya tahannya terhadap berbagai tantangan kehidupan dan sekaligus watak dinamisnya dalam menyediakan perangkat keilmuan dan sikap hidup yang fleksibel, terbuka dan adaptif bagi santri dan masyarakat sekitarnya.

Daya tahan dan daya gerak tersebut menjadi sesuatu yang melekat pada dunia pesantren karena beberapa faktor. *Pertama*, pesantren adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan Islam secara komprehensif (*kaffah*). Pesantren tidak hanya mengajarkan tauhid, tetapi juga fiqih/syariat dan tasawuf. Tradisi keilmuan pesantren hampir tidak pernah menafsirkan ayat atau Hadis secara sepotong atau parsial, tetapi dengan kajian tafsir yang dilengkapi dengan berbagai alat kelengkapan bahasa Arab seperti *nahwu*, *saraf*, *balaghah* dan yang lain. Ayat al-Quran atau teks Hadis juga selalu dipahami dalam konteks keseja-rahan yang

dipadukan dengan pendekatan fiqh secara utuh dalam kerangka pemikiran mazhab.

Pemahaman ajaran Islam secara sepotong hanya akan melahirkan proses pendangkalan pemikiran keagamaan yang pada gilirannya nanti menjadi bibit bagi radikalisme dan fundamentalisme. Dengan tradisi pemikiran dan pengambilan keputusan hukum yang menyeluruh dan kontekstual, pesantren tidak akan pernah melahirkan pemikiran dan sikap keagamaan yang radikal dan hitam putih. Dengan kata lain, tidak mungkin terorisme lahir dan tumbuh dalam lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama.

Kedua, pesantren mempunyai tradisi mengambil jalan tengah jika ada pertentangan sikap dan pemikiran. Tradisi berpikir dalam kerangka mazhab (*mazhabiy*) menyediakan ruang yang sangat luas dan terbuka untuk memikirkan berbagai kemungkinan dilihat dari sudut pandang keilmuan dan juga kepentingan kemanusiaan (*maslahah al-'ammah*). Karena agama diturunkan untuk kepentingan dan kemudahan hidup manusia, maka tradisi pesantren selalu diorientasikan kepada bagaimana menjadikan syariat sebagai jalan untuk mewujudkan permasalahan sebaik-baiknya, bukan untuk menjadikan

agama sebagai alat untuk melindungi kepentingan kelompok atau menjaga klaim-klaim kebenaran yang tiada ujung pangkalnya. Karena orientasi kemaslahatan yang menjadi tujuan bermazhab, maka pemikiran dan pandangan hidup pesantren selalu terhindar dari ekstrimitas, karena jalan tengah adalah bagian integral dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum dan sekaligus menjaga kemuliaan nilai-nilai Islam itu sendiri.

Ketiga, pesantren adalah lembaga pendidikan yang menyatu dengan masyarakat. Kedekatan dan integrasinya dengan realitas kehidupan di sekitarnya menjadikan pesantren memiliki tradisi pemikiran dan sikap hidup yang realistik dalam arti selalu menjadikan realitas sebagai bahan pertimbangan dalam pemikiran dan pengambilan keputusan mengenai hukum agama.

Tradisi pesantren juga bersifat *ngemong* atau mengayomi budaya masyarakat sehingga nilai-nilai baru yang diterima masyarakat bisa dijinakkan. Pada saat yang sama, pesantren juga menginternalisasikan budaya masyarakat sebagai salah satu sumber pengambilan keputusan hukum (*al-'adah al-muhakkamah*). Dengan proses dialektik yang demikian, tradisi pesantren memiliki keluwesan dan

kelenturan sehingga mengakar secara kuat dalam kesadaran kolektif dan menjadi landasan bagi eksistensinya di tengah kehidupan masyarakat di berbagai tempat dan waktu.

Keempat, pesantren adalah lembaga pendidikan yang dekat dengan rakyat dengan watak egalitarianisme yang kental. Ketika terjadi polemik kebudayaan pada pertengahan 1930-an, Dr Sutomo menyatakan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang populis dan egaliter, karena pesantren bisa mempersatukan santri muda dan dewasa, mempertemukan anak-anak dari segala lapisan masyarakat, anak orang tani, anak saudagar, anak bangsawan bisa berkumpul dalam satu kamar dan pondok. Pesantren juga bisa menyatu dengan masyarakat, misalnya dalam hal gotong-royong, menggarap sawah atau ladang, tradisi selamatan, dsb. Sementara pendidikan model Barat seperti HIS (*Hollandsche Inlandsche Scholen*) dan ELS (*Europeesche Lagere Scholen*), menurut Sutomo, cenderung membuat siswa atau alumninya menjadi sombong karena merasa lebih tinggi derajat dan kualitasnya dari anak-anak lainnya (Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, Djakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1950).

Sampai saat ini, pesantren-pesantren yang mempertahankan corak salafiyahnya juga tetap menyatu dengan masyarakat sekitar. Tidak ada tembok tinggi yang menjadi sekat antara lingkungan pesantren dengan masyarakat, sehingga relasi dan komunikasi antara keduanya berjalan baik. Masyarakat bisa ikut belajar agama atau bentuk-bentuk ketrampilan lain di pesantren, sementara santri bisa bekerja di sawah atau ladang milik masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Santri juga sering diminta untuk memberi ceramah agama atau ikut dalam upacara-upacara keagamaan masyarakat, sehingga keduanya hidup dalam kebersamaan, saling melengkapi dan dengan sendirinya saling menguatkan. Tidak ada dominasi atau hegemoni, karena keduanya bisa dikatakan berdiri sejajar dan masing-masing memiliki kontribusi yang khas dalam rangka menopang proses bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Kelima, pada masa-masa awal pendiriannya, pesantren mempunyai misi yang transformatif, yaitu mengubah struktur dan kultur masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Pada masa dahulu, kiai-kiai mendirikan pesantren biasanya di daerah

yang rawan atau biasa disebut daerah hitam. Tujuannya adalah mengubah tata nilai dan struktur masyarakat yang tidak adil dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa kiai-kiai terdahulu mendirikan pesantren bukan untuk unjuk kekuatan, kemewahan bangunan, kepintaran ilmu atau kesaktian dalam olah kanuragan, tetapi benar-benar dimaksudkan untuk mengubah sendi-sendi dasar kehidupan sosial masyarakat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang datang mengubah tata nilai dan struktur masyarakat Arab, kiai-kiai juga melakukan hal yang sama terhadap masyarakatnya. Dalam pandangan kiai, salah satu fungsi agama dalam kehidupan adalah fungsi transformatif yaitu mengubah masyarakat secara fundamental tanpa harus menghancurkan nilai-nilai dari kebudayaan atau kepercayaan yang ada.

Internasionalisasi Peran Ulama

Selama kurang lebih dua dasawarsa sejak awal 1980-an, Gus Dur berhasil meletakkan landasan yang kokoh bagi tiga hal berikut yang juga menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan masyarakat:

(1) Proses transisi kepemimpinan dari 'kaum tua' ke 'kaum muda' di internal masyarakat NU. Sejak Gus Dur memimpin PBNU pada tahun 1984 setelah kiai-kiai kurang nyaman NU dipimpin oleh Dr Idham Chalid, politisi lulusan Pesantren Gontor Ponorogo, dinamika pemikiran dan regenerasi kepemimpinan di dalam masyarakat NU berjalan sangat dinamis. Lima belas tahun sejak kepemimpinan Gus Dur di NU, muncul politisi-politisi belia NU, kaum intelektual dan juga kiai-kiai muda yang progresif.

Yang tidak kalah pentingnya adalah lima belas tahun waktu yang dibutuhkan oleh Gus Dur sejak memimpin PBNU untuk menjadi presiden (1984-1999), yang diikuti oleh persebaran tokoh-tokoh muda NU di eksekutif dan lembaga legislatif di berbagai tingkatan.

Jelaslah di sini bahwa Gus Dur adalah sebuah lokomotif yang membawa ratusan gerbong di belakangnya dengan berbagai keahlian dan kepedulian. Ada juga beberapa gerbong yang keluar dari relnya, tetapi hal tersebut sama sekali tidak mengurangi nilai keberhasilan Gus Dur dalam mengubah wajah dan bobot masyarakat NU.

(2) Proses integrasi PKB sebagai sayap politik NU. Secara historis, kultural dan aspiratif, PKB adalah satu-satunya sayap politik NU karena kelahiran partai ini pada 23 Juli 1998 secara resmi difasilitasi oleh Pengurus Besar Nahdaltul Ulama (PBNU) dan kiai-kiai.

Saya yang menjadi anggota Tim Asistensi Pendirian PKB yang dibentuk PBNU pada tahun 1998 merasakan betul bahwa kiai-kiai dan warga NU menghendaki adanya partai politik yang akan menjadi payung politik kaum Nahdliyyin dan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat luas dari berbagai ancaman. Latar belakang demikian menunjukkan bahwa politik PKB terintegrasi secara historis, aspiratif dan kultural dengan Nahdlatul Ulama. Demikian juga sebaliknya, aktivitas sosial-keagamaan NU terintegrasi secara aspiratif dan kultural dengan PKB.

(3) Internasionalisasi peran ulama sebagai juru bicara dunia Islam, yang salah satunya direpresentasikan dengan mengagumkan oleh Gus Dur sendiri. Internasionalisasi peran kiai memungkinkan pemimpin umat ini terus mengembangkan diri dengan berbagai pemikiran dan tantangan yang

lebih global, sehingga keterbukaan dan keluasan pandangan bisa terus dirawat.

Peran-peran yang mendunia juga pernah dimainkan para kiai misalnya lewat Komite Hijaz pada waktu NU akan didirikan pada pertengahan tahun 1920-an, juga pada kepedulian kiai terhadap masalah Palestina dan Timur Tengah pada umumnya di masa lampau.

Setelah cukup lama peran-peran di dunia internasional itu menurun, Gus Dur kemudian tampil sebagai pemimpin NU yang diakui secara internasional. Hubungannya dengan para kepala negara atau pemerintahan asing, NGO internasional atau tokoh-tokoh agama dan politik dunia, membuatnya bisa memainkan peran yang lebih strategis dalam pergaulan internasional, sekaligus membawa perubahan penting terhadap NU di mata dunia.

Sebagai contoh, seperti di-*taushiyah*-kan (rekomendasi) oleh Halaqah Politik Walisongo yang diselenggarakan DPP PKB pada 3 Desember 2005 di Surabaya, keluarnya Israel dari Jalur Gaza pada tahun 2005, merupakan buah dari solusi damai yang diperjuangkan Gus Dur secara konsisten dalam menyelesaikan masalah konflik Palestina-Israel, dan konflik di Timur Tengah pada umumnya.

NU memang sangat membutuhkan figur seperti Gus Dur. Yaitu figur yang lahir dari tradisi NU sendiri dan mampu menjadi juru bicara NU di forum-forum internasional dan mengambil peran diplomasi budaya dalam pergaulan antar-bangsa. Cara berpikir NU yang terbuka dan tradisinya yang kokoh sebenarnya bisa menjadi penunjang atau nilai lebih bagi lahirnya figur yang mendunia.

Dengan figur seperti itu -- seperti pernah dimainkan Gus Dur -- NU bisa terus mendorong dinamisasi internal karena sentuhan dengan dunia luar akan menjadi lebih intens. Pada saat yang sama, NU bisa mengembangkan diri secara massif karena jika peran internasionalnya menonjol, maka konflik internal yang bersifat destruktif bisa diminimalisasi atau dipindah ruangnya.

Di kemudian hari hubungan Gus Dur dengan beberapa kiai yang dulu dibela dan berjuang bersamanya dianggap banyak kalangan sedang dalam suasana sedikit renggang, paling tidak seperti yang tampak di permukaan. Namun, kecintaan Gus Dur yang sangat total terhadap kiai yang dikombinasikan dengan karakteristik watak kiai NU dengan rasionalitasnya sendiri, kita semua yakin bahwa yang terjadi merupakan bagian dari proses

pendewasaan wawasan politik dalam kerangka pengembangan ajaran *Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah*. Hanya Allah SWT Sang Pemberi Petunjuk kepada jalan yang lurus dan benar. Dan, politik serta spiritualitas PKB adalah membela yang benar. []

Gus Dur, Guru Sumber Inspirasi dan Yang Membesarkan

Bagi Robinho, striker timnas Brasil yang bermain di Real Madrid (2006), Pele adalah gurunya. Nasihatnya selalu didengar dan ditanam kuat dalam hatinya. “Pele selalu bilang, saya harus menghormati orang tua, dan harus selalu rendah hati,” kata Robinho suatu ketika.

Robinho tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas tentang Pele. Sebagai bentuk rasa hormat kepada gurunya itu, ia bahkan tidak mau dibanding-bandingkan dengan Pele. “Saya sering dibandingkan dengan Pele dengan pelbagai cara. Sangat menyenangkan di beberapa hal sebab saya tahu orang memperhatikan saya. Namun, saya tak

mau mereka berharap saya menjadi Pele. Ia tak bisa dibandingkan dengan siapa pun. Saya hanya bermimpi bisa sesukses dia,” tegasnya.

Hampir sama seperti Robinho, striker Spanyol Raul Gonzalez menganggap Fernando Hierro sebagai sahabat sekaligus gurunya. Ketika Hierro pensiun dari Real Madrid, Raul ditunjuk menggantikan gurunya sebagai kapten tim *El Real* itu.

“*We have to think in the present but we must never forget what Hierro did for this club,*” katanya. Raul merasa sangat bangga karena telah mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan tugas dari orang yang telah mengajarkannya banyak hal.

Banyak kiai pesantren yang menggunakan literatur-literatur keislaman klasik menekankan pentingnya kepatuhan murid kepada gurunya. Dalam tradisi *thariqah* misalnya, murid hanya akan mendapat *barakah* gurunya jika ia tunduk sepenuh hati kepadanya. Demikian penting makna seorang guru, sehingga tidak diperkenankan kita menyebut guru sebagai “bekas guru”, walaupun kita sudah tidak berguru lagi kepadanya.

Bahkan ulama-ulama pesantren terdahulu menyatakan bahwa kekufuran terjadi bukan karena seseorang melakukan pelanggaran hukum atau

ma'siat, tetapi karena ia tidak lagi menghormati guru yang telah mendidik dan membesarkannya (*annal insana la yakfuru bil-ma'shiyat, wa innama yakfuru bi tarkil hurmah*).

Sebagian ulama menyatakan bahwa kedudukan guru lebih utama dari orang tua. Dikatakan bahwa “orang tuamu ada tiga macam: orang tua kandung, orang tua yang mengawinkan anak gadisnya yaitu mertua, dan orang tua yang paling utama adalah orang yang mengajarmu” (*aba-uka tsalatsatun, abuka al-ladzi waladaka, wal-ladzi zawwajaka ib-natahu, wal-ladzi 'allamaka wahuwa afdluluhum*).

Sebagaimana kita tahu, agama mengajarkan bahwa seorang anak sama sekali tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata yang kurang menyenangkan kepada orang tuanya. Hal demikian tentunya juga berlaku kepada guru. Lebih tidak diperkenankan lagi melakukan tindakan yang melawan gurunya.

Alkisah seorang santri di sebuah desa di Jawa pernah berbeda pendapat dengan kiainya. Karena terbawa emosi, santri itu kemudian mengajak teman-temannya untuk demonstrasi di pesantren tempat ia belajar, melawan gurunya. Mungkin juga karena emosi, sang kiai kemudian mengeluarkan

sumpahnyanya: “kamu tidak akan bahagia dalam hidup ini”. Masyarakat desa tempat si santri itu tinggal, ikut menyaksikan bahwa kata-kata sang kiai menjadi kenyataan. Si santri sudah berganti-ganti jenis usaha, mulai dari jual ayam, berdagang kerupuk dan usaha kecil-kecilan yang lain. Tapi selalu gagal.

Dalam politik, banyak politisi lahir dari tangan dingin atau bimbingan gurunya. Kelompok yang kemudian dikenal sebagai “Mafia Berkeley” juga dibesarkan oleh guru-gurunya yang bekerja untuk lembaga-lembaga keuangan internasional. Mulai M Sadli, Ali Wardana sampai Sri Mulyani dan calon penerusnya seperti M Chatib Basri dan M Ikhsan, mereka semua termasuk murid yang patuh pada guru. Karena itu mereka tampaknya juga tidak pernah melawan kebijakan IMF dan Bank Dunia di Indonesia.

Gus Dur juga juga melahirkan banyak politisi ternama. Alwi Shihab yang semula hanya seorang tokoh biasa, diangkat jadi Menteri Luar Negeri. Mahfudh MD semula hanya seorang dosen UII, diangkat sebagai Menteri Pertahanan. AS Hikam seorang pengamat politik LIPI, diangkat jadi Menristek. Khofifah Indar Parawansa diangkat jadi

Meneg Pemberdayaan Perempuan. Dan masih banyak lagi orang-orang yang menjadi tokoh besar karena dibesarkan Gus Dur.

Namun, sebagai seorang demokrat, Gus Dur membiarkan anak didiknya berdiaspora dan berbeda pendapat dengannya. Ketika menjadi Presiden, Gus Dur juga membiarkan orang-orang Aceh atau Papua berpendapat tentang kemerdekaan wilayahnya. Tapi Gus Dur sama sekali tidak memberikan toleransi jika orang-orang tersebut sudah membuat gerakan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Dalam tradisi NU, separatisme hanya diizinkan dalam pikiran, tidak dalam tindakan atau gerakan.

Saya tidak tahu pasti apakah Gus Dur tetap mentoleransi anak-anak didiknya yang kemudian banyak membuat gerakan melawan dirinya. Seharusnya kita bisa belajar kepada para ulama besar dan pemain-pemain bola legendaris, termasuk kepada para ekonom kita, bagaimana seharusnya kita bersikap dengan guru yang menjadi sumber inspirasi dan membesarkan kita.

Karena hormat kepada guru bukan sekadar dari pribadi yang bijak dan punya integritas, tetapi juga

menjadi sarana bagi keberlangsungan tradisi-tradisi besar suatu bangsa. Suatu proses yang memungkinkan terjadinya akumulasi pengetahuan dan kebudayaan, yang merupakan prasyarat utama untuk menjadi bangsa yang besar, maju dan mandiri. []

“Cattenacio” Gus Dur, Islam dan NKRI

Semasa muda, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah sosok yang sangat gemar bermain bola. Pada era 1990-an, Gus Dur dikenal sebagai pengamat bola, bahkan pernah menjadi komentator Piala Dunia 1990 di Italia yang ditayangkan secara langsung oleh TVRI.

Dalam kehidupan sehari-hari, Gus Dur juga terus memainkan “bola-bola politik”. Sejak terjun di tengah gelanggang politik nasional pada awal 1980-an, politik Gus Dur pada intinya ingin memperjuangkan beberapa hal mendasar yang akan menjadi landasan kokoh bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di masa mendatang.

Pertama, agama merupakan faktor penting yang mendorong perubahan masyarakat. Gus Dur dengan tegas membantah anggapan para ilmuwan/teknokrat bahwa agama merupakan unsur yang paling sukar dan paling lambat berubah. Bagi Gus Dur, kelompok yang paling cepat mengikuti perkembangan keadaan adalah pemuka-pemuka agama (*religious elites*), termasuk para kiai.

Kedua, menurut Gus Dur, dalam sebuah masyarakat yang sangat pluralistik seperti Indonesia, pandangan yang harus dikembangkan dan dijaga terus-menerus adalah pandangan nasional (*national view*), bukan pandangan yang sempit, termasuk pandangan Islam (*Islamic view*). Karena itu, negara Indonesia yang dicita-citakan – seperti ditulis Douglas E Ramage (1995) – adalah negara yang kecil pengaruh militernya dan tidak ada fundamentalisme Islam.

Dalam pandangan Gus Dur, Islam tidak akan kehilangan kebesarannya dengan berfungsi sebagai etika masyarakat. Bahkan kebesarannya akan memancar, karena mampu mengembangkan diri tanpa dukungan massif dari negara. Beragama Islam yang artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah, adalah tujuan hidup yang luhur.

Karenanya haruslah dihindarkan agar Islam tidak diletakkan di bawah wewenang negara, melainkan menjadi kesadaran kuat dari warga masyarakat. Bukankah lalu menjadi sangat dalam makna sabda Nabi Muhammad: “*innama bu’itstu liutamimma makarimal akhlaq*” (bahwasanya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak). Kemuliaan akhlak hanyalah terasa logis untuk disempurnakan, jika upaya itu diartikan sebagai pengembangan kesadaran mendalam akan etika sosial dari suatu masyarakat bangsa.

Ketiga, seperti ditulisnya dalam buku *Ethical Dilemmas of Development in Asia* (1983), Gus Dur meyakini bahwa khazanah pemikiran klasik (*the legacy of the past*) yang menjadi rujukan pesantren tidak hanya memberikan spirit pada pola hidup egalitarian dan pembangunan masyarakat yang toleran dan berkeadilan, tetapi juga bisa digunakan untuk menemukan kembali esensi pengalaman keberagaman secara total yang melintasi batas kerangka legal-formalistik dan pendekatan monokultural terhadap realitas. Dengan perkataan lain, tradisi masa lalu tidak bisa ditinggalkan untuk menjadikan umat Islam lebih maju dan dewasa.

Keempat, dalam pandangan Gus Dur, demokrasi sedemikian penting dalam sebuah negara pluralistik, karena perikehidupan kebangsaan yang utuh hanya bisa tercapai dan tumbuh dalam suasana demokratis. Gus Dur menyatakan bahwa demokrasi (1) merupakan sistem dan nilai yang mendukung peradaban tinggi, karena ia mementingkan dan melindungi hak-hak dasar manusia atas kehidupan, (2) melindungi mereka yang minoritas dan berpendapat berbeda dari kelompok mayoritas, (3) mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa, dan (4) mengubah keterceraiberaian arah masing-masing kelompok menjadi berputar bersama menuju kedewasaan, kemajuan dan integritas bangsa.

Dalam beberapa hal, sepak bola politik Gus Dur bergaya *cattencio* ala kesebelasan Italia, yaitu membangun dan meletakkan titik-titik pertahanan untuk mempertahankan NKRI sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa (*the founding fathers*) dan menjamin kelangsungan hidup kolektifnya di masa depan.

Kritik Gus Dur terhadap kinerja pemerintahan selama ini juga dalam rangka mempertahankan Republik ini dari degradasi dan disorientasi yang

lebih parah. Kalau apa yang disampaikan Gus Dur itu dinilai sebagai indikasi makar, maka orang yang menyatakan demikian pasti tidak memahami pemikiran Gus Dur.

Titik pertahanan suatu bangsa sesungguhnya merupakan keniscayaan bagi bangsa itu sendiri. Pertama, titik pertahanan yang kokoh memungkinkan suatu bangsa tetap eksis di tengah gempuran badai perubahan. Jika angin perubahan bergerak sangat dahsyat, maka jika sampai terjadi kerusakan, yang rusak hanya sebatas atap atau terasnya, tidak sampai merobohkan tiang-tiangnya, apalagi fondasinya.

Kedua, titik pertahanan yang kokoh memungkinkan suatu bangsa memilih posisi dalam sikap terbuka untuk menerima dan menyerap nilai-nilai yang datang dari luar, untuk kemudian menyeleksi dan mengawinkannya dengan nilai-nilai di dalam menjadi tata nilai baru yang unggul. Dengan titik pertahanan yang kokoh, masuknya nilai-nilai baru tidak akan sampai menyingkirkan nilai-nilai lokal yang sudah mengakar, tetapi justru memperkaya.

Ketiga, dengan titik pertahanan yang kokoh, suatu bangsa bisa melakukan lompatan ke depan

untuk menjadi bangsa yang maju. Hal demikian dimungkinkan karena pada dasarnya pertahanan yang kokoh dengan sendirinya melahirkan serangan atau lompatan yang kokoh pula, sebagaimana di dunia sepak bola.

Dan begitulah Gus Dur telah memulai dan mengembangkannya.[]

Gus Dur, PKB, dan Kebangkitan Indonesia

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan partai politik yang lahir bersama-sama partai lain pasca-Orde Baru. Namun dibandingkan dengan partai politik lain yang lahir di era reformasi, PKB bisa dikatakan sebagai fenomena yang tersendiri.

Kesimpulan itu bukan sesuatu yang mengada-ada karena dua alasan faktual. *Pertama*, sebagai pendatang baru, PKB bisa langsung masuk dalam tiga besar perolehan suara pada Pemilu 1999. Posisi ketiga kembali bisa dipertahankan pada Pemilu 2004. PKB mampu mengalahkan partai-partai lain yang disebut-sebut lebih “modern” dan “profesional”.

Kedua, sejak berdiri sampai saat ini, PKB merupakan partai politik yang paling dinamis. Konflik-konflik internal, dualisme kepengurusan, dan berbagai bentuk “intervensi” dari luar mewarnai perjalanan PKB secara nyata. Suatu fakta politik yang tidak dialami oleh partai-partai lain. Namun, berbagai persoalan itu bisa diatasi dengan baik sehingga dinamisasi kehidupan partai menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan PKB selama lebih dari satu dekade. Pada saat yang sama, kematangan dan kebijaksanaan politik para pengurus dan kader-kader PKB juga semakin terasah dan terkonsolidasi dengan baik.

Dengan fakta seperti itu, para pemimpin dan kader PKB selalu memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan optimisme yang kuat untuk bisa membuat PKB sebagai partai besar dan berpengaruh di masa depan, baik dalam hubungan antar-partai politik, hubungan dengan negara, maupun hubungan dengan dunia internasional dalam arti luas.

”Social capital”

Kapasitas pengetahuan dan kelembagaan luar biasa yang dimiliki PKB itu – yang membuatnya mampu mengembangkan diri justeru dalam suasana

konflikual dan mengkonsolidasikan pengetahuan kolektif di tengah gelombang konsumerisme massa – tentu tidak terlepas dari modal sosial-kultural yang dimiliki oleh partai yang didirikan pada 23 Juli 1998 ini.

Pertama, PKB adalah satu-satunya partai politik yang secara tegas memproklamasikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah sudah final. Preferensi ini tentu berbeda dengan partai-partai Islam yang terus memperjuangkan formalisasi syariah dalam undang-undang negara, atau partai-partai sosialis yang menghendaki Indonesia sebagai negara federal.

Dengan keputusan politik fundamental itu, PKB bisa fokus dalam upaya-upaya politik yang lebih kongkrit menyangkut penyadaran, pendidikan dan pengembangan masyarakat menuju kemakmuran dan keadilan yang lebih nyata. Sementara upaya politik untuk kembali memperjuangkan negara Islam, formalisasi syariat atau memasukkan Piagam Jakarta ke dalam Pembukaan UUD 1945, bukan hanya mengancam disintegrasi bangsa, tetapi juga membawa bangsa berjalan mundur.

Keputusan PKB tentang status NKRI berikut dasar negaranya itu mempunyai rujukan sejarah yang kuat dan landasan hukum agama (fiqih) yang kokoh. Karena keputusan itu mengacu kepada keputusan para ulama terdahulu dan keputusan resmi Nahdlatul Ulama. Pada Mukhtamar ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, NU telah memberi status teologis kepada wilayah Nusantara yang dikuasai Belanda sebagai “wilayah Islam” (*dar Islam*), meski bukan suatu negara Islam (*darul Islam*). Sedang pada pertemuan di Surabaya 21-22 Oktober 1945, NU telah memutuskan bahwa status hukum NKRI berdasarkan Pancasila yang diproklamasikan Sukarno-Hatta adalah sah secara fiqih atau hukum Islam.

Keputusan itu kemudian dikukuhkan oleh Mukhtamar NU di Situbondo tahun 1984 yang memutuskan bahwa NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah final. Tidak diperlukan upaya-upaya politik baru untuk memperjuangkan negara Islam di Indonesia.

Karena itu, pertarungan dan perjuangan ideologis yang dikembangkan PKB bukan lagi soal formalisasi agama atau bentuk negara, tetapi penguatan kesadaran masyarakat dan para pemimpin dalam

menghadapi arus ideologisasi dalam skala global. Perjuangan demikian jauh lebih penting karena eksistensi bangsa dan kepentingan nasional menjadi taruhan utamanya.

Kedua, PKB sebagai partai politik mempunyai basis kultur yang kokoh dalam sejarah gerakan sosial dan gerakan Islam di Nusantara sejak lama. Sebagai partai politik yang kelahirannya dibidani oleh NU, PKB merupakan mata rantai perjuangan rakyat di masa lalu, menjadi rantai yang menyambungkan pemikiran keagamaan yang sudah dilembagakan di pesantren-pesantren sejak berabad-abad yang lalu dengan dunia modern di masa kini, termasuk dengan dunia politik. PKB juga meneruskan tradisi spiritualitas masyarakat Islam yang tersambung dengan spiritualitas peradaban Islam ribuan tahun ke belakang.

Basis kultur yang demikian memungkinkan PKB memiliki tingkat kelenturan tertentu yang membuatnya bisa mengatasi konflik dan tantangan secara bertahap tanpa respons-respons reaksioner dan negatif yang justru mematikan kreativitas dan otonomi gerakan masyarakat secara keseluruhan.

Ketiga, PKB memiliki pemimpin besar yang sangat disegani karena kedalaman pemikiran

sosialnya, keluasan wawasan politiknya, keawasan naluri politiknya dan besar pengaruhnya sepanjang sejarah Indonesia sejak lebih dari tiga dasawarsa yang lalu, yakni KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kemampuan Gus Dur meramu tradisi pesantren dengan pemikiran-pemikiran modern menjadikannya sebagai juru bicara utama para kiai dan masyarakat NU. Kemudian muncullah kiai-kiai yang berani melakukan transformasi besar-besaran dalam tradisi berpikirnya, seperti pengembangan pemikiran mazhab dari sebatas mengikuti pendapat ulama (*mazhab qauly*) ke arah pemikiran mazhab yang mengikuti metodologi pemikiran ulama itu sendiri (*mazhab manhajiy*).

Di lingkungan NU secara umum, muncul generasi muda NU dengan pemikiran kritisnya tanpa meninggalkan tradisi pesantren yang sudah mendarah daging. Jadilah Gus Dur sebagai pemimpin umat yang mampu mendinamisasi pemikiran ulama di satu sisi dan pemikiran kaum muda di sisi lain.

Gus Dur juga membangun sebuah pandangan hidup baru di kalangan politisi dan warga negara secara luas yaitu membangun dunia politik dengan pengetahuan yang komprehensif. Membangun

dunia politik semata-mata hanya dengan uang/modal dan kekuasaan justeru menjadi awal dari proses degradasi kultur politik secara keseluruhan. Sebagaimana Sukarno, Moh Hatta, Tan Malaka, KH A Wahid Hasyim atau HOS Cokroaminoto, Gus Dur memberi contoh bagaimana menjadikan pengetahuan sebagai ruh utama dari gerakan politik.

Politik dengan demikian selalu mempunyai unsur atau dimensi pendidikan dan penyadaran bersama. Politik seperti itu bisa melampaui jebakan-jebakan kekuasaan yang bersifat duniawi, seperti status sosial atau akumulasi materi.

Ketika politik tidak lagi tersandera oleh motif-motif duniawi, maka berpolitik akan diniati sebagai suatu panggilan hidup untuk mengabdikan kepada masyarakat dan bangsa. Jika kesadaran seperti itu bisa tumbuh, maka akan terasa betapa mulianya perjuangan politik.

Dengan basis dan konstruk pengetahuan seperti itu, gerakan politik PKB cenderung memiliki unsur keabadian dan menyentuh alam bawah sadar masyarakat. Proses demikian jika dikembangkan secara konsisten tentu akan menjadi landasan kuat bagi proses penguatan moral dan ideologi bangsa

secara keseluruhan. Dengan perkataan lain, PKB akan selalu menjadi salah satu kekuatan inti dalam proses kebangkitan (kembali) Indonesia ke depan.[]

Gus Dur dan “*Siyasah*” Bersendi “*Syariah*”

Dalam kurun waktu tiga dasawarsa terakhir sejak tahun 1980-an, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bisa disebut sebagai tokoh yang paling kontroversial. Pemikiran dan sikap politiknya selalu mengundang pro dan kontra. Kalau ditulis, artikel ini akan penuh dengan daftar pemikiran dan sikapnya yang menimbulkan polemik. Hujatan dan dukungan yang diterima Gus Dur selama ini barangkali sama banyaknya.

Bagaimana sesungguhnya konstruk pemikiran dan sikap politik Gus Dur? Mengapa ia sering disalahpahami sebagian orang?

Bagi saya yang sudah puluhan tahun belajar dan mendampingi Gus Dur, meski belum bisa memahami pemikiran dan sikapnya secara utuh, tetapi saya bisa mengatakan bahwa pemikiran dan sikap-sikap politik Gus Dur pada hakikatnya merupakan terjemahan ajaran syariat dan pengembangan tradisi pesantren dari mana ia berasal. Dengan kata lain, politik (*siyasa*) Gus Dur sebenarnya bersumber pada ajaran Islam (*syariah*) dalam bingkai tradisi pesantren.

Seperti dikatakan KH M Cholil Bisri dalam pengantar buku *Membangun Demokrasi* (1999), pemikiran Gus Dur berangkat dari keinginan untuk menunjukkan bahwa ajaran *Ahlu Sunnah wal Jamaah* yang dipertahankan kalangan kiai pesantren, dengan kitab-kitab klasik sebagai *muqarrar*-nya, masih sangat dan tetap relevan sebagai pijakan kehidupan masyarakat modern.

Karena itu, pemikiran dan sikap putera KH A Wahid Hasyim ini selalu mencerminkan hal-hal mendasar yang menjadi ciri syariat Islam dan legasi pemikiran pesantren, yaitu [1] kepedulian kepada kepentingan kemanusiaan dalam arti luas; [2] watak dinamis yang melekat di dalamnya sebagai cerminan

dari sifat transformatif ajaran Islam, dan [3] kesediaan untuk bersikap terbuka terhadap ajaran dan peradaban lain sebagai manifestasi kosmopolitanisme peradaban Islam.

Islam adalah agama yang secara tegas menyatakan bahwa kehadirannya hanyalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Dengan dasar ini, ajaran Islam harus dikembangkan sebagai sumber nilai untuk mewujudkan kedamaian, keadilan dan kemakmuran bagi semua umat manusia tanpa memandang agama, suku dan asal-usul kebangsaan. Tanpa bisa menjadi “rahmat” bagi semua umat, Islam bisa jadi telah kehilangan *raison d’etre*-nya.

Dalam rangka mewujudkan Islam sebagai rahmat itulah ulama terdahulu seperti Imam al-Ghazali merumuskan konsep dasar agama dalam apa yang disebut sebagai “tujuan syariat” (*maqashid as-syari’ah*). Dalam kitabnya *al-Mustasyfa* Jilid I, hlm. 278, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan syariat ada lima. Kelima tujuan itu diterjemahkan Gus Dur sebagai upaya-upaya untuk melindungi [1] keselamatan fisik warga negara dari tindakan badani di luar ketentuan hukum (*hifz an-nafs*); [2] keselamatan keyakinan agama masing-masing,

tanpa ada paksaan untuk berpindah agama (*hifz ad-din*); [3] keselamatan keluarga dan keturunan (*hifz an-nasl*); [4] keselamatan harta benda dan hak milik pribadi di luar prosedur hukum (*hifz al-mal*), [5] keselamatan profesi (*hifz al-'aql*).

Pembelaan Gus Dur terhadap tabloid *Monitor* (tahun 1990), kelompok minoritas agama dan etnis, warga Ahmadiyah, kasus Inul Daratista, untuk menyebut beberapa contoh, dapat dijelaskan dari perspektif teori *maqashid as-syari'ah* itu. Itulah cara berpikir kaum santri dalam rangka menjawab persoalan aktual masyarakat dan sekaligus mendinamisasi pandangan hidup pesantren.

Watak dinamis yang melekat dalam tradisi pesantren dimungkinkan karena yang dibangun oleh pesantren adalah tradisi berpikir serba fiqih. Sepintas lalu, tradisi ini penuh dengan sikap formalistik dan *taqlid*. Tetapi jika disimak secara seksama, tradisi berpikir serba fiqih itu justru merupakan kekuatan yang membuat pesantren bisa eksis dan berinteraksi secara dinamis dengan perubahan zaman.

Dalam sebuah makalahnya berjudul “Generasi Muda Islam dan Masa Depan Bangsa Indoneisa”

yang disampaikan pada Temu Wicara Nasional FMGMI tahun 1986, Gus Dur menyatakan watak dinamis yang melekat dalam tradisi pemikiran pesantren tumbuh dengan baik karena fiqh telah menyediakan daerah sangga dalam bentuk teori hukum (*usul al-fiqh*) dan kaidah-kaidah (*qawaid fiqhiyyah*) yang menampung kebutuhan masa dan tempat dalam merumuskan keputusan hukum agama itu sendiri.

Kedua perangkat metodologi berpikir itu dapat digunakan untuk melakukan antisipasi terhadap kebutuhan akan perubahan, di samping sebagai alat penentu mana bagian yang esensial dari kehidupan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan harus tetap dipertahankan. Fiqih atau hukum agama merupakan alat utama untuk antisipasi seperti itu.

Namun, dalam kata pengantar buku Hiroko Horikoshi (*Kiai dan Perubahan Sosial*, 1987), Gus Dur menyatakan yang paling memungkinkan penggunaannya bagi alat antisipasi terhadap kebutuhan akan perubahan pandangan hidup adalah ajaran akhlak atau moralitas individu maupun kolektif dari masyarakat. Ajaran akhlak senantiasa bersifat praktis, dalam arti langsung

dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat oleh paraarganya.

Dalam lingkungan moral yang sepenuhnya berorientasi kepada aspek-aspek normatif yang baku, sudah tentu sulit dilakukan antisipasi kebutuhan akan perubahan pandangan hidup. Namun dalam ajaran akhlak yang berwatak antisipatif terhadap kebutuhan perubahan pandangan hidup itu, terdapat sejumlah prinsip yang secara lentur akan mengarahkan warga masyarakat kepada perubahan itu sendiri. Contohnya prinsip membawa manfaat. Prinsip inilah yang senantiasa menjaga, agar reaksi-reaksi sesaat yang umumnya negatif terhadap gagasan dan gaya baru dalam kehidupan, justeru tidak mematikannya.

Gus Dur telah menunjukkan bahwa sikap politik yang bersumber pada pemikiran serba fiqih senantiasa menunjukkan watak dinamis dan selalu bisa menentukan mana yang esensial dan mana yang bisa diambil spiritnya saja.

Pemikiran serba fiqih tidak hanya berwatak dimanis dalam dirinya, tetapi juga menjadi dasar tumbuhnya sikap-sikap inklusif dan pandangan

kosmopolit dalam dunia pesantren. Dalam sebuah makalah berjudul “Development by Developing Ourselves” yang dipresentasikan pada sebuah seminar tentang pembangunan di Penang Malaysia, 25 November 1979, Gus Dur menyatakan khazanah pemikiran fiqh tradisional (*legacy of the past*) tidak hanya memberikan spirit pada pola hidup egalitarian dan pembangunan masyarakat yang toleran dan berkeadilan, tetapi juga bisa digunakan untuk menemukan kembali esensi keberagamaan secara total yang melintasi batas kerangka legal-formalistik dan pendekatan monokultural terhadap realitas.

Dengan dasar pemikiran fiqh yang dirumuskan oleh ulama terdahulu dan didukung oleh pengetahuan tentang persoalan masyarakat secara mendalam, kiai-kiai pesantren bisa mengembangkan pandangan dunia kosmopolit yang toleran terhadap pengalaman keberagamaan lain dan kesiapan untuk selalu membuka wawasan baru dalam rangka pengembangan dan pematangan diri (Abdurrahman Wahid dalam *Ethical Dilemmas of Development in Asia*, 1983, hlm. 45). Karena itu tidak heran jika Gus Dur yakin bahwa kiai-kiai akan tetap bisa mewarnai kehidupan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

Itulah bangunan pemikiran yang melandasi sikap politik Gus Dur selama ini. Sebuah sikap yang dilandasi tradisi keilmuan yang mengakar kepada *syariah* dan pandangan hidup pesantren. Kalau ada orang yang selalu salah paham terhadap Gus Dur, bisa jadi itu karena mereka tidak memahami tradisi pesantren. []

Belajar Politik Kepada Gus Dur

KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bisa disebut sebagai tokoh nasional yang paling lama bertahan di jajaran elit Indonesia paling berpengaruh. Di kala tokoh-tokoh se-angkatan sudah surut, Gus Dur tetap memainkan peranan penting dalam politik Indonesia.

Gus Dur mulai masuk dalam percaturan politik dan kebangsaan Indonesia sejak awal 1970-an ketika ia baru pulang belajar dari Baghdad. Pada awalnya Gus Dur tampil sebagai sosok budayawan dan cendekiawan rakyat yang pemikiran dan sikapnya menunjukkan kepedulian terhadap nasib rakyat di tengah dinamika pembangunan nasional. Kemudian ia tampil sebagai pemimpin umat dengan menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selama 15 tahun, dan akhirnya

menjadi pemimpin politik dengan menjadi Presiden RI dan juga Ketua Dewan Syura DPP PKB sejak muktamar di Yogyakarta.

Mengapa Gus Dur bisa bertahan sedemikian lama dalam percaturan politik Indonesia?

Sekurang-kurangnya ada lima jawaban yang bisa menjelaskannya. **Pertama**, Gus Dur mengajarkan kepada kita bahwa memasuki dunia politik memerlukan kesabaran dan kesediaan untuk menjadikannya sebagai proses perjuangan jangka panjang. Dalam proses demikian, kekuasaan harus dibangun dengan investasi sosial dan kultural yang cukup. Kalau saat ini banyak orang begitu masuk dunia politik langsung mengejar jabatan tertinggi, tidak demikian dengan Gus Dur. Sebelum menjadi Presiden RI dan Ketua Dewan Syura DPP PKB, Gus Dur sudah malang melintang di tengah masyarakat selama kurang lebih 30 tahun. Selama kurun waktu tersebut, Gus Dur tampil sebagai juru bicara masyarakat, dengan menulis tentang berbagai persoalan masyarakat dan bangsa, menjadi pembicara dalam berbagai seminar, menjadi juru dakwah dalam kegiatan keagamaan, dan menjadi pembela atau pendamping bagi mereka yang tertindas.

Ibarat seorang pelari, Gus Dur adalah pelari maraton jarak jauh, bukan pelari jarak pendek 100 meter. Karena maraton, perjalanan politik Gus Dur cenderung perlahan tetapi akumulatif, tidak berorientasi pada hasil semata. Gus Dur mengajarkan kepada kita bahwa tujuan politik seharusnya tidak diraih dengan cara-cara yang instan. Cara-cara instan bukan hanya menyebabkan kekuasaan yang dibangun tidak kokoh, tetapi juga cepat berakhir.

Kedua, Gus Dur membangun jalur politiknya sebagai cendekiawan rakyat. Sebagai seorang cendekiawan, kekuatan politik Gus Dur bukan semata-mata pada kepaiawaian manuver politik yang diperagakan, tetapi lebih pada kekuatan struktur pengetahuan yang dibangun untuk menjelaskan yang terjadi dan bagaimana proyeksi masa depannya.

Dalam konteks ini, konstruk politik Gus Dur tidak jauh berbeda dengan konstruk politik Sukarno, Moh Hatta dan beberapa pendiri bangsa yang lain. Mereka adalah pemimpin yang membangun kekuasaan berbasis pengetahuan, bukan semata-mata kepaiawaian atau manuver-manuver politik yang penuh tipu-daya dan dagang sapi.

Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas struktur pengetahuan bukan hanya kokoh, tetapi juga memiliki unsur keabadian. Karena pengetahuan menghasilkan nilai-nilai yang bersifat abadi, sehingga meski seseorang sudah tidak berkuasa, tetapi pengetahuan dan pemikirannya tetap menjadi rujukan dan inspirasi bagi banyak orang.

Namun, sedikit berbeda dengan Sukarno dan Hatta yang katakanlah membangun basis pengetahuannya pada ilmu-ilmu sosial atau ekonomi semata, struktur pengetahuan Gus Dur merupakan sintesis antara khazanah tradisi pesantren dan ilmu-ilmu sosial. Karena itu, pemikiran dan politik Gus Dur menjadi peretas jalan hubungan masyarakat dan negara, dan pada saat yang sama berhasil mendamaikan hubungan agama dan negara melalui konsep Islam sebagai etika sosial (*social ethics*), dan juga hubungan agama dan masyarakat melalui konsep pribumisasi Islam.

Ketiga, Gus Dur adalah tokoh yang selalu menjaga hubungan baik dengan semua kalangan. Bagi Gus Dur politik adalah silaturahmi. Meski ia diperlakukan secara tidak adil oleh Presiden Soeharto di masa lalu misalnya, ia tetap berhubungan

baik dengan penguasa Orde Baru tersebut. Meski ia menentang keras dengan cara-cara kekerasan yang digunakan oleh LB Moerdani, ia tetap berkomunikasi dengan Panglima ABRI di masa Orde Baru tersebut. Menurut Gus Dur, lebih baik baginya menjaga komunikasi dengan tokoh-tokoh berpengaruh dan mempertahankan kemungkinan untuk melakukan dialog dengan mereka daripada menolak untuk berhubungan dengan mereka dan membuang kesempatan untuk menjelaskan kepada mereka tentang posisi dan pandangan kita yang sebenarnya (Greg Barton, 2003).

Selain dengan tokoh-tokoh berpengaruh, Gus Dur juga selalu berkomunikasi dengan masyarakat bawah. Kalau ada waktu, diundang untuk mengisi pengajian bagi acara keagamaan di tingkat desa pun Gus Dur bersedia hadir. Baginya, berkomunikasi dengan masyarakat luas adalah momentum untuk mendengarkan apa yang menjadi pemikiran dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Dengan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan itu, pengaruh Gus Dur terus bertahan, bahkan semakin meluas. Para pendukung dan simpatisannya juga bertambah.

Keempat, Gus Dur adalah sosok yang memiliki semangat hidup yang luar biasa dan – meminjam istilah KH A Mustofa Bisri (2002) – mempunyai kepercayaan diri yang tinggi (*i'timad 'ala an-nafs*). Semangat dan kepercayaan diri itu menjadikan Gus Dur mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi termasuk masalah usia dan kesehatan. Masalah yang bagi orang lain mungkin menjadi kendala serius untuk mempertahankan karir politiknya.

Dengan itu pula Gus Dur bisa berhubungan dan berkomunikasi dengan elit-elit politik di tanah air dan para pemimpin dunia dalam posisi sejajar. Tidak ada rasa rendah diri, sehingga peluang intervensi bisa ditepis sejak dini. Semangat hidup, keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi adalah modal kolektif untuk menjadi bangsa yang maju dan mandiri.

Kelima, dalam beberapa kasus, Gus Dur menyatakan bahwa politik adalah hal yang tidak untuk dikomunikasikan. Ada banyak pemikiran dan sikap politik Gus Dur yang terus menjadi tanda tanya sampai saat ini, dan Gus Dur juga tidak pernah menjelaskan secara utuh apa yang menjadi

tujuannya. Mungkin Gus Dur sudah menjelaskan secara normatif apa yang menjadi pemikiran dan sikapnya, tetapi kebanyakan masyarakat tetap saja menganggap bahwa ada sesuatu yang tidak dikatakan Gus Dur secara verbal dan itu sebenarnya yang menjadi tujuan utamanya.

Dalam kondisi demikian, muncul begitu banyak penafsiran baik yang mendukung maupun menolak. Banyaknya komentar baik yang pro maupun kontra justru semakin meningkatkan pengaruh politik Gus Dur. Belum hilang pro dan kontra, Gus Dur kemudian melempar pemikiran atau sikap politik lain yang kontroversial sehingga pada akhirnya masyarakat disibukkan kembali untuk memperbincangkannya.

Itulah Gus Dur. Sosok santri yang menjelma menjadi cendekiawan rakyat dan pemimpin politik yang sangat berpengaruh. Pengaruh itu bisa diraih karena pengetahuannya yang luas terhadap persoalan masyarakat dan pengetahuan agamanya yang mendalam serta kemampuannya untuk meramu pengetahuan tentang masyarakat dan agama itu menjadi pengetahuan baru yang menjadi kunci pembuka untuk memahami dinamika

masyarakat dan solusi atas persoalannya. Itu semua bisa dijaga karena Gus Dur memiliki tingkat kesabaran yang tinggi menapaki jalur politik sebagai proses investasi sosial jangka panjang. []

Gus Dur dan Visi Kebangkitan Bangsa

Pada awal 1980-an, Dr Soedjatmoko – seperti dikutip Abdurrahman Wahid dalam pengantar buku KH A Wahid Hasyim, *Mengapa Memilih NU* (1985) – mengemukakan sebuah statemen menarik bahwa negara-negara industri maju sudah mencapai titik optimal dalam perkembangannya. Kelebihan yang belum dapat dikejar oleh negara-negara berkembang kini hanya tinggal di bidang persenjataan. Dalam keadaan demikian, negara-negara berkembang dituntut untuk mengembangkan peradaban (sivilisasi) mereka sendiri.

Soedjatmoko memperkirakan munculnya tiga peradaban dunia dari negara-negara berkembang di masa depan yang tidak terlalu jauh, yakni

peradaban Sinetik (bersumber pada daratan Cina) yang meliputi kawasan RRC, Korea, Jepang dan Vietnam; peradaban Indik (bersumber pada ke-India-an) dengan lingkup sebagian kawasan Asia Tenggara, Srilangka dan anak benua India sendiri; dan peradaban Islam yang membentang dari kawasan Asia Tenggara hingga Marokko di Afrika.

Apa yang diramalkan Soedjatmoko itu tampaknya kini menjadi kenyataan. Peradaban Sinetik, terutama Cina, sedang mengalami perkembangan dan kebangkitan yang sangat menakjubkan. Cina saat ini adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dan sekaligus pemilik cadangan devisa terbesar di dunia, telah mencapai lebih dari 1 triliun dolar AS. Cina juga menjadi pelopor terbentuknya SCO (*Shanghai Cooperation Organization*) yang beranggotakan Cina, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan Uzbekistan. SCO merupakan kekuatan/kutub baru yang sedang bangkit bersama dengan bangkitnya Uni Eropa dan Amerika Latin.

Sementara India, Korea Selatan dan Jepang juga tumbuh sebagai raksasa ekonomi yang tidak diragukan lagi. Sehingga tidak mengherankan jika

dikatakan kawasan Asia saat ini menjadi pusat gempa ekonomi-politik internasional.

Kebangkitan Islam

Bagaimana dengan peradaban Islam? Meski tidak secepat peradaban Sinitik dan Indik, peradaban Islam juga menunjukkan dinamika dan pertumbuhan yang cukup menjanjikan. Abad ke-15 Hijriyyah yang didengung-dengungkan sebagai era kebangkitan Islam tampaknya akan menjadi kenyataan, jika faktor-faktor pendukungnya bisa didayagunakan dan diproyeksikan secara maksimal dan menyeluruh.

Ada tiga faktor penting mengapa kebangkitan Islam sangat dimungkinkan terjadi. *Pertama*, peradaban Islam mempunyai modal atau fondasi sejarah yang kokoh. Menurut Abdurrahman Wahid (1985), peradaban Islam memiliki kebesaran material yang diwariskan kepada dunia dalam bentuk legasi arsitektur penuh kemegahan (dari Masjid Pualam Biru di Turki hingga ke Taj Mahal di India); keagungan rohani yang dilestarikan dalam keputakaan yang masih berjuta-juta dalam bentuk naskah tulisan tangan dan belum dicetak, serta dalam tradisi penurunan ilmu-ilmu dan nilai-nilai

keagamaan dari generasi ke generasi dengan hasil terpeliharanya kebulatan pandangan hidup kaum Muslimin hingga kini, dan kelengkapan yang ada pada masa lalu peradaban Islam yang dapat digunakan sebagai alat pengembangan peradaban Islam yang baru di masa depan.

Salah satu syarat mutlak bagi kebangkitan kembali sebuah peradaban dunia sudah terpenuhi oleh peradaban Islam, yaitu persambungan elemen-elemen kehidupannya, sehingga membentuk kerangka tangguh bagi kebangkitan kembali itu sendiri.

Kedua, kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana diproyeksikan oleh globalisasi dan liberalisasi bertahun-tahun yang lalu ternyata tidak berjalan merata. Pada sisi tertentu, globalisasi (liberalisasi ekonomi, politik dan budaya) di negara-negara berkembang, termasuk di kawasan masyarakat Islam, justru berjalan seiring dengan meningkatnya angka kemiskinan, kekerasan dan deprivasi relatif, yaitu perasaan tersingkirkan dari berbagai bidang kehidupan. Fundamentalisme, kultus, terorisme dan bentuk-bentuk radikalisme yang lain berkembang luas.

Dalam kondisi demikian, manusia cenderung menengok kembali tradisi dan ajaran agamanya yang agung. Tidak heran jika banyak kalangan menyebutkan abad ini sebagai abad agama (*The Age of Religion*).

Ketiga, dinamika sistem dunia saat ini ditandai dengan kuatnya arus transisi hegemoni sehingga hampir tidak ada lagi satu kekuatan tunggal yang mendominasi politik dan ekonomi dunia. Dulu selama beberapa abad kawasan Islam dari Marokko sampai Indonesia dikuasai Barat. Sejalan dengan berakhirnya kolonialisme dan menguatnya transisi hegemoni belakangan ini, dunia Islam pun berkembang secara pesat, mandiri dan potensial menjadi salah satu kekuatan hegemonik dunia.

Di satu sisi, hegemoni Amerika Serikat sudah semakin berkurang sebagai konsekuensi logis dari munculnya kekuatan-kekuatan baru di dunia, sehingga kebangkitan peradaban-peradaban di luar Barat pun tidak terelakkan. Di sisi lain, negara-negara Uni Eropa cenderung menerapkan kebijakan yang lebih dialogis dengan negara-negara Islam, sehingga kawasan Islam mengalami pertumbuhan yang cukup positif karena semakin berkurangnya intervensi pada masalah dalam negerinya. Rusia

saat ini juga terus meningkatkan dialog dan kerjasama dengan negara-negara Islam.

Kebangkitan bangsa

Di Indonesia, spirit kebangkitan Islam muncul di mana-mana. Spirit itu sekurang-kurangnya ditandai dengan maraknya kegiatan keagamaan dan munculnya berbagai manifestasi gerakan Islam, baik pada level nasional maupun lokal, baik yang mengedepankan Islam sebagai ideologi maupun nilai-nilai universal.

Memang ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa banyaknya manifestasi gerakan Islam itu menunjukkan adanya perbedaan yang tinggi di antara sesama pemimpin dan umat Islam dalam menafsirkan ajaran agama dan sekaligus merumuskan konsep perjuangannya. Keadaan ini bisa menjadi awal berkembangnya konflik berkepanjangan yang tidak lagi jelas ujung pangkalnya. Asumsi demikian bisa jadi ada benarnya jika para pemimpin dan umat Islam terus terperosok dalam egosentrisme dan klaim-klaim superioritas yang justru akan melahirkan kesalahpahaman dan tertutupnya komunikasi antar-kelompok.

Namun, peradaban Islam bisa belajar dari sejarah kebangkitan Eropa, di mana kawasan ini berkembang menjadi negara-negara kuat bahkan menjajah berbagai kawasan di Asia, Afrika dan Amerika, justeru setelah mereka konflik dan saling serang satu sama lain dalam jangka waktu yang cukup lama.

Kecenderungan untuk konflik dan sikap saling menyerang yang selama ini masih melekat di kalangan para pemimpin dan umat Islam, suatu saat pasti akan mencapai titik jenuh, sehingga dimungkinkan lahir kesadaran dan konsensus baru yang akan menjadi landas pacu kebangkitan Islam. Didukung tiga faktor di atas, tentu saja kesadaran dan konsensus itu bisa tumbuh lebih cepat.

Kesadaran dan konsensus itu akan lebih kokoh jika dipupuk dengan spirit nasionalisme dan patriotisme, sehingga kebangkitan Islam menjadi bagian integral dari proses kebangkitan bangsa. Hal demikian bukan sesuatu yang mengada-ada karena umat Islam merupakan bagian terbesar dari bangsa ini.

Karena itu, kebangkitan Islam sebagai landasan utama kebangkitan bangsa perlu diletakkan dalam konteks gerakan nasional yang bersumber dari ajaran-ajaran agama, yang memungkinkan seluruh

komponen dan potensi bangsa disatukan sehingga cita-cita nasional seluruh warga bangsa yang merdeka ini bisa diwujudkan. Sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu sulit.[]

Gus Dur dan Transformasi Kebangkitan Islam

Sudah lebih dari seperempat abad kebangkitan Islam menjadi tema yang selalu diperbincangkan di kalangan aktivis Islam dan menarik perhatian para analis dari berbagai disiplin ilmu.

Apa sebenarnya latar belakang kebangkitan Islam, maknanya dan kemungkinan untuk memproyeksikannya dalam kehidupan masyarakat bangsa saat ini dan di masa depan?

Dekolonialisasi

Diskursus kebangkitan Islam menyebar dengan pesat pada pergantian abad ke-14 menuju abad ke-15 Hijriyyah, akhir tahun 1970-an. Di Indonesia antusiasme umat Islam terhadap spirit kebangkitan

itu sangat tinggi. Bahkan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Bersama No. 38 Tahun 1979 dan No. 9 Tahun 1979 tertanggal 20 Oktober 1979 tentang Peringatan Menyongsong Abad XV Hijriyyah.

Ada dua faktor penting yang mendorong maraknya diskursus tersebut. Pertama, peristiwa revolusi Islam Iran tahun 1979 yang berhasil menumbangkan rezim Syah Reza Pahlevi dukungan Amerika Serikat dan tampilnya Zia ul-Haq sebagai pemimpin Pakistan. Revolusi Islam Iran telah meningkatkan rasa percaya diri umat Islam dalam perjuangan untuk membebaskan diri dari segala bentuk dominasi dan hegemoni Barat.

Kedua, berakhirnya Perang Dunia II menjadi awal bagi bangkitnya masyarakat Islam sebagai negara merdeka, bebas dari penjajahan Barat. Sejak serbuan tentara Tartar tahun 656 Hijriyyah di Baghdad disusul penjajahan Barat atas kawasan Islam yang membentang dari Marokko di Afrika Barat sampai Indonesia di Asia Tenggara, peradaban Islam berada dalam masa kegelapan. Kemerdekaan yang diraih beberapa negara Islam membuka harapan baru terhadap dunia yang lebih

baik. Dengan demikian, kebangkitan Islam sejak awal identik dengan proses dekolonialisasi.

Spirit kebangkitan yang muncul secara massif pada akhir 1970-an merupakan gejala yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dijelaskan. Selama kurun waktu kurang lebih 25 tahun sejak meraih kemerdekaan, di negara-negara Islam telah tumbuh satu generasi baru dengan munculnya sarjana-sarjana muslim yang siap menjadi pemikir dan penggerak gerakan-gerakan Islam. Ditambah dengan spirit Revolusi Iran, para sarjana dan aktivis Islam sampai pada titik kesadaran baru bahwa legasi peradaban Islam bisa menjadi modal untuk membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, sehingga peradaban Islam sejajar dengan peradaban lain.

Kebangkitan Islam dengan demikian bukan hanya mencakup proses dekolonialisasi kawasan Islam dari cengkeraman fisik negara-negara Barat, tetapi juga bebas dari kungkungan rezim pengetahuan mereka.

Sampai saat ini, semangat dekolonialisasi itu tidak bisa dilepaskan dari visi gerakan Islam di berbagai negara. Bahkan ada kecenderungan yang semakin kuat untuk tidak sekadar menjadikan peradaban Islam sejajar dengan Barat, tetapi

menolak nilai-nilai Barat dan menjadikan Islam sebagai alternatif. Ideologi liberalisme dianggap telah gagal mewujudkan tata dunia dan sistem sosial yang manusiawi dan berkeadilan.

Kecenderungan demikian di satu sisi membuat berbagai manifestasi gerakan Islam menjadi semakin solid. Musuh bersama berhasil diciptakan, sehingga perbedaan-perbedaan di internal gerakan bisa dilupakan meski terkadang hanya untuk sementara. Perjuangan melawan dominasi Barat menuntut adanya persatuan di kalangan gerakan Islam, tanpa memandang keyakinan-keyakinan subsidier mereka (Hamid Enayat, 1982).

Namun, di sisi lain, kecenderungan tersebut membuat gerakan Islam terjebak dalam parokialisme yang ditandai dengan sikap menutup diri secara berlebihan sehingga maraknya gerakan Islam bisa menjadi ancaman bagi eksistensi dan integrasi bangsa yang pluralistik ini. Islam sebagai komponen mayoritas seharusnya bisa menjadi unsur yang menyatukan dan menjembatani berbagai aspirasi dari seluruh komponen bangsa, bukan menjadi faktor sebaliknya.

Proyeksi

Parokialisme seperti itu sebenarnya bukan hanya menjadi ancaman bagi eksistensi bangsa, tetapi juga bisa kontraproduktif terhadap gerakan Islam itu sendiri. Karena parokialisme akan memutus kontak gerakan Islam dengan realitas dan menjauhkannya dari aspirasi dasar umat Islam.

Karena itu, tantangan yang dihadapi gerakan Islam saat ini adalah mentransformasikan soliditas itu untuk kepentingan yang lebih besar dan memproyeksikannya untuk kepentingan kekinian dan masa depan. Pemurnian ajaran Islam dan ideologisasi terhadapnya tidak harus membuat umat Islam memutus komunikasi, dialog dan kerjasama dengan kelompok lain.

Kemurnian dan kesempurnaan perlu dipahami sebagai proses yang dinamis, bukan keadaan statis. Karena kemurnian dan kesempurnaan ajaran hanya bisa dicapai jika ada upaya-upaya berkelanjutan untuk menjadikan agama menjadi tata nilai yang inklusif dengan kesadaran untuk saling memberi dan menerima (*take and give*) dengan tata nilai yang berbeda. Kemurnian dan kesempurnaan akan semakin kokoh dan bermakna justru ketika ajaran agama ditempatkan sebagai faktor komplementer

dalam kehidupan, sehingga berbagai manifestasi kultural dan wawasan keilmuan yang datang dari peradaban lain bisa diserap secara proporsional dan kontekstual.

Menurut Abdurrahman Wahid (1989), prinsip-prinsip fundamental Islam sendiri tidak pernah mempersoalkan mana yang lebih unggul antara “masukan Islam” dan masukan nilai lain yang datang dari manapun. Karena dalam konteks ini, Islam tidak berfungsi sebagai hipotesis operatif, tetapi sebagai sumber inspiratif bagi kehidupan bangsa dan negara.

Dalam sejarah peradaban disebutkan bahwa ada saat di mana Islam begitu aktif belajar dan menyerap peradaban Barat. Ada juga saat di mana Barat menyerap kemajuan yang dicapai peradaban Islam. Sejarawan Inggris asal Kuwait, Farhat A Hussein, dalam sebuah tesisnya berjudul *Islamic Civilisation and its Impact Upon the Development of Western Europe* mengemukakan bahwa sejak abad VIII, yaitu selama 11 abad, muslim berkreasi dan menerangi dunia dari kegelapan di berbagai bidang. Pengaruh Islam itu terus hidup hingga Eropa memasuki abad modern, bahkan hingga saat ini.

Menurut Farhat A Hussein, al-Quran sarat dengan informasi mengenai astronomi, geologi, pengobatan, dan sains lainnya yang mengantarkan ilmuwan muslim menjadi peneliti. Para ilmuwan muslim telah meneliti dan memahami sains dalam al-Quran dan menghasilkan 1.400 buku dari cabang ilmu yang berbeda. Buku-buku itulah yang kemudian diadopsi Barat dan digunakan untuk memajukan peradaban mereka.

Hal itu bisa terjadi karena pada dasarnya nilai-nilai kehidupan utama dan ilmu pengetahuan bisa bersumber dari semua agama dan peradaban. Nilai tentang etos kerja, keharusan belajar, keadilan, persamaan dan kasih sayang misalnya, ada pada semua agama dan peradaban.

Proses dekolonialisasi, dengan demikian, bukan berarti membebaskan diri secara total dari pengaruh luar. Dalam kehidupan masa kini tidak mungkin suatu bangsa menutup diri dan menolak semua yang datang dari luar. Dekolonialisasi perlu dimaknai ulang sebagai upaya membangun kemandirian dan identitas nasional dalam rangka menjadi dirinya sendiri, serta mendayagunakan seluruh potensi yang ada sehingga bangsa ini bisa eksis dan

bekerjasama dengan bangsa lain dalam kerangka hubungan yang setara, adil dan saling menguntungkan.

Kalau sikap seperti itu bisa dikembangkan dengan baik dan percaya diri, maka kebangkitan Islam akan berjalan lebih cepat dan membawa makna yang sangat dalam bagi umat Islam sendiri dan bagi kebangkitan bangsa secara keseluruhan. []

Gus Dur dan Kebangkitan Kembali Indonesia

Gus Dur termasuk orang yang yakin akan kebangkitan kembali Indonesia. Dalam sebuah tulisannya berjudul “Kebangkitan Kembali Peradaban Islam: Adakah Ia?” yang menjadi kata pengantar buku kumpulan karangan KH A Wahid Hasyim berjudul *Mengapa Memilih NU* (1985), Gus Dur mengungkapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi sebuah kebangkitan peradaban.

Tanggal 20 Mei 2007 yang lalu, di mana-mana orang ramai memperingati hari kebangkitan nasional yang usianya sudah hampir mencapai satu abad. Namun, tahun ini peringatan itu terasa kurang bergairah, sehingga perayaan tersebut seperti hanya untuk memenuhi seremoni belaka.

Mengapa peringatan Harkitnas tahun ini kurang *greget*? Apakah karena masyarakat sudah bosan dengan seremoni-seremoni yang dianggap tidak mempengaruhi secara langsung kebutuhan hidup mereka? Ataukah ini sebagai gejala bangsa ini mengalami rasa putus asa secara kolektif?

Dilihat dari sudut pandang sejarah masa lalu, sumber daya alam dan manusia, serta nilai-nilai yang dimilikinya, Indonesia merupakan sebuah bangsa yang sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk bangkit sejak lama. Dibandingkan dengan Singapura, Vietnam atau Malaysia, untuk menyebut beberapa contoh, modal spiritual dan material bangsa ini jauh lebih besar. Namun mengapa kita sekarang semakin tertinggal dari bangsa-bangsa tersebut yang dulu berada jauh di belakang kita?

Setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan Indonesia seringkali mengalami kendala serius untuk bangkit. Jika tidak diselesaikan, kendala ini dalam jangka panjang bisa menjadi faktor yang merusak bangsa dari dalam, sehingga peluang untuk bangkit akan jauh lebih sulit di masa depan.

Pertama, sudah sejak lama bangsa ini mempunyai masalah dengan ideologinya. Sampai hari ini kita tidak bisa merumuskan suatu *clear ideology*. Padahal, dalam *clear ideology* itulah, berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk sumber daya di dalamnya, bisa diikat untuk mencapai tujuan akhir bersama (Abdurrahman Wahid, dalam *Dialog: Indonesia Kini dan Esok*, 1980). *Clear ideology* berfungsi sebagai daya ikat sekaligus menjadi petunjuk arah perjalanan bangsa menghadapi berbagai tantangan dan perubahan.

Bagaimana dengan Pancasila? Sebagai ideologi bangsa, harus diakui, Pancasila sampai saat ini masih belum *clear*. Di satu sisi, penafsiran dan rumusan-rumusan Pancasila masih dimonopoli oleh penguasa dan elit politik nasional pada umumnya, sementara rumusan dari bawah tidak muncul. Di sisi lain, setelah dimonopoli dan dimanipulasi oleh para penguasa di masa lalu, kini Pancasila justru tersingkirkan dari diskursus ideologi bangsa karena ada aspirasi yang bersifat massif dari kalangan agama untuk menjadikan agama mereka sebagai ideologi di satu pihak dan keinginan sekelompok masyarakat untuk mela-

kukan liberalisasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa secara total.

Saat ini, arus radikalisasi agama dan liberalisasi ekonomi-politik begitu kuat sehingga memperbincangkan ideologi nasional semacam Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang melawan zaman dan tidak relevan. Padahal radikalisasi dan ideologisasi agama yang tidak terkontrol akan menghasilkan instabilitas dan disintegrasi sosial, baik yang bersifat laten maupun manifes. Sedangkan liberalisasi ekonomi dan politik yang tidak terkendali juga akan melahirkan hal yang sama, karena liberalisasi demikian akan menciptakan proses deprivasi relatif secara massif, karena masyarakat akan merasa tersingkirkan dari berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan yang menjadi tumpuan utama mereka sendiri selama ini.

Tanpa bisa didapat suatu rumusan ideologi yang *clear*, bangsa ini akan terus mengalami degradasi dalam berbagai bidang kehidupannya. Kelihatan modern dan maju di permukaan, tetapi sangat rapuh di dalamnya.

Kedua, belum munculnya suatu kepemimpinan nasional yang kuat. Kepemimpinan demikian bertugas menjaga dan mengembangkan ideologi

nasional secara konsisten, dan sekaligus mengawal kelangsungan tahapan-tahapan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Tugas ini mengharuskan adanya suatu pola kepemimpinan yang meletakkan proses pembangunan bangsa sebagai pekerjaan jangka panjang, sehingga capaian-capaian yang dibuat tidak sekadar memenuhi kepentingan lima tahunan.

Pola kepemimpinan nasional kita tidak melemaba secara kuat karena para pemimpin nasional kebanyakan berpikir sektoral dan untuk kepentingan jangka pendek. Jarang ada pemimpin yang menginvestasikan hidupnya untuk satu generasi ke depan, sementara dia sendiri mungkin tidak akan ikut menikmati hasil investasinya. Kebanyakan pemimpin kita sibuk membangun citra guna mempertahankan atau merebut suatu jabatan politik.

Ketiga, sebagian besar komponen bangsa ini terus dibuai oleh keyakinan palsu bahwa agama, kelompok atau ideologi yang diikutinya akan bisa mengatur dan menyelesaikan persoalan kehidupan secara komprehensif. Ini adalah sebuah gejala yang – oleh Gus Dur – disebut *overclaim*. Sebagian

golongan agama meyakini bahwa agamanya jika dijadikan ideologi negara akan bisa mengatur dan menyelesaikan semua hal yang menjadi persoalan bangsa. Kaum liberal juga berpandangan sama dengan menyatakan bahwa jika semua sendi kehidupan bangsa diliberalisasikan, maka bangsa ini sedang memulai kebangkitannya.

Overclaim menyebabkan kita kehilangan ruang bersama untuk saling berbagi dan berdialog secara sehat, menutup kemungkinan suatu pola kehidupan bersama yang bersifat saling melengkapi (komplementer). Pola kehidupan masyarakat diupayakan menjadi sangat monolitik dan saling berhadapan. Ekonomi model suatu agama misalnya dipasang sebagai satu-satunya alternatif bagi sistem ekonomi nasional. Sebaliknya, bagi kaum liberal, ekonomi model neolib-lah yang harus dijadikan rujukan. Di luar kedua kelompok ini, ada golongan hedonis yang hampir tidak pernah memikirkan ideologi, tetapi hanya berusaha mengambil keuntungan dari setiap kejadian dan perubahan yang terjadi.

Ketiga faktor di atas merupakan sedikit dari sekian banyak faktor yang bisa didiskusikan lebih

lanjut. Namun bukan faktor-faktor lain yang harus dimasukkan, tetapi kesadaran bahwa degradasi kehidupan bangsa ini perlu segera diatasi bersama. Tanpa ada kesadaran seperti itu, saya khawatir bangsa ini akan semakin tertinggal dari negara-negara tetangga dan semakin tidak diperhitungkan dalam pergaulan internasionalnya.

Bukan hanya itu, kalau perkembangan bangsa terus berjalan tanpa arah dan sasaran yang jelas, bukan tidak mungkin masyarakat di bawah akan semakin kehilangan kepercayaan dan pada akhirnya akan menempuh upaya-upaya ekstrem untuk mengubah keadaan.

Dalam konteks ini, para pemimpin nasional perlu sering bertemu untuk merumuskan “pangkalan-pangkalan pendaratan” bagi pengembangan masyarakat bangsa ke depan. Perlu kecerdasan yang lebih untuk menentukan mana yang esensial dalam kehidupan bangsa yang harus dijaga dan mana yang bisa dikelola secara taktis. Perlu kebesaran jiwa untuk tidak menanggapi wacana dan isu-isu yang tidak penting, karena isu seperti itu akan hilang dengan sendirinya. Toh pada akhirnya masyarakat luas akan tahu siapa sebenarnya

pemimpin mereka dan siapa yang hanya sibuk dengan kepentingan sendiri dan kelompoknya.[]

Menjaga Visi Nasional: Soal Khilafah, Pancasila dan NKRI

Pengantar

Di zaman di mana segala sesuatu bisa dijadikan komoditas, menarik apa yang dikatakan mantan Presiden Rusia Vladimir Putin: “Jika kita kehilangan patriotisme, kebanggaan dan martabat nasional, kita tidak akan pernah bisa menjadi bangsa yang mampu menghasilkan hal-hal yang besar”. Dan dengan itu semua, Putin mampu menunjukkan kepada dunia bahwa di bawah kepemimpinannya Rusia bisa bangkit kembali menjadi salah satu kekuatan hegemonik dunia dengan menghasilkan

berbagai hal besar yang membuat bangsa Rusia bisa melupakan kehancuran Uni Soviet.

Komodifikasi, penciptaan isu-isu dan *trends*, merupakan salah satu ciri yang melekat dalam dinamika masyarakat kapitalistik dewasa ini. Di antara yang bisa disebutkan adalah isu terorisme, aliran sesat, perbincangan tentang khilafah, dan sebagainya.

Di satu sisi, bagi yang melihat secara seksama, tentu isu itu diciptakan bukan untuk memperkaya khazanah pemikiran sosial dan keagamaan. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih mendasar dari sekadar isu itu dan kita sering tidak sabar untuk memikirkannya.

Bagi kalangan *Ahlus Sunnah wal Jamaah*, khususnya warga Nahdlatul Ulama di Indonesia, setiap isu tentu akan dilihat relevansinya dengan tradisi pemikiran yang sudah mapan dan urgensinya bagi kemaslahatan masyarakat dalam arti luas. Jika kedua hal itu tidak bisa ditemukan maka isu itu akan dipandang sebagai isu belaka yang tidak akan membawa perubahan penting dalam kehidupan masyarakat.

Khilafah dan Urgensi Kepemimpinan Umat

Khilafah atau *imamah* dalam pengertian kepemimpinan umat (masyarakat) sebenarnya merupakan sesuatu yang disepakati ulama sebagai keharusan (kewajiban dasar agama) karena tanpa ada kepemimpinan, ajaran Islam tidak bisa dilindungi dan dilaksanakan dengan bebas, serta kemaslahatan umum tidak bisa ditegakkan. Karena itu, khilafah disebut dengan *al-imamah al-uzhma* (kepemimpinan besar) sebagai bandingan kepemimpinan dalam salat yang disebut sebagai *al-imamah as-shughra* (kepemimpinan kecil).

Menurut Prof Diyauddin ar-Rais dalam bukunya *al-Islam wal Khilafah fil 'Ashr al-Hadits* (1972), pandangan seperti itu telah menjadi konsensus (*ijma*) di kalangan ulama *Ahlu Sunnah wal Jamaah* baik dari kalangan imam mazhab (Hanafi, Maliki, as-Syafi'i dan Hanbali) maupun para pemikir Islam yang lain seperti al-Mawardi, al-Juwaini, al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan sebagainya. Pendeknya, seperti dikatakan Hamilton AR Gibb (1962), khilafah diterima tanpa pertanyaan sebagai pemegang wewenang tertinggi dalam urusan-urusan keduniaan.

Namun dalam perkembangan pemikiran Islam pasca Abad Pertengahan, gagasan tentang khilafah mengalami ideologisasi yang kental sejalan dengan datangnya kolonialisme Barat di dunia Islam. Ide khilafah yang semula bersifat terbuka, kemudian menjadi demikian tertutup. Khilafah oleh pemikir seperti al-Maududi kemudian dirumuskan sebagai pemerintahan Islam berdasarkan al-Quran dan Hadis. Jadi khilafah lebih ditempatkan sebagai institusi simbolik dan normatif.

Para ulama dan pemikir Islam Abad Pertengahan merumuskan khilafah dalam aspek fungsionalnya, yaitu keberadaannya dianggap sebagai keharusan karena tanpa ada kepemimpinan (negara dan pemerintahan) maka kebebasan umat untuk menjalankan ajaran agama tidak bisa dilindungi dan difasilitasi. Demikian juga keadilan dan kemaslahatan umum akan sulit diwujudkan karena tanpa kepemimpinan situasi yang berkembang adalah kekacauan (*faudla*).

Sementara para pemikir Islam seperti al-Maududi dan Hasan al-Banna lebih menitik beratkan khilafah dalam aspek simbolik dan normatifnya. Khilafah dirumuskan sebagai manifestasi

perlawanan politik-struktural (*counter-hegemony*) dan moral-kultural (*counter-discourse*) terhadap Barat.

Ideologisasi Islam dalam manifestasi pemerintahan berbentuk khilafah itu kemudian ditentang oleh pemikir seperti Ali Abd ar-Raziq. Menurutnya, seperti dikatakan Binder dalam bukunya *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies* (1988), bentuk pemerintahan merupakan preferensi bebas manusia berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasio. Dalam jangka panjang, ar-Raziq bahkan sangat optimistis bahwa akal manusia dan kondisi alamiah kehidupan manusia akan membawa mereka kepada bentuk pemerintahan demokratis, paling tidak ada perubahan-perubahan penting yang menjadi prakondisi krusial bagi terbentuknya negara rasional.

Dalam perkembangan pemikiran politik Islam dewasa ini, yang dominan berkembang tentang khilafah adalah pemikiran model al-Maududi di atas. Menghadapi Barat yang sangat hegemonik, Islam dihadirkan sebagai ideologi alternatif sebagai jawaban atas kemunduran masyarakat disebabkan

westernisasi dalam hampir segala bidang kehidupan, sekaligus sebagai upaya membangkitkan kembali kejayaan Islam yang pernah diraih di masa lalu.

Menghadirkan Islam sebagai ideologi yang diinstitutionalisasi dalam sistem politik seperti khilafah sebenarnya merupakan sesuatu yang absurd dari sudut pandang nalar maupun fakta kesejarahan itu sendiri. Menjadikan Islam sebagai ideologi sebenarnya merupakan wujud dari cara berpikir yang terjebak dalam apa yang disebut sebagai *overclaim*. Agama diasumsikan akan bisa menyelesaikan dan menjawab semua masalah yang dihadapi masyarakat, baik masalah ekonomi, keuangan, penyakit, gaya hidup, kelangkaan pangan, dsb. Pemikiran seperti ini dengan sendirinya penuh dengan apologi dan rasionalisasi.

Overclaiming menyebabkan kita kehilangan ruang bersama untuk saling berbagi dan berdialog secara sehat, menutup kemungkinan suatu pola kehidupan bersama yang bersifat saling melengkapi (komplementer). Pola kehidupan masyarakat menjadi sangat monolitik dan saling berhadapan.

Ideologisasi Islam atau menjadikan Islam sebagai ideologi alternatif juga akan membawa masyarakat ke arah disintegrasi. Bagaimanapun, menjadikan Islam sebagai ideologi, dengan sendirinya akan menempatkan masyarakat dari pemeluk agama berbeda sebagai warga negara kelas dua. Dalam sebuah masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia, kita tidak mungkin menjadikan agama sebagai suatu ideologi, karena akan ada aspek tertentu dari suatu agama yang tidak bisa diterima oleh pemeluk agama lain, padahal ideologi berfungsi menyatukan dan menggerakkan seluruh aspirasi masyarakat bangsa.

NKRI dan Pandangan Nasional Ulama Kita

Merujuk kepada pemikiran ulama *Ahlu Sunnah wal Jamaah* abad pertengahan dan dengan memahami secara utuh fakta dan nilai-nilai masyarakat Nusantara yang sudah ada, ulama-ulama kita terdahulu, terutama yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama, telah merumuskan suatu pandangan nasional yang utuh tentang Indonesia sebagai entitas politik dan keagamaan.

Pertama, pada tahun 1935, tepatnya pada Mukhtar ke-11 di Banjarmasin, 8-12 Juni 1935,

para ulama NU memutuskan bahwa wilayah Hindia Belanda (Nusantara) – meski berada di bawah kekuasaan pemerintahan non-muslim – adalah “wilayah Islam” atau “negeri Islam” (*dar Islam*), tetapi bukan negara Islam (*darul Islam*). Wilayah Islam adalah sebuah negeri di mana umat Islam diberi kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya. Sedangkan negara Islam adalah negara yang berdasarkan (ideologi) Islam secara formal dan dipimpin oleh seorang penguasa muslim.

Menurut KH A Muchit Muzadi dalam bukunya *NU dan Fiqih Kontekstual* (1994), keputusan tersebut diambil karena ada pertanyaan tentang status jenazah yang ditemukan di kawasan Nusantara. Dengan keputusan bahwa Nusantara adalah wilayah Islam, maka kalau ada jenazah yang ditemukan di seluruh pelosok Nusantara dan identitasnya tidak jelas muslim atau tidak, maka harus diperlakukan sebagai muslim.

Dengan demikian, ulama NU telah memberi **status teologis** bumi Nusantara sebagai wilayah Islam, karena itu jika ada serangan dari luar, maka umat Islam wajib mempertahankan kedaulatan negaranya.

Kedua, kiai-kiai dan konsul NU atas perintah KH Hasyim Asy'ari berkumpul di Surabaya pada tanggal 21-22 Oktober 1945. Pertemuan itu dimaksudkan untuk merespons kedatangan pasukan Sekutu dan Belanda di Indonesia. Hal utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah bagaimana status Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang telah diproklamasikan oleh Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945? Dalam pertemuan tersebut ulama-ulama dan konsul NU sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah sah secara fiqih. Karena itu umat Islam wajib mengangkat senjata untuk mengusir penjajah demi mempertahankan kemerdekaan Republik. Keputusan itu kemudian dikuatkan oleh Keputusan Muktamar ke-16 NU di Purwokerto Jawa Tengah yang berlangsung pada 26-29 Maret 1946.

Dengan keputusan tersebut, ulama NU telah memberi **status fiqih** terhadap NKRI sebagai negeri Islam dan ideologi nasional Pancasila merupakan pengikat dan sekaligus penggerak seluruh kekuatan dan aspirasi masyarakat bangsa,

dan ideologi itu keberadaannya tidak bertentangan dengan fiqih (hukum agama).

Ketiga, pada tahun 1984, tepatnya pada Mukhtamar ke-27 di Situbondo, Jawa Timur, ulama-ulama NU memutuskan menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Penerimaan itu menjadi tidak aneh karena bagi ulama NU, kaum muslimin (melalui para pemimpinnya seperti KH A Wahid Hasyim dan KH Masykur) ikut aktif dalam perumusan dan kesepakatan tentang dasar negara itu, serta karena nilai-nilai yang dirumuskan menjadi dasar negara itu dapat disepakati dan dibenarkan menurut pandangan Islam. Pancasila sebagai dasar negara tidak bertentangan dengan Islam dan tidak perlu dipertentangkan.

Nahdlatul Ulama yang berhaluan pada akidah dan syariah Islam menurut faham *Ahlu Sunnah wal Jamaah* sejak semula menerima Pancasila menurut bunyi dan makna yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 (*bilafdzi wa ma'na al-murad*), dengan rasa tanggung-jawab dan tawakkal kepada Allah serta mengharap ridha-Nya, berketetapan menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi. Demikian keputusan resmi NU dalam mukhtamar tersebut (PBNU, 1985).

Dengan demikian, ulama-ulama NU telah memberi **status etis** kepada Pancasila dan NKRI, di mana keduanya adalah warisan dan investasi ulama untuk negerinya, dan kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban moral untuk mempertahankan dan mengembangkannya di masa kini dan mendatang.

Ulama-ulama NU sendiri sebenarnya pernah memperjuangkan berlakunya syariat Islam secara formal dalam kehidupan negara. KH A Wahid Hasyim dalam sidang-sidang BPUPKI misalnya memperjuangkan agar Islam ditetapkan sebagai agama negara dan syarat seorang presiden adalah beragama Islam. Demikian juga dalam sidang-sidang Konstituante tahun 1958-1959, Partai NU memperjuangkan berlakunya syariah dalam undang-undang negara. Namun KH A Wahid Hasyim kemudian menerima Pancasila dan UUD 1945 yang membuang tujuh kata dan Partai NU menerima pemberlakuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan UUD 1945 efektif berlaku kembali.

Sikap mencoba untuk memperjuangkan berlakunya syariah pernah dilakukan, karena

memang demikianlah perintah keagamaan yang harus diikuti. Namun, begitu upaya itu menemui jalan buntu, kenyataan adanya negara nasional sebagai negara damai (*dar as-sulh*) harus diterima dengan penuh kesungguhan. Atas dasar cara berpikir beginilah diikuti kaidah fiqih yang berbunyi “*ma la yutraku kulluh la yutraku julluh*”, yang berarti “apa yang tidak mungkin terwujud seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan bagian terpenting di dalamnya”. Secara keseluruhan, tentu wujud formal negara Islam yang semula diharapkan, tetapi dengan lahirnya Republik Indonesia, harus diterima yang terpenting di dalamnya, yaitu adanya negara yang memungkinkan kaum muslimin menjalankan ajaran agama mereka secara nyata (Abdurrahman Wahid, 1989).

Dengan berdasarkan fakta sejarah dan alasan hukum agama (fiqih) sebagaimana yang dirumuskan oleh ulama-ulama NU itu, saya termasuk orang yang berpendapat bahwa Pancasila dan NKRI sudah final. Pancasila dan NKRI adalah investasi politik ulama untuk masa depan bangsanya, dan karena itu keduanya merupakan kebanggaan Islam dan juga kebanggaan nasional yang menjadi sumber patriotisme seluruh warga bangsa. Segala upaya (keagamaan

maupun politik) yang bertujuan mengganti keduanya bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap perjuangan dan pengorbanan ulama-ulama kita terdahulu yang telah menanamkan nasionalisme dan patriotisme kepada kita semua. Juga patut dianggap sebagai pemikiran dan gerakan separatis yang mengancam keutuhan NKRI, baik di masa ini maupun masa depan.

Penutup

Meski terjadi perbedaan pendapat soal khilafah di antara berbagai kelompok Islam dan komponen bangsa yang lain, saya kira kita tetap harus menghargai keyakinan dan pendapat kelompok lain. Perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di kalangan para pemimpin harus bisa menjadi rahmat bagi masyarakat luas (umat).

Hanya dengan cara pandang seperti itulah, perbedaan pendapat justru akan menjadi kekuatan yang mampu mendinamisasi kehidupan bersama dan mendewasakan pemikiran dan sikap keberagaman semua pihak. Kalau mereka yang berbeda pendapat cenderung memaksakan kehendak, merasa benar sendiri dan menggunakan

cara-cara yang melanggar hukum, maka kita semua jadi mengerti bahwa sesungguhnya yang diperjuangkan itu bukan nilai-nilai, tetapi kekuasaan sebagai jalan untuk mewujudkan perilaku pragmatis dan hedonistik. Kalau sudah demikian, maka tugas negara melalui aparatnya untuk melakukan tindakan tegas demi terwujudnya negara hukum yang efektif, kedamaian dan keadilan bersama. []

Berguru pada Pendiri NU

Banyak kalangan prihatin dengan semakin terseretnya kiai-kiai dalam pusaran arus politik praktis dewasa ini. Bahkan Menteri Agama M Maftuh Basyuni dalam beberapa kesempatan menyerukan agar kiai kembali ke pesantren, sebagaimana militer kembali ke barak.

Menganalogikan politik kiai dengan politik tentara memang kurang tepat. Karena politik kiai secara umum didasarkan dan menyatu dengan doktrin agama, sesuatu yang tidak ada dalam “teologi” tentara. Meski demikian, banyak kalangan sepakat dengan gagasan tentang pentingnya kiai kembali ke pesantren. Bukan karena politik tidak penting, tetapi karena pengembangan pesantren justeru akan lebih menentukan wajah masyarakat dan bangsa di masa depan.

Di sinilah menjadi penting kita belajar politik kepada Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri Pesantren Tebuireng Jombang. Kiai Hasyim adalah sosok kiai yang mampu membangun pesantrennya dan sekaligus tetap mempunyai pengaruh penting dalam kehidupan politik kenegaraan. Sampai saat ini, Kiai Hasyim diakui dan dikenang sebagai ulama besar karena investasi politiknya untuk bangsa, integritas dan warisan keilmuan dan kelembagaan yang abadi.

KH Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama kharismatik yang dihormati masyarakat dan disegani penguasa. Rasa hormat diberikan karena Kiai Hasyim adalah seorang kiai yang luas dan dalam pengetahuan agamanya. Ia seorang ulama dengan pendirian yang tegas dan mengabdikan hidupnya untuk suatu proses transformasi masyarakat secara menyeluruh. Ia juga diakui sebagai ulama besar karena keberhasilannya mendidik santri-santri menjadi tokoh besar di kemudian hari. Seperti ditulis oleh Greg Fealy (2003) menteri-menteri dari unsur NU di masa Presiden Sukarno dan anggota parlemen dari Partai NU sebagian besar adalah santri Kiai Hasyim di Tebuireng.

Lebih dari itu, kebesaran Kiai Hasyim bukan hanya karena ia seorang ulama yang teguh, tetapi juga seorang patriot yang mencintai tanah airnya. Ia tanpa kenal lelah mendidik santri-santrinya menjadi ahli agama sekaligus pejuang bangsa untuk merebut kedaulatan dan kemerdekaan tumpah darahnya. Kiai Hasyim bukan hanya melawan kolonialisme dalam arti militer, tetapi juga kolonialisme kultural. Karena itu ia sempat mengharamkan santri dan masyarakat memakai pakaian yang menjadi kebiasaan kaum penjajah, seperti dasi dan celana.

Seperti ditulis Abdurrahman Wahid dalam bukunya *Bunga Rampai Pesantren* (1978), pada masa perlawanan terhadap pemerintah kolonial kiai dan pesantren secara kultural berfungsi sebagai benteng pertahanan menghadapi penetrasi kebudayaan luar. Fungsi yang demikian menghendaki adanya proses “pemurnian” agama dalam batas-batas tertentu, dimulai dari penonjolan aspek *syara'* (formalisme hukum agama) di pesantren.

Patriotisme dan nasionalisme Kiai Hasyim juga ditunjukkan ketika ia bersama sejumlah kiai memelopori Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Resolusi itu berisi seruan kepada umat Islam untuk

membangkitkan perang suci (jihad) dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dengan mengusir tentara sekutu dan Belanda di belakangnya yang hendak kembali menjajah Indonesia.

Resolusi itu sendiri didasarkan atas fatwa Kiai Hasyim bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan Sukarno-Hatta adalah sah secara fiqih. Dengan demikian, Kiai Hasyim telah memberi status kepada NKRI sebagai negara yang sah di mata hukum agama (fiqih).

Di samping seorang nasionalis, Kiai Hasyim juga bukan sosok yang haus jabatan. Ia tidak pernah tergoda untuk berpolitik praktis. Ketika diberi jabatan oleh Jepang sebagai Kepala Shumubu (Kantor Urusan Agama) misalnya, jabatan itu ia serahkan kepada puteranya, KH A Wahid Hasyim. Jadi Kiai Hasyim hanya menjadi kepala secara *de jure*. Demikian juga jabatan sebagai Ketua Masyumi. Semua urusan politik praktis didelegasikan kepada puteranya, sementara Kiai Hasyim sendiri tetap *istiqamah* berdakwah dan menjadi guru di pesantren. Ia tidak pernah meninggalkan – apalagi melalaikan – tugas utamanya sebagai kiai pesantren.

Kiai Hasyim tidak pernah melarang kiai dan santri-santrinya berpolitik. Ia sendiri memberi contoh bagaimana berpolitik. Namun politik Kiai Hasyim adalah politik makro-strategis. Ia benar-benar melibatkan dirinya dalam urusan politik jika ada situasi darurat yang mengancam kedaulatan bangsa dan kemerdekaan umat untuk menjalankan ajaran agamanya. Dengan demikian, Kiai Hasyim melibatkan diri dalam urusan politik untuk jangka waktu tertentu, sementara urusan politik praktis diserahkan kepada orang lain yang dianggap pas di bidang itu.

Ibarat seorang resi yang hanya turun dari padepokan di atas gunung ketika situasi masyarakat sedang kacau dan membutuhkannya. Kalau situasi sudah normal, maka sang resi akan kembali ber-*khalwat* di padepokannya. Demikian juga Kiai Hasyim. Ia hanya terjun ke dunia politik dalam situasi dan alasan khusus, selebihnya ia kembali ke pesantren mengabdikan hidupnya untuk pendidikan, dakwah dan pemberdayaan umat.

Keberanian untuk menjaga jarak dengan politik praktis menjadikannya tidak pernah kehilangan keawasan dan kebijaksanaan (*wisdom*) untuk memahami persoalan secara menyeluruh dan

mencarikan alternatif solusi yang lebih diterima oleh masyarakatnya.

Benar apa dikatakan KH A Wahab Chasbullah – seperti dikutip Allan A Samson (1978) – Islam dan politik seperti gula dan manisnya. Jika seseorang bisa memisahkan gula dari manisnya, dia akan mampu memisahkan Islam dari politik (*if someone is able to separate sugar from its sweetness, he will be able to separate Islamic religion from politics*).

Namun Kiai Hasyim telah mencontohkan bagaimana cara berpolitik kiai yang efektif tanpa mengorbankan tugas utamanya sebagai pemimpin umat. Dengan demikian, dibutuhkan keawasan, kearifan dan kedalaman wawasan sehingga seorang kiai tahu kapan harus terlibat dalam urusan politik strategis dan kapan harus menarik diri atau menjaga jarak dengan dunia politik.

Itulah KH Hasyim Asy'ari. Seorang kiai besar yang konsisten dan fokus membangun landasan yang kokoh bagi transformasi masyarakat dan bangsa secara luas. Suatu sikap yang mungkin sulit untuk diikuti secara konsisten saat ini, kecuali bagi mereka yang ikhlas dan sungguh-sungguh. []

NU, Transformasi Bangsa dan Demokratisasi

Snouck Hurgronje pernah menyatakan bahwa “Islam tradisional di Jawa yang kelihatannya demikian statis dan demikian kuat terbelenggu oleh pikiran-pikiran ulama abad pertengahan, sebenarnya telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat fundamental. Tetapi perubahan-perubahan tersebut demikian bertahap-tahap, demikian rumit dan demikian dalam tersimpan. Itulah sebabnya bagi para pengamat yang tidak kenal dengan pola pikiran Islam, maka perubahan-perubahan tersebut tidak akan bisa terlihat, walaupun sebenarnya terjadi di depan matanya sendiri, kecuali bagi mereka yang mengamatinya secara seksama”.

Karena tidak memahami tradisi NU secara benar, banyak pengamat kemudian terkecoh dan keliru menilai NU. Pengamat seperti Mochtar Naim, Arnold Brackman, Daniel Lev, Ernst Utrecht, Peter Polomka, Lance Castles dan Leslie Palmier, dan banyak pengamat “modernis” yang lain memberi cap NU sebagai oportunistis, jumud, mistis, dan stigma-stigma lain yang identik dengan keterbelakangan. Mereka tidak mampu melihat perubahan-perubahan sangat fundamental yang dilahirkan dari dinamika internal tradisi NU yang sifatnya bertahap dan di bawah permukaan.

Kenyataan bahwa sampai saat ini NU tetap eksis sebagai “ormas Islam terbesar di Indonesia” dan tetap menjadi tumpuan bagi banyak pemimpin yang ingin merebut atau mempertahankan kekuasaan, merupakan sedikit bukti bahwa NU memiliki daya tahan dan pengaruh luar biasa dalam setiap siklus kehidupan bangsa.

Kekuatan tradisi

NU adalah ormas yang membangun pandangan dunianya di atas kekuatan tradisi Islam dan masyarakat yang ada. Tradisi yang dijaga dan dikembangkan NU secara terus-menerus itu

meliputi tiga aspek. *Pertama*, khazanah peradaban Islam masa lampau (*legacy of the past*). Seperti dikatakan Abdurrahman Wahid (1985), peradaban Islam memiliki kebesaran material yang diwariskan kepada dunia dalam bentuk legasi arsitektur penuh kemegahan (dari Masjid Pualam Biru di Turki hingga ke Taj Mahal di India); keagungan rohani yang dilestarikan dalam kepustakaan yang masih berjuta-juta dalam bentuk naskah tulisan tangan dan belum dicetak, serta dalam tradisi penurunan ilmu-ilmu dan nilai-nilai keagamaan dari generasi ke generasi dengan hasil terpeliharanya kebulatan pandangan hidup kaum Muslimin hingga kini, dan kelengkapan yang ada pada masa lalu peradaban Islam yang dapat digunakan sebagai alat pengembangan peradaban Islam yang baru di masa depan.

Dalam tradisi NU, kebesaran khazanah peradaban Islam itu dilembagakan dalam kitab-kitab fiqh, gerakan tarekat dan dialog terus-menerus dengan realitas dan tradisi masyarakat setempat. Kesemuanya bersifat saling melengkapi sehingga ada dinamika internal yang khas.

Dengan kekayaan seperti itu, tradisi pemikiran NU bisa lebih terbuka, tidak kaku dan mempunyai kemampuan menyerap berbagai manifestasi

kultural, wawasan keilmuan, dan nilai-nilai yang datang dari agama, kepercayaan dan peradaban lain. Dalam konteks demikian, nilai-nilai universal yang lahir dari berbagai peradaban disatukan menjadi prinsip-prinsip dasar kesejahteraan umat (*mabadi khairi ummah*) yang memungkinkan terciptanya harmoni sosial dan kesejahteraan umum.

Kedua, tradisi berpikir fiqih dalam kerangka pemikiran mazhab. NU dikenal sebagai organisasi keagamaan yang secara fiqih berpegang pada salah satu mazhab empat: Hanafi, Maliki, asy-Syafi'i dan Hanbali. Di samping itu NU juga merujuk pada Imam Abu Hamid al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi dalam tarekatnya, serta kepada Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam pemikiran tauhid atau teologinya.

Dengan tradisi keilmuan dan spiritualitas seperti itu, pemikiran dan sikap keberagamaan NU bisa terhindar dari pendekatan yang bersifat kaku, tunggal dan monolitik terhadap teks-teks suci yang juga berpengaruh dalam cara pandang terhadap realitas. Dengan merujuk kepada beberapa mazhab, pluralisme dan sikap toleran terhadap pandangan yang berbeda menjadi sesuatu yang *built in* atau terintegrasi secara utuh dalam tradisi NU.

Tradisi berpikir fiqh memang memungkinkan NU menjadi sangat kosmopolit, dalam arti terbuka dan sekaligus dinamis. Ketika bangsa atau masyarakat menghadapi suatu persoalan misalnya, NU akan bisa lebih arif dan dewasa memberikan solusi dan pemahaman terhadap persoalan itu berdasarkan pemikiran salah satu dari mazhab empat. Dengan sendirinya ada banyak alternatif yang bisa diberikan untuk dijadikan pegangan bersama.

Jika pendapat salah satu atau semua mazhab itu dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman, atau jika fiqh dianggap kurang bisa dijadikan pegangan, maka NU menyediakan jalan keluar melalui teori-teori hukum Islam (*usul al-fiqh*) dan kaidah-kaidah hukum agama (*qawaid fiqhiyyah*). Jadi selalu ada ruang sangga yang menampung dan sekaligus menjadi jawaban dari berbagai macam persoalan, sehingga jalan buntu bisa dihindari dan pemikiran-pemikiran ekstrem bisa dihilangkan. Dan setiap pemahaman dan solusi atas setiap persoalan selalu diorientasikan untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia secara keseluruhan, sebagaimana menjadi tujuan dari diturunkannya ajaran Islam itu sendiri.

Ketika partai-partai Islam sudah menemui jalan buntu dalam mewujudkan Islam sebagai dasar negara (dalam perumusan dasar negara tahun 1945) dan mewujudkan negara Islam (dalam sidang-sidang Konstituante tahun 1958-1959), NU bisa memberi jalan keluar yang diterima semua pihak. Bagi NU, Indonesia sebagai “negara damai” (*dar as-sulh*) harus diterima dengan sungguh-sungguh. Pandangan ini didasarkan kaidah hukum *ma la yutraku kullu, la yutraku julluh* (apa yang tidak bisa diwujudkan seluruhnya, jangan ditinggalkan unsur terpenting yang ada di dalamnya). Indonesia berdasarkan Pancasila melindungi dan memberi kebebasan kepada umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya. Itulah bagian terpentingnya. Sikap NU kemudian yang menerima NKRI berdasarkan Pancasila secara final juga merupakan manifestasi dari penerapan hukum agama (*fiqh*) dalam kehidupan bangsa.

Ketiga, tradisi masyarakat setempat berikut nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya. Dengan kedalaman pemikirannya yang bersumber pada unsur-unsur dinamis dari peradaban Islam di masa lalu, NU bisa berinteraksi secara dinamis dengan tradisi masyarakat yang ada. NU tidak pernah

memurnikan atau membersihkan Islam dari tradisi dan kultur masyarakat sebagaimana gerakan modernisme Islam, karena hal demikian bukan saja bertentangan dengan kosmopolitanisme peradaban Islam, tetapi juga akan membuat keberagamaan menjadi kaku, kering dari nilai-nilai moral dan juga terasing dari sejarah masyarakat.

NU menempatkan Islam sebagai salah satu unsur yang membentuk atau menjadi pilar bangsa bersama-sama agama, kepercayaan dan tradisi lain yang ada di dalam Republik ini. Islam tidak diposisikan menyendiri di luar sejarah, tetapi menjadi bagian yang saling melengkapi (komplementer) bersama yang lain. Di sini ada kerendahan hati dan keterbukaan untuk saling belajar, memberi dan menerima (*take and give*), sehingga dinamisasi kehidupan bangsa menjadi sangat kental dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang bersumber dari struktur dalam masyarakat sendiri.

Transformasi Bangsa

Dengan demikian, anggapan bahwa NU adalah oportunistis, jumud atau mundur sebenarnya merupakan pandangan yang lahir dari penglihatan

sepintas terhadap NU di permukaannya saja. Bukan suatu pandangan yang dalam dan seksama terhadap kekayaan tradisi yang dilestarikan dan dikembangkan oleh NU selama ini.

Semua pemikiran dan sikap sosial atau politik yang dimanifestasikan dalam gerakan NU merupakan produk dari pandangan dunia yang bersumber dari khazanah peradaban Islam, tradisi berpikir serba-fiqih dan juga nilai-nilai luhur yang ada dalam kultur masyarakat setempat di mana NU berkembang di dalamnya. Karena itu, pemikiran dan sikap NU senantiasa memiliki legitimasi keagamaan, keilmuan, moral, dan juga kultural yang memungkinkannya bisa eksis dan mempunyai pengaruh nyata dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini.

Dengan kekayaan peradaban dan tradisi seperti itulah NU bisa tetap menjadi kekuatan utama yang terus mempengaruhi transformasi bangsa dari waktu ke waktu. Dan itu hanya bisa dipahami dan dilihat oleh mereka yang mampu membaca kedalaman tradisi NU dan dinamikanya secara sungguh-sungguh dan seksama.

Demokratisasi Bangsa

Demokratisasi politik di Indonesia pasca Orde Baru berjalan sangat cepat, bahkan mungkin paling cepat di antara negara-negara berkembang. Indonesia hanya butuh waktu lima tahun untuk menerapkan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Demikian juga dalam penerapan prosedur-prosedur standar demokrasi modern yang lain.

Namun, proses demokratisasi itu bukan tanpa persoalan. Ada paradoks yang nyata di mana demokrasi prosedural jauh lebih menonjol ketimbang demokrasi substansial. Prosedur-prosedur dan simbol demokrasi memang bisa dibangun dengan cepat, tetapi kultur demokrasi tidak tumbuh semestinya. Penyampaian aspirasi dengan jalan kekerasan dan memaksakan kehendak justeru marak terjadi. Penghormatan terhadap perbedaan keyakinan juga mengalami kemunduran.

NU sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia telah memainkan peran penting dalam proses demokratisasi bangsa. Sesuai dengan tradisinya yang mengakar secara kuat pada peradaban Islam di masa lalu dan kultur masyarakat

yang ada, demokratisasi yang dimainkan dan disumbangkan NU selalu bersifat menyeluruh di mana prosedur dan substansi, norma dan nilai, berjalan seiring saling melengkapi.

Karena itulah, meski di permukaan terlihat tidak terlalu menonjol, namun proses demokratisasi yang lahir dari NU bersifat menyentuh kesadaran total masyarakat sehingga demokrasi tidak sekadar menjadi “gaya hidup”, tetapi juga sarana untuk mewujudkan kemuliaan hidup.

Pilar-pilar Demokrasi NU

Nilai-nilai dan kultur demokrasi di NU bersumber pada tiga pilar utama yang menjadi inti pandangan dunia NU itu sendiri. *Pertama*, cara berfikir keagamaan yang serba fiqih. Di dalam fiqih, agama ditafsirkan dari berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan rumusan mazhab yang berbeda. Jadi perbedaan pendapat merupakan salah satu inti dari pemikiran fiqih, sesuatu yang melekat (*built in*) dalam tradisi NU.

Lebih dari sekadar perbedaan pendapat, tradisi fiqih juga mengajarkan bagaimana melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Tradisi ini menghindarkan kita dari sikap kaku dan hitam putih

dalam melihat masalah. Dan tujuan utama dari cara berpikir multi-dimensi ini adalah agar kita bisa sampai pada tujuan akhir dari diturunkannya agama, yaitu mewujudkan kemaslahatan.

Kedua, karena hakikat fiqh adalah melihat dan memahami masalah dari berbagai sudut pandang, maka dengan sendirinya ada kultur di mana ulama yang satu dengan yang lain saling menghargai pendapat dan perspektif masing-masing. Dalam tradisi fiqh ada kultur saling menghargai dan menghormati pendapat atau keyakinan yang berbeda.

Ketiga, cara pandang tasawuf atau tradisi *thariqah* yang melekat dalam tradisi spiritualitas NU. Kalau fiqh merupakan cara berpikir yang mengedepankan dimensi rasionalitas manusia yang bersifat menyeluruh, maka tasawuf melihat manusia dari dimensi spiritualitas. Melihat dengan hati yang bersih.

Simak misalnya bagaimana beberapa kiai NU menjadi pengayom mereka yang secara fiqh mungkin dikategorikan sebagai orang yang melanggar syariat. Namun kiai-kiai itu tetap bersama mereka karena sang kiai melihat bahwa di hati para “pelanggar syariat” itu masih ada iman, ada keyakinan pada Allah SWT, ada niat untuk

memperbaiki diri. Kiai yang masuk kategori ini misalnya (alm) KH Hamim Djazuli Ploso Kediri atau yang akrab di panggil Gus Miek. Selain memimpin seaman al-Quran dan jamaah *Dzikrul Ghofilin* (pengingat mereka yang lupa), Gus Miek juga akrab dengan dunia malam seperti diskotik dan semua “jamaah”-nya. Ada juga KH Suady Wijaya Kajoran Magelang. Gus Suad, demikian ia biasa dipanggil, selain memimpin jamaah mujahadah Sapu Jagad, juga dekat dengan para preman, penyabung ayam dan orang-orang jalanan.

Kelihatannya itu peran yang kontradiktif. Tetapi sebenarnya tidak. Meminjam istilah Gus Dur (1993), di kedua wilayah itu sang kiai sebenarnya berperan sama: memberikan kesejukan kepada jiwa yang gersang, memberikan harapan kepada mereka yang putus asa, menghibur mereka yang sedih, menemani mereka yang lemah, dan pada akhirnya mengajak mereka kepada kebaikan.

Spiritualitas seperti itu bisa dicapai karena tradisi pemikiran NU, menurut Gus Dur, selalu berpegang kepada sejumlah kaidah hukum agama yang membawakan tatanan masyarakat yang ideal. Kaidah akan pentingnya memelihara keselamatan umat yang dipimpin. Kaidah akan pentingnya

mencapai cita-cita secara bertahap. Kaidah akan pentingnya perlindungan kepada pihak lain yang lemah. Kaidah akan pentingnya persaudaraan antar-manusia ditegakkan dengan segala upaya. Sikap seperti itu mampu mengembangkan sebuah dimensi lain dalam situasi keagamaan warga NU: kecintaan dan kasih sayang mengatasi perbedaan, apapun perbedaan antar-manusia yang terdapat.

Demokratisasi Berbasis Tradisi

Dengan pandangan dunia seperti itu, NU akan senantiasa membuka jalan bagi proses perubahan dan demokratisasi masyarakat dengan basis tradisinya yang kokoh. Demokratisasi dalam perspektif tradisi NU adalah sebuah proses pembangunan tata sosial politik yang humanistik di mana seseorang dihargai dan dihormati karena memiliki keyakinan atau aspirasi berbeda. Demokratisasi adalah salah satu cara bagaimana suatu sistem sosial dan politik menghormati hak-hak kemanusiaan dan kemuliaan yang melekat di dalamnya.

Namun demikian, demokrasi hanyalah sebuah cara atau alat – bukan tujuan akhir – untuk memuliakan manusia dengan segala potensi, keyakinan dan aspirasi yang dimilikinya. Kalau hanya demo-

krasi yang bisa menjadi sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sesuai dengan kaidah fiqih bahwa “sesuatu yang tidak bisa diraih kecuali tanpanya, maka sesuatu itu menjadi wajib” (*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*), maka menegakkan demokrasi merupakan bagian dari ajaran agama yang mulia.

Karena demokrasi hanya merupakan sarana, maka kita tidak boleh terkecoh dengan simbol-simbol atau prosedur demokrasi. Kalau kita sudah terkecoh, maka akan seperti orang membangun pos Siskamling yang indah dengan fasilitas TV, tetapi kesadaran untuk ronda malam tidak ada, sehingga pos siskamling itu akan sia-sia.

Tradisi NU mengajarkan kepada kita bagaimana membangun demokrasi yang bersifat menyeluruh, di mana simbol-simbol dan prosedurnya ditegakkan di atas kesadaran dan kultur sosial-keagamaan yang luhur. Sebuah proses pembangunan politik multi-dimensi, di mana politik diorientasikan untuk memuliakan manusia dan mewujudkan kesejahteraan mereka sebagaimana diajarkan oleh agama. []

PKB, Kiai dan Tradisi NU

Salah satu penggalan sejarah dari perjalanan bangsa ini adalah lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang difasilitasi para kiai dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ya..., PKB menjadi satu-satunya partai politik yang lahir dari NU dan dimaksudkan sebagai alat perjuangan para kiai untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa. Dan setelah “melahirkan” PKB, NU tidak pernah melahirkan “bayi” lain, sehingga PKB menjadi “anak tunggal” NU secara biologis dan sekaligus ideologis.

Oleh para kiai dan pemimpin NU, PKB dirancang sebagai partai dengan visi dan pemikiran terbuka yang sepenuhnya mewakili dan mewarisi tradisi NU yang berbasis pada peradaban ilmu kalam, fiqih, tasawuf yang tertanam kokoh dan berkembang

subur sejak ribuan tahun yang lalu. Kompleksitas pengetahuan yang dimiliki itu memungkinkan NU mampu mengembangkan diri secara terus-menerus, berdialog dengan berbagai tradisi dan budaya, serta melahirkan sintesis baru yang menjadi sumber identitas masyarakat serta pangkalan dinamisasi bagi kehidupan bersama. PKB sepenuhnya mewarisi dan mengembangkan tradisi besar itu karena PKB adalah NU di jalur politik.

Sebagai pewaris dan penjaga tradisi besar NU, PKB senantiasa membangun jalan dan sikap politiknya sesuai dengan pandangan dunia NU. Pertama, dalam masalah ideologi negara, PKB melanjutkan dan terus mengawal keputusan besar NU yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila adalah final. Tidak perlu lagi upaya-upaya politik untuk mengganti bentuk negara kesatuan dan dasar negara. Dengan begitu, PKB bisa fokus menjalankan agenda-agenda politik yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Sebagaimana NU pada Muktamar ke-27 memutuskan untuk berasaskan Pancasila, demikian juga PKB. Bagi PKB, keinginan untuk mengganti asas

Pancasila dengan agama, seperti yang dilakukan sejumlah kalangan, bukan saja mengurangi kebesaran dan keluhuran nilai agama Islam, karena itu berarti mensejajarkan Islam dengan ideologi sekular lain. Lebih dari itu, upaya mengganti asas Pancasila atau mengganti dasar negara adalah bentuk tidak adanya rasa hormat dan penghargaan terhadap perjuangan dan pemikiran ulama di masa lalu yang telah ikut merumuskan Pancasila dan dasar-dasar kehidupan bernegara.

Kedua, sikap dan jalan politik PKB senantiasa bersumber dari tradisi besar NU yang berusaha mencari rumusan pengembangan diri secara terus menerus melalui dialog berkesinambungan dengan nilai-nilai baru dan aspirasi dari kelompok lain berdasarkan prinsip keseimbangan (*tawazun*), sikap moderat (*tawasuth*) dan dijiwai oleh semangat untuk menghargai perbedaan (*tasamuh*). Dikuatkan oleh kaidah fiqih bahwa “sesuatu yang tidak dapat kita gapai seluruhnya, jangan di tinggalkan bagian terpenting yang bisa diambil” (*ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh*), maka politik PKB selaku berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*) dan kebersamaan (*ukhuwwah*), sekaligus menjadi kekuatan penyeimbang dari

berbagai perbedaan aspirasi politik dan ideologi di antara partai-partai politik dan kelompok kepentingan yang ada.

Dengan demikian, sikap kritis yang ditunjukkan PKB selama ini atau dukungan yang diberikan terhadap kebijakan pemerintah, tidak bisa dilihat secara akademis dari cara pandang oposisi atau partai pamerintah, karena pandangan demikian bukan hanya keliru, tetapi juga tidak mencerminkan pandangan dunia yang dikembangkan PKB selama ini. Sikap demikian harus diletakkan dalam perspektif tradisi besar NU di mana keseimbangan, kebersamaan dan kemaslahatan senantiasa menjadi pusat orientasi pemikiran dan gerakan yang dibangun.

Dengan modal sejarah, pengetahuan dan sosio-kultural seperti itu, insya Allah PKB akan tetap eksis sebagai partai besar yang senantiasa menjaga dan mengembangkan tradisi NU yang diorientasikan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat seluas-luasnya.

Dengan demikian, politik PKB adalah ikhtiar-ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan, harmoni sosial dan kemajuan menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat bangsa. Kalau untuk

mewujudkan tujuan-tujuan itu dibutuhkan secara niscaya adanya infrastruktur politik atau jabatan-jabatan tertentu dalam struktur kekuasaan, maka infrastruktur dan jabatan itu adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan akhir itu sendiri. Kalau tanpa infrastruktur dan jabatan itu maka tujuan-tujuan yang dimaksud tidak bisa dicapai, sesuai dengan kaidah fiqih bahwa “sesuatu yang di mana hal yang wajib hanya bisa diwujudkan dengan sesuatu itu, maka itu menjadi wajib” (*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*), maka infrastruktur dan jabatan itu menjadi sesuatu yang wajib untuk diwujudkan. Namun tetap dipahami bahwa meski wajib, infrastruktur dan jabatan itu tetaplah sarana atau jalan untuk mencapai tujuan.

Dibutuhkan kecerdasan untuk merestrukturisasi pandangan dunia para kiai dan NU dalam kaitan dengan proses pembentukan Republik ini berikut ideologisasi di dalamnya, sehingga tersajikan dengan jelas di depan kita bahwa dalam Republik ini ada saham yang sangat besar yang diinvestasikan oleh para ulama dan NU di masa lalu. Kita bukan saja berkewajiban secara moral untuk menjaga saham yang sudah diinvestasikan itu, tetapi juga dituntut untuk terlibat secara aktif dalam politik

pengelolaan negara. Dan politik PKB hari ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga saham itu, agar Republik ini tidak diprivatisasi atas nama agama ataupun liberalisme. []

Wawancara Khusus

Sejak lama Ketua Umum DPP PKB, A Muhaimin Iskandar, sering difitnah dan dituduh dengan berbagai hal. Berbagai upaya dilakukan untuk mendelegitimasi kepemimpinannya.

Berikut adalah wawancara khusus editor dengan Ketua Umum DPP PKB itu yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, yang dilakukan di berbagai kesempatan. Wawancara ini dilakukan menjelang Pemilu Legislatif 2009 yang lalu. Topik utama wawancara adalah soal tuduhan mencuri jabatan, tuduhan mendzalimi Gus Dur, larangan pemasangan gambar Gus Dur pada Pemilu 2009 dan soal konflik di PKB sendiri.

Dituduh Mencuri Jabatan

Dalam beberapa kesempatan, Gus Dur berulang kali menuduh Cak Imin dan juga orang-orang di sekitarnya mencuri jabatan Ketua Umum DPP PKB?

Ah biasa *aja*, itu mungkin reaksi spontan karena sedikit emosi. Jadi tidak perlu ditanggapi secara serius atau dimasukkan hati.

Tapi faktanya Gus Dur sering bilang begitu..

Ya biar saja. Apakah bisa dibuktikan bahwa saya mencuri jabatan? Tidak, bukan? Posisi saya sebagai Ketua Umum DPP PKB bukan hasil *ghasab* atau mencuri, tetapi keputusan forum tertinggi di PKB, yaitu Muktamar II di Semarang tahun 2005 yang lalu. Itu amanah yang harus saya jaga, karena kiai-kiai, DPW-DPW dan DPC-DPC PKB telah memilih saya sebagai Ketua Umum DPP PKB.

Itu sebabnya Cak Imin menolak mundur ketika Gus Dur memintanya?

Ya.. Saya diperintahkan kiai-kiai untuk tidak mundur justeru untuk menghormati dan menjaga amanah wilayah dan cabang-cabang yang telah memilih saya. Dan yang tidak kalah pentingnya

adalah, karena saya ingin menghormati dan menegakkan AD/ART Partai dan juga *akhlaq* politik. Itu berarti saya tidak mundur justeru karena sangat menghormati Gus Dur, karena Gus Dur adalah orang yang sangat menjunjung tinggi hukum dan fatsun politik.

Maksud Cak Imin?

Ada beberapa hal yang perlu saya jelas di sini sejelas-jelasnya. *Pertama*, karena permintaan mundur itu jelas-jelas bertentangan dengan AD/ART PKB. Ketua Umum hanya dapat diberhentikan melalui Mukhtamar. Forum yang digunakan untuk meminta saya mundur, yaitu forum Rapat Gabungan, juga tidak tepat. Jadi permintaan itu salah dari segi substansi hukum, juga keliru dari segi prosedur hukum.

Yang *kedua*, kalau sikap melawan hukum dan aturan main terus dibiarkan di PKB, maka partai ini akan semakin rusak. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan para kiai telah mewariskan partai ini (PKB) kepada kita semua, jadi kita semua harus menjaganya dan membesarkannya dengan semangat penuh khidmat dan perjuangan sebagaimana dicontohkan para ulama NU di masa lalu.

Tapi kenapa Cak Imin terus dituduh mencuri jabatan?

Saya *ndak* tahu, tanya saja kepada yang suka menyebarkan tuduhan itu. Saya jadi ingat dulu, Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari dalam *Qanun Asasy* pernah menyatakan: “Masuklah rumah melalui pintunya, barangsiapa memasuki rumah tidak melalui pintunya, maka ia adalah pencuri.”

Saya memasuki rumah atau memegang jabatan sebagai Ketua Umum PKB melalui satu-satunya pintu yang sah, yaitu Muktamar. Justeru kalau ada orang menjadi ketua umum tanpa Muktamar, maka dialah yang disebut pencuri jabatan.

Ada kesan Cak Imin melawan Gus Dur..?

Sama sekali tidak. Bagaimanapun Gus Dur adalah guru saya. Gus Dur juga sudah saya anggap sebagai orang tua saya. Jadi hanya orang yang tidak tahu lah yang punya kesan seperti itu, dan terhadap orang yang tidak tahu tugas kita adalah memberi tahu dan memaafkan kekhilafannya.

Saya jadi ingat sebuah riwayat dalam kitab *Tarikh Kabir* yang ditulis oleh Imam Thabari, di situ diceritakan setelah Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah, beberapa sahabat dari Bani Hasyim tetap

tidak mau mendukung kepemimpinannya. Mereka sering menggunakan rumah Fatimah, puteri Nabi, untuk merencanakan sesuatu. Umar bin Khattab kemudian pergi ke rumah Fatimah dan berdiri di pintu sambil berkata: “Hai, Puteri Nabi! Demi Allah aku bersumpah bahwa kami mencintaimu melebihi segalanya. Tapi jika rumahmu terus dipakai sebagai tempat pertemuan orang-orang yang berkomplot, maka aku akan membakar rumah ini..!”

Saya dan teman-teman di PKB tidak pernah sekeras itu, apalagi sampai melawan Gus Dur. Apakah ada orang pernah membaca berita di mana saya menyatakan sesuatu yang sifatnya melawan Gus Dur? Tidak pernah sama sekali. Meskipun Gus Dur kadang-kadang menyerang saya, saya tetap hormat kepada beliau. Bagi saya itulah cara Gus Dur melatih mental perjuangan dan kepemimpinan anak-anak muda.

Dituduh Men-*dzalimi* Gus Dur

Beberapa waktu yang lalu, di sejumlah media Gus Solah menyatakan bahwa Gus Dur di-dzalimi dalam masalah pencalegan di PKB. Bagaimana komentar Cak Imin?

Ya Gus Solah berbicara seperti itu karena belum mengerti persoalan yang sebenarnya. Tapi setelah saya jelaskan akhirnya ia bisa memahami.

Bagaimana sebenarnya persoalannya?

Perlu diketahui bahwa begitu Mahkamah Agung memenangkan gugatan saya dan memutuskan bahwa saya adalah Ketua Umum DPP PKB yang sah, saya langsung membentuk tim *islah* yang diketuai oleh Muhyidin Arubusman, agar proses pencalegan bisa dilakukan satu pintu. Namun upaya *islah* itu terus gagal dan digagalkan.

Kok bisa demikian?

Ya, upaya *islah* itu gagal karena: (1) terhambat oleh permintaan atau syarat pemecatan kembali Sekjen Lukman Edy. Permintaan ini saya kira tidak realistis dan tidak bisa dipaksakan. (2) Upaya pencalegan bersama yang dipimpin Muhyidin Arubusman cs waktu itu hampir berhasil, tapi tiba-tiba dibubarkan Gus Dur. (3) di Pengadilan Jakarta Pusat hingga hari ini masih ada tahap mediasi, tapi juga terhambat karena tuntutan *islah*-nya adalah pemecatan kembali Lukman Edy dan beberapa pengurus lainnya.

Jadi pertanyaan saya siapa yang sebenarnya men-*dzalimi*? Kamilah yang sebenarnya terus-menerus di-*dzalimi*. Saat ini, satu-satunya cara mengganti pengurus adalah hanya dengan mengundurkan diri, bukan dengan pemecatan.

Katanya dulu PKB hampir gagal sebagai peserta pemilu 2009?

Betul. Dua kali PKB terancam tidak bisa ikut pemilu. *Pertama*, waktu itu Yenny sebagai Sekjen tidak mau tanda tangan pendaftaran administratif PKB sebagai peserta pemilu. Tapi *alhamdulillah* akhirnya KPU menganggap tanpa itu sah. *Kedua*, permintaan agar berkas caleg harus ditanda-tangani oleh Ketua Dewan Syura. Kalau caleg harus disertai tanda Ketua Dewan Syura, dapat dipastikan proses pencalegan akan sangat rumit, karena sekian banyak caleg dari kader-kader PKB bisa dipecat/dibuang tanpa alasan yang jelas.

Apa yang Cak Imin lakukan setelah KPU memutuskan bahwa berkas caleg cukup ditanda-tangani oleh Ketua Umum dan Sekjen?

Saya langsung membuka pintu seluas-luasnya kepada semua kader PKB untuk bergabung dan mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif.

Mereka yang selama ini mendukung PKB Parung tetap saya dorong untuk maju sebagai calon wakil rakyat. Effendy Choirie dan kawan-kawan yang mendukung PKB Parung itu tetap kita tempatkan di nomor jadi. Dan ketika memakai sistem suara terbanyak, semua calon berada di nomor jadi.

Jadi sebagai Ketua Umum PKB, saya sudah cukup mengalah dan tidak pernah menang-menangan. Karena bagi saya sikap mau menang sendiri tidak mencerminkan nilai-nilai dan kultur NU yang menjunjung tinggi perbedaan. Justeru perbedaan politik itulah yang selama ini membuat partai ini tetap dinamis dan semakin matang.

Soal Larangan Memasang Gambar Gus Dur

Pada masa kampanye pemilu legislatif, Gus Dur melarang gambarnya dipasang untuk berkampanye caleg-caleg PKB. Bagaimana tanggapan Cak Imin?

Pertama, saya tidak mendengar langsung pernyataan itu dari Gus Dur, saya hanya tahu lewat media. Jadi saya menduga itu bukan dari Gus Dur, tapi dari orang-orang di sekelilingnya.

Kedua, walaupun itu datang dari Gus Dur, saya tetap ber-*husnu dzan*, berprasangka baik bahwa itulah cara Gus Dur mendidik kader-kader PKB untuk menjadi kader yang mandiri tanpa tergantung pada satu figur saja. Kalau tergantung pada figur, maka begitu figur itu sudah tidak ada, maka akan repotlah kita semua.

Apa alasan Cak Imin berpendapat seperti itu?

Bangsa ini, termasuk PKB, mau tidak mau akan memasuki masa transisi kepemimpinan nasional selambat-lambatnya pada 2014 nanti. Bisa dipastikan pada 2014 nanti transisi itu tidak mungkin dihindari.

Kok bisa begitu?

Ya karena pada tahun 2014 nanti tokoh-tokoh seperti Megawati, Gus Dur, Amien Rais, Wiranto dan SBY sudah bisa dikatakan terlalu tua untuk menjadi presiden. Jadi periode 2009 – 2014 ini benar-benar masa transisi bagi kepemimpinan nasional kita.

Apa hubungannya dengan Gus Dur yang melarang pemasangan gambar dia untuk kampanye PKB?

Saya katakan tadi, belum tentu Gus Dur benar-benar melarang, karena beliau *kan* orang yang dihormati di PKB. Memasang gambar Gus Dur merupakan bentuk penghormatan terhadapnya.

Kalau lah Gus Dur benar-benar melarang, menurut saya, itulah cara Gus Dur menyiapkan PKB dan seluruh kader-kadernya agar benar-benar siap menuntaskan masa transisi kepemimpinan nasional ini untuk menghadapi 2014 dalam kondisi mental yang benar-benar matang dan teruji.

Jadi konflik di PKB saat ini merupakan persiapan menuju transisi itu?

Biasa dikatakan demikian. Karena PKB dan seluruh kader-kadernya harus siap menghadapi dan menuntaskan masa transisi ini, baik transisi figur maupun transisi kelembagaan atau sistem. Sehingga pada masa 2009 – 2014 ini, PKB bisa membangun sistem kepartaian yang kokoh dan melahirkan kader-kader muda yang siap, matang dan berani.

Apakah cara pandang seperti itu sudah Cak Imin sampaikan kepada kader-kader PKB yang lain?

Sudah *dong*. Dalam setiap kunjungan ke daerah saya selalu sampaikan seperti itu, dan kebanyakan dari mereka bisa menerima dan menjadi lebih

memahami apa makna politik PKB selama ini. Sehingga dalam konteks demikian, tidak relevan lagi istilah kader pro-Gus Dur dan kader anti-Gus Dur. Semua kader muda NU dan PKB sedang berusaha secara menyeluruh untuk menuntaskan transisi kepemimpinan dan kelembagaan itu. Yang membedakan barangkali hanya caranya.

Konflik selalu Menghasilkan Regenerasi

Cak Imin sering mengatakan bahwa dalam tradisi NU konflik selalu menghasilkan regenerasi. Bagaimana penjelasannya?

Ya begitulah fakta sejarahnya. Misalnya kita lihat, konflik pada awal 1950-an antara kiai-kiai yang pro-Masyumi dan kiai-kiai yang anti-Masyumi. Dari konflik ini lahirlah generasi politisi muda NU yang tangguh seperti KH Saifuddin Zuhri, Idham Chalid, Zainal Arifin, dan sebagainya.

Kemudian kita cermati konflik antara kubu Cipete dan kubu Situbondo pada awal 1980-an. Konflik ini kemudian melahirkan generasi seperti Gus Dur, Masdar Farid Mas'udi, Slamet Effendy Yusuf, dan lain sebagainya.

NU kan selalu identik dengan konflik, jadi akan selalu lahir generasi baru di NU?

Ya.. NU memang sangat besar, baik dari segi tradisi maupun jumlah anggotanya. Setiap konflik NU selalu menghasilkan transisi kepemimpinan. Pemimpin-pemimpin besar di NU selalu muncul dan dimatangkan oleh konflik.

Menurut Cak Imin, apa sebenarnya makna konflik di NU, dan juga PKB?

Dalam tradisi NU, konflik atau perbedaan pandangan politik dan keagamaan sebenarnya hal yang sangat biasa. Bayangkan saja, madzhab yang dianut NU itu ada empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Jadi karena madzhabnya lebih dari satu, perbedaan pendapat pasti tidak bisa dihindarkan. Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari dalam sebuah kitabnya pernah menulis bahwa dalam masalah ibadah dan muamalah misalnya, ada sekitar 14.000 perbedaan pandangan antara Imam Hanafi dan Imam Maliki.

Jadi orang yang menganggap konflik di NU sebagai hal tidak biasa, pasti dia bukan orang NU, atau minimal tidak memahami tradisi NU.

Itu artinya NU akan selalu dinamis?

Ya pasti. Karena itu kadang kita bisa menyaksikan pemikiran dan sikap kiai-kiai NU yang bisa mendahului zamannya, tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai penjaga tradisi. Dan apa yang terjadi di PKB selama ini juga merupakan proses dinamisasi dan pematangan politik.

Bagaimana NU mengelola konflik atau perbedaan pandangan politik selama ini?

Meski di NU itu kiai yang satu dengan kiai yang lain berbeda pendapat, mereka selalu tetap bersaudara, saling menghargai dan menghormati. KH Abdulwahab Chasbullah dan KH Bisri Syansuri misalnya, hampir selalu berbeda pendapat sepanjang hidup mereka. Ini terjadi karena Mbah Wahab selalu memilih hukum yang paling ringan, sementara Mbah Bisri memilih hukum yang paling berat, dengan alasan masing-masing. Tetapi keduanya tetap saling menghargai dan menghormati sehingga perbedaan pendapat itu justru menjadi solusi bagi berbagai kebuntuan politik NU dan sekaligus menjadikan NU tetap dinamis.

Apakah Cak Imin juga selalu berusaha seperti itu dalam menyikapi konflik di PKB selama ini?

Ya kita terus berikhtiar untuk menjaga spirit seperti itu, kalau tidak mana mungkin selalu bisa menjadi solusi dan bisa bertahan di tengah berbagai tekanan. Hehehe.. Meski Yenny sering menyerang saya misalnya, saya tetap menghormatinya dan menghargainya. Bagaimanapun Yenny adalah saudara saya. Meski Gus Dur sering marah kepada saya misalnya, saya tetap menghormatinya karena Gus Dur adalah orang tua bagi saya.

Berarti sudah tidak ada masalah dengan konflik yang terjadi saat ini?

Jelas tidak, kecuali mereka yang tidak memahami tradisi dan kultur NU. Juga mereka yang selalu mencari keuntungan pribadi dengan cara mempolitisasi konflik yang terjadi. Atau menciptakan konflik tanpa disertai penghormatan dan penghargaan kepada yang lain, tapi hanya mau menang sendiri saja. Percayalah, orang-orang seperti ini dengan sendirinya akan tersingkir dari NU, sebagaimana pernah terjadi di masa lalu dalam sejarah NU.

Daftar Pustaka

Barton, Greg, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta, LKiS, 2003.

_____, “Memahami Abdurrahman Wahid,”
“Pengantar” dalam *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta, LKiS, 1999.

Binder, Leonard, *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies*, Chicago, The University of Chicago Press, 1988.

Bisri, A Mustofa, “Kolom-kolom Mantan Presiden,”
Pengantar Buku *Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser*, Yogyakarta, LKiS, 2002.

- Enayat, Hamid, *Modern Islamic Political Thought: the Respons of the Shi'i and Sunni Muslims to the Twentieth Century*, London, The Macmillan Press, 1982.
- Gibb, Hamilton AR., "al-Mawardi's Theory on the Chalipate," dalam Stanford J Shaw & William R Polk (ed.), *Studies on Civilization of Islam*, Bolton, Beacon Press, 1962.
- Hasyim, KH A Wahid, *Mengapa Memilih NU*, Jakarta, Inti Sarana Aksara, 1985.
- Iskandar, A Muhaimin, *Gus Dur yang Saya Kenal: Catatan Transisi Demokrasi Kita*, Yogyakarta, LKiS, 2004.
- Mihardja, Achdiat K., *Polemik Kebudajaan*, Djakarta, Penerbit Balai Pustaka, 1950.
- Muzadi, KH A Muchit, *NU dan Fiqih Kontekstual*, Yogyakarta, LKPSM, 1994.
- Rais, Diyauddin, *al-Islam wal Khilafah fil 'Ashr al-Hadits*, 1972.
- Ramage, Douglas E, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*, London & New York, Routledge, 1995.

Samson, Allan A., "Conceptions of Politics, Power and Ideology in Contemporary Indonesian Islam," dalam Karl D Jackson & Lucian W Pye (eds.), *Political Power and Communications in Indonesia*, Berkeley-Los Angeles, London, University of California Press, 1978

Wahid, Abdurrahman, "Beberapa Aspek Teoritis dari Pemikiran Politik dan Negara Islam," dalam Imron Hamzah & Choirul Anam (ed.), *Gus Dur Diadili Kiai-kiai: Sebuah Dialog Mencari Kejelasan*, Surabaya, Jawa Pos, 1989.

_____, "Benarkah Kiai Membawa Perubahan Sosial?: Sebuah Pengantar," dalam Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa, Jakarta, P3M, 1987.

_____, *Bunga Rampai Pesantren*, Jakarta, Dharma Bakti, 1978.

_____, "Development by Developing Ourselves," makalah pada Seminar *ASEAN Development Processes and Their Effect on People*, The Asia Partnership for Human

Development (APHD), Penang, Malaysia, 22-25 November 1979.

_____, "Gus Miek: Wajah sebuah Kerinduan," *Kompas*, 13 Juni 1993.

_____, "Intelektual di Tengah Eksklusivisme," *Prisma*, No. 3, Maret 1991

_____, "Islam dan Masyarakat Bangsa," *Pesantren*, No. 3, Vol. VI, 1989

_____, "Islam, the State, and Development in Indonesia," dalam Godfrey Gunatilleke, Neelan Tiruchelvam & Radhika Coomaraswamy [eds.], *Ethical Dilemmas of Development in Asia*, Toronto, Lexington Books, 1983.

_____, "Kebangkitan Kembali Peradaban Islam, Adakah Ia?", Pengantar dalam KH A Wahid Hasyim, *Mengapa Memilih NU*, Jakarta, Inti Sarana Aksara, 1985.

_____, "Menetapkan Pangkalan-pangkalan Pendaratan Menuju Indonesia yang Kita Cita-citakan," dalam *Dialog: Indonesia Kini dan Esok*, Jakarta, Leppenas, 1980.

_____, “Generasi Muda Islam dan Masa Depan Bangsa Indonesia,” makalah disampaikan pada *Temu Wicara Nasional FMGMI*, Jakarta, 27-30 Desember 1996.

_____, “Pengantar” dalam Sitompul, Einar Martahan, *NU dan Pancasila*, Jakarta, Sinar Harapan, 1989.

_____, “Pluralisme Agama dan Masa Depan Indonesia,” makalah disampaikan pada seminar *Agama dan Masyarakat: Kajian Interdisipliner terhadap Agama*, UKSW, Salatiga Jawa Tengah, 20 November 1992.

Koran dan Majalah

BBC News

Jawa Pos

Kedaulatan Rakyat

Kompas

Rakyat Merdeka

Seputar Indonesia

Time

Indeks

A

- abad agama 87
Abdurrahman Wahid
 2, 7, 13, 15, 17,
 23, 31, 53, 64,
 67, 73, 75, 83,
 85, 96, 101, 118,
 123, 129, 161
ABRI 79
Abu Bakar 150
Abu Hasan 130
Abu Mansur al-Maturidi
 130
Aceh 51
Achdiat K. Mihardja 39
Afrika 84, 89, 92
Afrika Barat 92
*Ahlus Sunnah wal
 Jamaah* 46, 68,
 108, 109, 113,
 116
Ahmadiyah 70
akhlaq politik 149
aksioma 24
aktivis Islam 91, 93
akumulasi materi 65
akumulasi pengetahuan
 52
akumulatif 77
Al-Ghazali 9, 69, 109,
 130
al-imamah al-uzhma 109
al-imamah as-shughra
 109
al-Juwaini 109
al-Maududi 110, 111
al-Mawardi 109
al-Mustasyfa 69
al-Quran 97, 110, 138
Ali Abd ar-Raziq 111
Ali Wardana 50
Amerika Latin 84
Amerika Serikat 92
Amien Rais 155
anti-kekerasan 10

antusiasme 91
aspirasi 94, 95, 101
aspiratif 43
astronomi 97

B

Baghdad 75, 92
Bakorstanas 35
balaghah 36
Bani Hasyim 150
Banjarmasin 62
Bank Dunia 50
Bapak Demokrasi 6
Bapak Pluralisme 6, 15
Bapak Toleransi 6, 15
barakah 48
Barat 32, 39
basis kultur 63
BBC News 31
Bhagawad Gita 17
Brazil 47
budayawan 75

C

cadangan devisa 84
Cattenacio 53, 56
cendekiawan rakyat
75, 77, 81
Cina 35, 84
cita-cita nasional 90
clear ideology 101
continuum 24
counter-discourse 111
counter-hegemony 111

D

daerah sangga 71
dakwah 1, 2, 5, 6,
20, 76, 124, 125
dar as-sulh 118, 132
dar Islam 62, 114
darul Islam 62, 114
daya ikat 101
degradasi 6, 28, 56,
65, 102, 105
degradasi kultur 65
Dekolonialisasi 91, 93,
97
Dekrit Presiden 117
demokrasi 4, 6, 7, 8,
10, 11, 31, 32,
33, 56, 135, 136,
139, 140, 162
demokrasi prosedural
135
demokrasi substansial
135
demokrat 51
demokratis 111
demokratisasi
18, 33, 127,
135, 136, 139
demonstrasi 49
deprivasi relatif 86
dialog 79, 87, 88, 95,
104
dimensi pendidikan 65
dinamis
60, 68, 70, 71,
72, 95

dinamisasi
28, 45, 60, 64,
70, 119, 133,
142, 159
dinamisme 34
disintegrasi 16, 61,
102, 113
diskursus 92, 101
disorientasi 56
Diyauddin ar-Rais 109
dominasi 40, 92, 94
dominasi Barat 94
dualisme 60
Dzikrul Ghoflin 138

E

egalitarian 55, 73
egosentrisme 88
ekonomi-politik
internasional 85
eksekutif 42
ekspresi keberagamaan
11
ekstrem 105
El Real 48
elit politik 101
ELS 39
esensial 71, 72, 105
etika 33, 34
etika masyarakat
12, 54
etika sosial 3, 4, 12,
13, 55, 78
etis 117
etnis 70

F

Farhat A Hussein
96, 97
fatsun politik 149
faudla 110
Fernando Hierro 48
fiqih 62, 70, 71, 72,
73, 115, 116,
118, 124, 129,
130, 131, 132,
134, 136, 137,
140
formalisasi 61, 62
formalisasi syariah 61
formalisme 123
formalistik 70, 73
fundamentalis agama 6
fundamentalisme
32, 37, 54, 86
fungsi transformatif 41

G

gempa bumi 7
generasi muda NU 64
geologi 97
gerakan Islam 63, 88,
93, 94, 95
gerakan masyarakat 63
gerakan separatis 119
gerakan sosial 63
ghasab 148
globalisasi 18, 86
godaan kekuasaan 5
godaan materi 5
Gontor 42

Gus Dur 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 21,
23, 24, 25, 26,
27, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 41,
42, 43, 44, 45,
47, 50, 51, 53,
54, 55, 56, 57,
58, 59, 64, 65,
67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82,
83, 91, 99, 103,
138, 147, 148,
149, 150, 151,
152, 153, 154,
155, 156, 157,
160, 161, 162,
163

Gus Solah 151, 152

H

Hadis 110

Hadratus Syaikh

16, 150, 158

hak asasi manusia

4, 5, 7, 8, 9,
23, 35

Hanafi 109, 130

Hanbali 109, 130

hanif 18

Harkitnas 100

Hasan al-Banna 110

Hatta 62, 65, 77, 78

hedonis 104

hedonistik 120

hegemoni 40, 87, 92

hegemoni Barat 92

hegemonik 87, 107,

111

hifz ad-din 25, 26, 70

hifz al-'aql 25, 70

hifz al-mal 25, 70

hifz an-nafs 25, 26, 69

hifz an-nasl 25, 70

Hindia Belanda 114

hipotesis operatif 96

HIS 39

historis 43

HOS Cokroaminoto 65

humanistik 139

husnu dzan 155

I

Ibnu Khaldun 109

identitas nasional 97

ideologi 34, 65, 88,

101, 102, 103,

104, 111, 112,

113, 114, 115, 116

ideologi alternatif 34

ideologi nasional 102

ideologis 62

ideologisasi 63, 95, 110

Idham Chalid 42, 157

ikhtilaf 119

ilmuwan 54

Imam Thabari 150

imamah 109

IMF 50
India 84, 85, 129
infrastruktur politik
 145
Inggris 96
Injil 17
inklusif 72, 95
inklusivisme 33
inspirasi 78
instabilitas 102
instan 77
Instruksi Bersama 92
integrasi 94
integritas
 11, 51, 56, 122
intelektual 42
Internasionalisasi Peran
 Ulama 31, 41, 43
intervensi 60, 87
intoleran 19
investasi sosial 76, 82
Iran 32
islah 152
Islam radikal 32
Islam tradisional 35
Israel 44, 45
istiqamah 124
Italia 53, 56

J

Jalur Gaza 44
Jepang 84, 124
jihad 124
jumud 128, 133
Junaid al-Baghdadi 130

juru dakwah 76

K

kaffah 36
kaidah fiqih 118, 140
Kazakhstan 84
keadilan 55
keagungan rohani 85
kebangkitan Eropa 89
kebangkitan Islam 85,
 88, 89, 91, 93,
 98
kebangkitan nasional 99
kebangkitan peradaban
 87, 99
kebangsaan 56
kebesaran material 85
kekerasan 79, 86
kelas onggang-onggang
 6
kemakmuran 61, 69
kemandirian 97
kemaslahatan 37, 38,
 108, 109, 110,
 131, 137
kemerdekaan 51, 93
kemiskinan 86
kepemimpinan nasional
 102, 103, 155,
 156
Ketua Umum DPP PKB
 147, 148, 152
kewajiban agama 22
KH A Muchit Muzadi

114
 KH A Mustofa Bisri 80
 KH A Wahid Hasyim
 65, 68, 83, 99,
 116, 117, 124
 KH Abdulwahab
 Chasbullah 126,
 159
 KH Bisri Syansuri 159
 KH Hamim Djazuli 138
 KH Hasyim Asy'ari 16,
 115, 122, 126
 KH M Cholil Bisri 68
 KH Masykur 116
 KH Saifuddin Zuhri 157
 KH Suady Wijaya 138
khalifah 3, 150
khalwat 125
 kharisma 122
 kharismatik 122
 khazanah 55, 73, 78
 khazanah keilmuan 8
khilafah 108, 109,
 110, 111, 112,
 119
 kiai
 32, 34, 35, 41, 42,
 43, 44, 45, 48, 49,
 50, 54, 64, 68,
 73
 kiai muda 42
 kitab klasik 68
 klaim kebenaran 38
 klaim superioritas 88
 klasik 48, 55
 kolektif 39, 61,
 71, 100
 kolonialisme 87,
 110, 123
 Komite Hijaz 44
 komplementer 3, 34,
 95, 104, 112, 133
 komprehensif 28, 36,
 64, 103
 komunikasi 79, 88, 95
 konflik 60, 61, 63,
 88, 89
 konsensus 89
 konservatif 13
 konsolidasi 60, 61
 Konstituante 132
 konsumerisme massa 61
 kontekstual 96
 kontekstualisasi
 24, 26, 27, 28
 kontraproduktif 95
 kontroversial 67, 81
 Korea Selatan 84
 kosmetika politik 61
 kosmopolit 69, 73, 131
 kosmopolitanisme
 69, 133
 kreativitas 63
 kubu Cipete 157
 kubu Situbondo 157
 kultur demokrasi
 135, 136
 kultural 43, 55,
 61, 76, 96
 kultus 86

kurikulum pendidikan
20
Kuwait 96
Kyrgyzstan 84

L

langgar 120
LB Moerdani 79
legacy of the past 73
legal formalistik 1,
17, 23, 55, 73
legasi 68, 85, 93
legasi arsitektur 85
legendaris 51
legislatif 42
lentur 63, 72
liberal 13, 104
liberalisasi
86, 102, 104
liberalisasi ekonomi 86
liberalisme 94
Litsus 35
lokomotif 42

M

M Chatib Basri 50
M Ikhsan 50
M Maftuh Basyuni 121
M Sadli 50
Mafia Berkeley 50
makar 57
Malaysia 73, 100
Maliki 109, 130
manifestasi kultural 96

manusiawi 94
maqashid 9, 25,
69, 70
Marokko 84, 87, 92
masa kegelapan 92
Masdar Farid 157
Masjid Pualam Biru
85, 129
masalah 37
masuk Islam 96
masyarakat bangsa 3,
4, 13, 14, 18, 25,
28, 55, 91, 105,
113, 115, 144
masyarakat Islam
63, 86, 92
Masyumi 124
material 85, 100
mayoritas 56, 94
mazhab 24, 37, 38,
64, 109, 130, 131,
136
mazhab manhajiy 64
mazhab qauliy 64
mazhabiy 37
Megawati 31, 155
Menteri Agama 92
Menteri Dalam Negeri
92
merdeka 90, 92
militer 121, 123
minoritas 8, 35,
56, 70
modal 61, 65,
85, 93, 100
modal kolektif 80

modern 68, 102
modernisme 133
Monitor 70
monokultural 55, 73
monolitik 104
moral 65, 72, 111,
117, 133, 134
moralitas 71
muballig 1, 2, 6
Muhaimin Iskandar
35, 162
mujahadah Sapu Jagad
138
multikultur
15, 16, 24, 28
multikultural 33
muqarrar 68
N
Nahdlatul Ulama 32,
34, 37, 43, 62,
75, 108, 113, 116,
122, 141, 149
Nahdliyyin 43
nahwu 36
nasionalis 124
nasionalisme 89,
119, 123
national state 34
national view 33, 54
negara federal 61
negara industri 83
negara Islam 61, 62,
87, 88, 92, 93,
114, 118, 132
negara nasional 34

neolib 104
nilai tradisional 13
NKRI 53, 56, 61, 62,
107, 113, 115,
117, 118, 124,
132, 142
Nobel Asia 33
normatif 72, 81
NU 8, 42, 43, 44, 45,
46, 51, 62, 63, 64,
83, 99, 114, 115,
116, 117, 118,
121, 122, 127,
128, 129, 130,
131, 132, 133,
134, 135, 136,
137, 138, 139,
140, 141, 142,
143, 144, 145,
149, 154, 157,
158, 159, 160,
162, 164, 165
Nusantara 62, 63

O

olah kanuragan 41
oportunis 128, 133
optimisme 60
Orde Baru 59, 79, 135
orientasi 72
otonomi 63
overclaim 103, 112

P

pahlawan HAM 6, 23

- Pakistan 92
- Palestina 44, 45
- Pancasila 61, 62, 101, 102, 107, 115, 116, 117, 118, 132, 142, 143, 165
- pandangan dunia 73
- pandangan hidup 13, 34, 38, 64, 70, 71, 72, 74, 86, 129
- Papua 51
- paradoks 135
- parokialisme 94, 95
- partai politik 59, 60, 61, 63
- partai sosialis 61
- patriotisme 89, 107, 118, 119
- PBNU 42, 43, 75, 116
- peaceful coexistence* 10, 16
- Pele 47, 48
- pembangunan 73, 75, 103
- pemimpin dunia 80
- pemimpin umat 64, 75
- pemurnian 123
- pencuri jabatan 150
- pendiri bangsa 77
- penjajahan Barat 92
- peradaban Indik 84
- peradaban Islam 9, 63, 69, 84, 85, 86, 89, 92, 93, 96, 129, 132, 133, 134, 135
- peradaban Sinetik 84, 85
- Perang Dunia II 92
- perdamaian dunia 14
- peribadatan 20
- perjuangan rakyat 63
- persenjataan 83
- perspektif gender 29
- perspektif HAM 29
- perspektif umat 29
- pertumbuhan ekonomi 84
- pesantren 7, 8, 13, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 55, 63, 64, 68, 70, 71, 73, 74, 78, 121, 122, 123, 124, 125
- Piagam Jakarta 61
- PKB 43, 44, 46, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 76, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
- pluralisme 16, 17, 32, 33, 130
- pluralistik 54, 56, 94, 113
- polemik 67

pragmatis 120
pribumisasi Islam 78
pro-Gus Dur 157
pro-Masyumi 157
profesional 59
progresif 42
prosedur hukum
70, 149

Q

Qanun Asasy 150
qawaid fiqhiyyah
71, 131

R

radikalisasi 102
radikalisme 32, 37, 86
rahmatan lil 'alamin 69
raksasa ekonomi 84
Ramon Magsaysay 33
raison d'être 69
rasionalisasi 112
rasionalitas
34, 46, 137
Raul Gonzalez 48
reaksioner 63
Real Madrid 47, 48
realitas 73, 95
reformasi 59
rekomendasi 44
relasi struktural 28
religious elites 54
resi 125
Resolusi Jihad 123
Revolusi Islam 32

Revolusi Islam Iran 92
rezim pengetahuan 93
Robinho 47, 48
RRC 84
rujukan 62, 78, 104
Rusia 84, 87, 107,
108

S

salafiyah 40
santri 36, 39, 40,
70, 81
saraf 36
sarjana muslim 93
SBY 155
SCO 84
sektoral 103
Sekutu 115
semaan al-Quran 138
separatisme 51
serba fiqih 70, 72, 134
seremoni 99, 100
Shumubu 124
silaturahmi 78
Singapura 100
sistem dunia 87
sistem sosial 94
Situbondo 62
sivilisasi 83
siyasa 68
skriptural 17
Slamet Effendy Yusuf
157
Snouck Hurgronje 127
social ethics 33, 78
social welfare 40

Soedjatmoko 83, 84
 Soeharto 78
 soliditas 95
 Spanyol 48
 spirit kebangkitan
 88, 91
 spiritual 100
 spiritualitas
 46, 63, 130, 137
 Sri Mulyani 50
 statis 95
 status sosial 5, 65
 status teologis 62
 struktur pengetahuan
 77, 78
 subsidier 94
 substansi hukum 149
 Sukarno 31, 62, 65,
 77, 78
 Sukarno-Hatta 62
 sumber daya alam 100
 sumber inspiratif 96
 superioritas 88
 suplementer 34
 Sutomo 39
 Syah Reza Pahlevi 92
 syariah 61, 68, 74
 syariat 37, 61, 68, 69

T

tablig 1
 Taj Mahal 85, 129
 Tajikistan 84
take and give
 10, 17, 95, 133
 Tan Malaka 65

taqlid 70
Tarikh Kabir 150
 Tartar 92
tasawuf 36, 137
 tauhid 36
taushiyah 44
 Tebuireng 122
 teknokrat 54
 teologi 114, 121, 130
 teologis 114
 teori hukum 71
 terorisme 37, 86, 108
thariqah 48, 137
The Age of Religion 87
The Economist 31
the founding fathers 56
the legacy of the past 55
 Tim Asistensi Pendirian
 PKB 43
Time 32
 Timur Tengah 44, 45
 Tonghoa 35
 titik pertahanan 56, 57
 toleran 15, 18, 20,
 21, 51, 55, 73,
 130
 toleransi 4, 7, 9, 10,
 15, 16, 20, 33, 51
 tradisi 33, 35, 37,
 38, 39, 51, 55,
 63, 64, 68, 70,
 71, 74, 78, 85, 87
 tradisi pesantren
 64, 68, 70, 74, 78
 transformasi 64, 95

transformatif 69
transisi figur 156
transisi hegemoni 87
transisi kelembagaan
156
transisi kepemimpinan
42, 155, 156, 157, 158
truth claim 4
tsunami 7
tujuan syariat 9, 10,
25, 26, 69
Turki 85
TVRI 53

U

ulama 31, 32, 34,
37, 41, 43, 48,
49, 51, 62, 64,
69, 73
Umar bin Khattab 151
umat Islam
88, 89, 91, 92, 95, 98
Uni Eropa 84, 87
Uni Soviet 108
universal 88
universalisme 33
*unpredictable moves and
decisions* 32
usul al-fiqh 71, 131
UUD 1945 61, 62,
115, 116, 117
Uzbekistan 84

V

Vietnam 84, 100

visi humanistik 21
Vladimir Putin 107

W

Walisongo 44
wawasan keilmuan 96
Wiranto 155
wisdom 125

Z

Zia ul-Haq 92

Sumber Tulisan

1. "Gus Dur, *Muballig* Kemanusiaan," draft tulisan *mengenang 100 hari Gus Dur*, belum dipublikasikan.
2. "Gus Dur: Perawat Tradisi dan Penjaga Demokrasi," draft tulisan *In Memoriam Gus Dur*, belum dipublikasikan.
3. "Gus Dur dan Toleransi Plus," draft tulisan *mengenang 100 hari Gus Dur*, belum dipublikasikan.
4. "Melanjutkan Perjuangan Gus Dur di Bidang HAM," draft tulisan *mengenang 100 hari Gus Dur*, belum dipublikasikan.
5. "Gus Dur dan Internasionalisasi Peran Ulama," pengantar buku *Gus Dur Pecinta Ulama Sepanjang Zaman* (2005).
6. "Gus Dur, Guru Sumber Inspirasi dan Yang Membesarkan," catatan Piala Dunia 2006, *Rakyat Merdeka*, 3 Juli 2006.

7. "Cattenacio Gus Dur, Islam dan NKRI," catatan Piala Dunia 2006, *Rakyat Merdeka*, 16 Juni 2006.
8. "Gus Dur, PKB, dan Kebangkitan Indonesia," *Seputar Indonesia*, 13 Juli 2007.
9. "Gus Dur dan *Siyasah* Bersendi *Syariah*," *Seputar Indonesia*, 7 Juni 2007.
10. "Belajar Politik Kepada Gus Dur," *Jawa Pos*, 7 Juli 2007.
11. "Gus Dur dan Visi Kebangkitan Bangsa," *Seputar Indonesia*, 24 Januari 2007.
12. "Gus Dur dan Transformasi Kebangkitan Islam," *Jawa Pos*, 2 Februari 2007.
13. "Gus Dur dan Kebangkitan Kembali Indonesia," *Kompas*, 9 Juli 2007.
14. "Menjaga Visi Nasional: Soal Khilafah, Pancasila dan NKRI," makalah disampaikan pada *Seminar Internasional "Khilafah vis a vis NKRI"*, dalam rangka Temu Alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 14 November 2007.
15. Berguru pada Pendiri NU," *Seputar Indonesia*, 3 Februari 2008.
16. "NU, Transformasi Bangsa dan Demokratisasi," gabungan dari 2 tulisan yang dimuat di harian *Pikiran Rakyat* edisi 9 Februari 2008 dan *Kedaulatan Rakyat* edisi 31 Januari 2008.
17. "PKB, Kiai dan Tradisi NU," pengantar buku *Pemikiran Politik 9 Ulama Besar NU* (2008).

Tentang Penulis

H. A. Muhaminin Iskandar, M.Si., adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB). Dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, ia dipercaya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lahir di Jombang Jawa Timur pada 24 September 1966, menyelesaikan sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Jogjakarta tahun 1991 dan pascasarjana (S2) jurusan Komunikasi Publik Universitas Indonesia (UI).

Sejak mahasiswa aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi, mulai dari Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fisipol UGM sampai Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jogjakarta (1989) dan tahun 1994 terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PMII. Selain aktif dalam berbagai kelompok studi di Jakarta sejak tahun 1991, ia juga bekerja sebagai peneliti pada Lembaga Pendapat Umum (LPU), menjadi Kepala

Litbang Tabloid *Detik*, dan bekerja pada Hellen Kellner Internasional.

Pada usia yang relatif muda, ia ikut membidani kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa dengan menjadi anggota Tim Sembilan dan dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB yang pertama. Pada Pemilu 1999 terpilih sebagai anggota DPR dan menjadi Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang pertama, sebelum akhirnya dipercaya sebagai Wakil Ketua DPR RI hasil Pemilu 1999. Dan pada pemilu 2009, ia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014.

Buku-buku karyanya yang sudah diterbitkan antara lain *Masyarakat Indonesia Abad XXI* (terbit tahun 1996), *Paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran* (1997), *Manajemen Komunikasi Partai Kebangkitan Bangsa* (2000), *Gus Dur yang Saya Kenal: Catatan Transisi Demokrasi Kita* (2004), *Melampaui Demokrasi: Merawat Bangsa dengan Visi Ulama, Refleksi Sewindu Partai Kebangkitan Bangsa* (2006), *Spiritualitas Sepak Bola: Perspektif Sosial Politik Piala Dunia 2006* (2006), *Gus Dur, Islam dan Kebangkitan Indonesia* (2007), *Momentum untuk Bangkit: Percikan Pemikiran Ekonomi, Politik dan Keagamaan* (2009), dan *Inspiring Ramadhan: Renungan Pencerahan di Bulan Penuh Kemuliaan* (2010). - []